

MUSLIHAT KAPITALIS GLOBAL

Selingkuh Industri Farmasi dengan Perusahaan Rokok AS

Kata Pengantar: DR.Hi.MS.Kaban,SE. Ms.i.

Okta Pinanjaya
Waskito Giri S.



OKTA PINANJAYA
WASKITO GIRI SASONGKO

MUSLIHAT KAPITALIS GLOBAL

SELINGKUH INDUSTRI FARMASI DENGAN PERUSAHAAN ROKOK AS

Indonesia Berdikari
Jakarta 2012

Muslihat Kapitalis Global

Selingkuh Industri Farmasi dengan Perusahaan Rokok AS

16 x 23 cm, xiv + 198 halaman, 2012

ISBN : 978-602-99292-2-5

Penulis :

Okta Pinanjaya

Waskito Giri Sasongko

Penyunting :

Rusdi Mathari

Penerbit :

Indonesia Berdikari

Jl. Salemba Tengah No. 39 BB Lt. II

Jakarta Pusat 10440

Tahun :

Februari 2012

Disain Sampul :

Arif Timor dan Fajrian

Tata Letak:

A. Zulvan Kurniawan

Pengantar

Secara ekonomi dan politik kita seringkali bersikap kurang kritis dalam merespon isu anti-rokok, terlebih ketika isu tersebut diusung mengatasnamakan wacana kesehatan masyarakat. Isu rokok kemudian disederhanakan dalam dimensi kesehatan semata. Dan kita serta-merta menganggapnya sebagai sebuah kebenaran absolut tanpa skeptisme dan nalar kritis. Terlebih ketika wacana pengetahuan tersebut diklaim ilmiah dan saintifik sehingga kita menjadi alpa pada keluasan spektrum kebenaran dimensional lainnya, yaitu ekonomi-politik, sosial dan budaya. Padahal jika kita masuk lebih mendalam, tampak adanya ambiguitas atau bahkan keganjilan tersendiri dalam wacana anti-rokok global. Pasalnya, meski di satu sisi seringkali dikatakan bahwa entitas tembakau mengandung senyawa karsinogen sebagai penyebab penyakit kanker, namun di sisi lain tembakau juga disebut memiliki potensi kandungan protein yang justru sanggup mencegah berbagai penyakit, termasuk kanker.

Sebagai contoh, Dr. Arief B. Witarto, M.Eng, peneliti dari Pusat Penelitian Bioteknologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), baru-baru ini berhasil menggunakan tembakau sebagai alat untuk memproduksi protein *Growth Colony Stimulating Factor* (GCSF). Suatu hormon penting dalam menstimulasi produksi darah yang sanggup menstimulasi perbanyakkan sel tunas (*stem cell*) untuk memulihkan jaringan fungsi tubuh yang sudah rusak (**Republika**, 24 Juli 2008). Sebelumnya, peneliti LIPI ini juga bekerja sama dengan peneliti **Fraunhofer Institute for Environmental Chemistry and Ecotoxicology** dari Jerman. Dengan menggunakan tembakau

transgenik mereka mampu memproduksi tiga protein utama yaitu, *human serum albumin* (HSA) untuk pengobatan sirosis hati dan luka bakar, *human interferon-alfa* (IFN- α 2) sebagai antivirus yang banyak dipakai untuk pengobatan HIV/AIDS dan hepatitis, serta antibodi M12 untuk mengenali antigen MUC-1 yang banyak terdapat pada permukaan sel kanker. Sehingga seperti misalnya kanker payudara dan kanker hati dapat didiagnosis lebih akurat dan dibunuh secara tepat (**Tempo**, 15 Maret 2005). Tanpa terkecuali juga hasil penelitian Profesor Sutiman dan koleganya. Sistem pengobatan melalui “teknologi pengasapan” tembakau yang telah mereka rekayasa melalui teknologi bio-molekuler (*nanobiologi*), jelas memperlihatkan sisi lain dari rokok yang selama ini terburu-buru distigmatisasi sebagai penyebab utama munculnya epidemi dalam masyarakat modern.

Pandangan *good and evil* soal tembakau ini tidak hanya terjadi di kalangan ilmuwan negeri kita, melainkan juga di tingkat internasional. Dengan begitu wacana bahwa entitas tembakau adalah senyawa berbahaya penyebab epidemi masyarakat modern, perlu disikapi dengan kritis dan bijaksana. Karena kebenaran ilmiahnya pun masih *debatable*.

Keganjilan lain dalam wacana anti-rokok berbaju “filantropisme” isu kesehatan masyarakat ialah adanya “sponsor asing” di balik pendanaan gerakan anti-rokok global, termasuk di Indonesia. Lembaga **Bloomberg Initiative** didirikan Michael Bloomberg, milyarder papan atas Amerika sekaligus walikota New York tiga periode (2001 – 2012), dan belakangan santer disebut akan mencalonkan diri dalam Pilpres AS mendatang, telah menggelontorkan dana yang sangat besar bagi mekarnya gerakan anti-rokok di Indonesia. Dari “sponsor asing” ini milyaran dollar AS telah mengalir mendanai “perang anti-rokok”. Nah, pada titik ini kita harus berani bersikap kritis dan bertanya tentang kemungkinan adanya kepentingan tersembunyi di balik semua hal di atas. Benarkah, pamrih Bloomberg Initiative semata-mata suatu

sikap filantropis seorang Michael Bloomberg demi kesejahteraan dan kesehatan masyarakat dunia? Jawabannya bisa Anda telusuri dalam buku ini.

Buku “Muslihat Kapitalis Global: Selingkuh Industri Farmasi dengan Perusahaan Rokok AS” ini mencoba mengungkap peran seorang Michael Bloomberg yang begitu piawai mengemas kepentingan kapitalisme global melalui isu kesehatan masyarakat. Barangkali karena keluguan masyarakat awam seperti kita, membuat kita tidak pernah curiga terhadap Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan menganggapnya sebagai institusi yang bebas kepentingan dalam menjalankan misi kesehatan masyarakat dunia. Buku “Muslihat Kapitalis Global: Selingkuh Industri Farmasi dengan Perusahaan Rokok AS” berhasil mengungkap sisi kesejarahan WHO yang sejak fase embrional dirumuskan sebagai instrumen global dari kepentingan industri farmasi. Buku ini juga menelusuri secara lebih jauh modus operandi perusahaan-perusahaan multinasional farmasi dalam menggunakan WHO sebagai alat konsolidasi kepentingan modal mereka, salah satunya melalui traktat FCTC (Framework Convention for Tobacco Control).

Hasil riset buku ini mampu memperlihatkan proses konsolidasi jaringan konglomerasi perusahaan-perusahaan multinasional (MNCs/TNCs) Amerika, khususnya perusahaan farmasi dan rokok dalam suatu jalinan kepentingan yang ternyata jauh dari berkontradiksi. Mereka justru sanggup membangun suatu sinergi kepentingan, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui skema Konvensi Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau (FCTC) yang dirumuskan WHO.

Barangkali penulisan hasil riset ini agak rumit dan jelimet (*sophisticated*), namun secara sederhana mungkin bisa digambarkan sebagai berikut: Melalui WHO, kapitalisme global (perusahaan-perusahaan multinasional farmasi) menetapkan semacam ketentuan

standar produk internasional terhadap produk olahan tembakau dan sekaligus berjualan produk *Nicotin Replacement Therapy* (NRT), dengan dampak perusahaan-perusahaan rokok lokal menengah dan kecil ambruk karena tidak sanggup memenuhi ketentuan skema cukai tinggi tersebut. Bersamaan dengan itu, di sisi lain terbukalah pangsa pasar tembakau nasional kita sehingga memungkinkan perusahaan-perusahaan multinasional rokok asing melakukan ekspansi pasar mereka, baik itu melalui akuisisi maupun merger.

Sedikit kelemahan dari buku ini ialah, riset yang dilakukan tidak menitik pada kaitan antara konsep filantropis dan konsep imperialisme dalam wacana imperialisme termutakhir, yakni “imperialisme berjubah filantropis”. Terlepas dari semua itu, spirit penelitian dalam membongkar berbagai aspek yang tersembunyi di balik kampanye anti-rokok yang mengatasnamakan wacana kesehatan masyarakat patut menjadi pertimbangan kita semua.

Ada kompleksitas persoalan dalam isu tembakau yang tidak mudah kita reduksi dan sederhanakan dalam logika “hitam-putih”. Hal penting lainnya ialah bahwa buku ini telah menyumbang suatu model pembacaan baru tentang gerak-gerik rezim kapitalisme global, yang tidak hanya bekerja melalui instrumen liberalisasi (deregulasi) melainkan justru dengan instrumen regulasi. Namun keduanya ternyata memiliki dampak sama, yaitu terjadinya ekspansi modal dari negara-negara pusat ke pinggiran dan akumulasi keuntungan dari negara-negara pinggiran ke pusat.

Jakarta, 17 Februari 2012

DR.Hi.MS.Kaban,SE. M.Si.

Daftar Isi

Pengantar	iii
Daftar Isi	vii
Pendahuluan	ix
Bab I : Globalisasi dalam Lintasan Sejarah dan Peristiwa	
Tembakau dan Politik “zig-zag”	1
Sebuah Perdebatan Tiada Akhir	4
Huru-Hara yang Rusuh	19
Bab II : Empat Abad Retorika Anti Tembakau dari Paus Urban VII Hingga Bloomberg	
Hindia Belanda	38
Bab III : Siapakah Michael Bloomberg	
Memegang Kepala Ular	43
Kapitalisme, Aku Datang!	48
Kekayaan, Politik, dan Filantropi	51
Di Balik Kampanye Anti-Tembakau	63
Bab IV : Invisible Head - Sebuah Imperium Dalam Kapitalisme	
Johns Hopkins University - Pintu Gerbang Kepentingan	73

Raksasa Industri Farmasi dan Tembakau Dunia	87
Operasi Konsolidasi Industrialis dan Penguasa Modal Global	105
Bab V : Potret Ancaman - Kampanye Anti-Tembakau di Indonesia	
Perang Iman Buta Anti-Tembakau	125
Perebutan Harta Karun	134
Operasi Infiltrasi Terhadap Kebijakan Nasional	144
Bab VI : Penutup	
Indonesia Republik Kretek—Benteng Terakhir Kearifan dan Nasionalisme Tembakau	173
Daftar Pustaka	181
Index	189

Pendahuluan

*R*okok berbahaya, dan karena itu rokok (tembakau) harus diperangi. Itulah pesan kampanye yang terus-menerus dilakukan para penggiat anti-tembakau di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Mereka mencoba membangun konsep “baik” dan “buruk” secara sosial, melalui berbagai argumen –mulai dari yang seolah rasional hingga kampanye hitam yang mirip dengan propaganda Nazi di zaman Hitler. Para perokok lalu ditempatkan sedemikian rupa sebagai subyek yang nyaris tanpa nilai baik. Minimal, mereka dikesankan tengah berhadap-hadapan dengan kaum perempuan dan keluarga sebagai entitas subyek-korban yang merupakan anti-tesis terbesar dari potensi bahaya rokok.

Tidak ada yang keliru dengan kampanye anti-tembakau semacam itu, tentu saja. Siapa pun paham, kesehatan adalah harta yang tak terkira nilainya bagi setiap individu dan masyarakat. Akan tetapi ketika banyak orang kemudian tahu, kampanye anti-tembakau itu tidak berdiri sendiri, antara lain karena peran besar dari sebuah lembaga Bloomberg Initiative misalnya, maka juga tidak salah bila kemudian muncul skeptisme bahwa kampanye anti-tembakau sebetulnya tidak bebas nilai. Dari skeptisme itu, juga tidak salah bila ada yang bertanya: benarkah semua kampanye anti-tembakau itu semata-mata ditujukan untuk kesehatan individu dan masyarakat? Atau tidakkah sebetulnya, ada kepentingan lain di balik semua kampanye anti-tembakau yang (harus diakui) ternyata diingkosi milyaran dolar oleh Bloomberg Initiative itu?

Tentu semua pertanyaan itu akan tampak seperti kampanye tandingan melawan kampanye anti-tembakau. Para penggiat kampanye anti-tembakau pun, bisa pula menganggap dan mengatakan kampanye tandingan terhadap mereka juga diongkosi lembaga tertentu. Namun persoalannya di sini adalah modus dari kampanye anti-tembakau yang sejauh ini telanjur dibungkus sebagai gerakan yang seolah-olah tanpa ambisi politik, bebas kepentingan dan semata demi kesehatan masyarakat. Dan inilah yang dipersoalkan oleh Wanda Hamilton.

Dalam buku *Nicotine War*, Hamilton mengingatkan adanya sejumlah fakta menarik di balik seluruh agenda perang global terhadap tembakau. Salah satunya adalah kepentingan industri farmasi yang berusaha hendak menikmati “kue” pasar nikotin dunia yang sejauh ini hanya dinikmati industri rokok. Nikotin adalah zat yang terkandung di dalam daun tembakau yang selalu dipersepsikan sebagai zat berbahaya, padahal sama dengan senyawa lain, nikotin (dalam takaran tertentu) bisa berfungsi sebagai obat. Dan itulah yang dipersoalkan Hamilton.

Hamilton juga mengungkapkan, ada hubungan kepentingan antara industri rokok dan industri farmasi di balik kampanye anti-tembakau. Itu misalnya yang dilakukan oleh perusahaan tembakau terbesar ketiga di dunia Japan Tobacco dengan produsen produk kesehatan Johnson & Johnson. Kedua perusahaan terbukti telah meneken kesepakatan bisnis berupa (lisensi) hak atas senyawa baru dari nikotin untuk menangani nyeri dan radang. Hamilton mengistilahkan agenda tersembunyi seperti ini sebagai “perang dagang” antara kepentingan industri rokok dan industri farmasi dalam memperebutkan potensi keuntungan besar dari bisnis nikotin dunia.

Dari paparan Hamilton itu, maka bisa diduga gerakan filantropis (di balik kampanye anti-tembakau) dan karakter ekspansi kapitalisme global, sebetulnya tidak berdiri sendiri-sendiri melainkan sedang bergerak menuju ke muara yang sama: kepentingan pemodal dunia. Dugaan ini menemukan pembenaran, karena ratifikasi Konvensi

Pembatasan terhadap Pengendalian Tembakau atau FCTC yang diprakarsai Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) terbukti juga dibiayai oleh Perusahaan farmasi Multinasional.

Tokoh utama di balik gerakan ini adalah Michael Ruben Bloomberg. Dia adalah wali kota New York dan pemilik jaringan bisnis Bloomberg, yang telah berperan secara individu dan melalui lembaganya, sebagai donatur dan supervisi kampanye anti-tembakau di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Dari jejak rekamnya, banyak irisan-irisan kepentingan yang berhubungan secara rumit dan terkesan paradoks antara kepentingan pemodal besar dunia dengan kampanye anti-tembakau disokong oleh Bloomberg. Hal ini terutama disebabkan oleh atmosfer tradisi dan budaya ekonomi kapitalistik *ala* Amerika yang secara piawai bisa meleburkan perilaku kompetitif atau konflik kepentingan di antara para pelaku usaha yang berbeda.

Akan tetapi, pada akhirnya terlihat banyak kepentingan di antara industri-industri berbeda yang terasosiasi ke dalam suatu sindikasi kepentingan atas bisnis tembakau dunia yang sekali lagi, berujung pada akumulasi keuntungan modal sebesar-besarnya. Dan Bloomberg tampaknya sadar betul, untuk tidak mengatakan telah “bersedia” menjadi lokomotif “nilai-nilai” yang menarik gerbong-gerbong kekuasaan modal Amerika. Tembakau sebagai bisnis besar kemudian dijadikan sebagai salah satu obyek permainan “nilai-nilai” itu dalam sebuah rel panjang perang anti-tembakau.

Lalu yang tampak dari semua gerakan anti-tembakau itu adalah sebuah gejala anomali. Di satu sisi, tembakau yang semula memiliki hubungan kepentingan dengan industri farmasi dan telah menjadi bagian dari sistem rezim kesehatan modern sebagai peran protagonis, ditempatkan sebagai komoditas yang sama sekali berbahaya. Di sisi yang lain, di tengah-tengah ingar-bingar kampanye anti-tembakau yang digerakkan industri besar farmasi asing, justru muncul indikasi, perusahaan-perusahaan transnasional rokok asing melakukan ekspansi pasar tembakau secara mengejutkan.

Meminjam kerangka analisis sistem dunia Immanuel Wallerstein, isu perang global terhadap tembakau semestinya hanya sekadar menjadi gejala partikular atau epifenomena dari entitas permasalahan yang sesungguhnya, yaitu adanya gerak ekspansi kekuasaan sistem kapitalisme global, dari negara dunia pertama ke negara-negara pinggiran atau dunia ketiga. Fenomena yang telah memberi dampak terhadap terjadinya pengerdilan, pemiskinan, dan ketergantungan struktural. Dengan kalimat lain, diperlukan kerangka hitung yang bukan sekadar terjebak kepada proyeksi untung-rugi, melainkan—lebih penting daripada itu—adalah menempatkan ukuran keadilan dan kemandirian yang seluas-luasnya.

Hal yang tidak kalah penting untuk dicermati adalah sejarah konsolidasi industri kesehatan sebagai bagian dari sistem industri masyarakat kapitalisme dunia —khususnya bidang kesehatan— yang muncul, tumbuh, dan berkembang membesar di Amerika, sesuai Perang Dunia II. Dari titik ini, akan bisa ditelusuri pula sejarah kemunculan lembaga seperti WHO, yang sebagaimana sejarah kemunculan lembaga supra-nasional *unholy trinity* (IMF, Bank Dunia, dan WTO) tidak bisa dilepaskan dari proyek konsolidasi dan ekspansi kepentingan negara-negara dunia pertama. Dalam istilah Ivan Illich, sejarah terbentuknya WHO itu disebut sebagai “medikalisasi kehidupan.” Gejalanya tampak dengan kemunculan “imperialisme diagnostik” industri kesehatan terhadap masyarakat modern. Illich menyebutkan, gejala itu tidak bisa dilepaskan dari kelebihan produksi secara umum dari masyarakat industri kapitalistis, meski pun ada kekhususan karakteristik yang membedakan sektor industri kesehatan dengan sektor lainnya.

Illich harus diakui telah membongkar banyak kepalsuan yang menyelubungi industri kesehatan modern, yang dinilai telah memunculkan gejala endemi *iatrogenesis* baik klinis, sosial, maupun kultural. Melalui kerangka analisis dan deskripsi sejarah yang dia kembangkan, dia bermaksud memperlihatkan akibat fatal dari adanya monopoli radikal atas profesionalisme disiplin ilmu

kedokteran yang sangat berlebihan sebagai karakteristik dari industri kesehatan modern. Sebuah perilaku yang jelas berdampak kepada munculnya gejala “alienasi” baru bahwa ketergantungan manusia kepada alam beserta seluruh proses alamiahnya hendak digantikan oleh kuasa modus pandangan dunia yang mendudukkan manusia modern menjadi bergantung pada industri kesehatan.

Dengan kalimat lain, Illich sebetulnya bermaksud memperlihatkan dampak fatal dari ilusi kemajuan ilmu kedokteran. Atas nama spesialisasi kerja dan profesionalisme, ilmu kesehatan modern konon berbeda dengan pengobatan tradisional dengan alasan keabsahannya berbasis pada metodologi ilmiah ilmu pengetahuan. Namun dalam perkembangan dan sejarahnya, industri kesehatan ternyata juga telah bertransformasi menjadi sebuah “rezim kesehatan” yang menguasai kehidupan masyarakat dunia. Metode ini sangat terkait dengan kuasa filosofis dan metode positivistik dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern secara umum. Tubuh manusia lalu ditempatkan layaknya sebuah mesin (*allopathic medicine*), sebuah cara berpikir keliru yang telah dikritik oleh Herbert Marcuse sebagai gejala munculnya “*one dimensional man*” dalam kehidupan masyarakat modern kapitalistis.

Sayangnya, para penggiat anti-tembakau termasuk di Indonesia (seolah) tidak mau tahu dengan soal ini. Kelompok ini cenderung mendudukkan persoalan tembakau dalam kaca mata partikularistis, semata-mata sebagai problem atau isu kesehatan yang bersifat absolut, dan menutup ruang perdebatan dan eksplorasi isu tembakau. Mereka juga menolak untuk menganalisis problem atas isu tembakau sebagai bagian dari gejala perang dagang global, yang sebetulnya telah berdampak pada pemiskinan dan ketergantungan negara-negara berkembang seperti Indonesia kepada negara-negara kaya modal.

Bertolak dari sejumlah hal itulah, buku ini berpamrih menyingkap “selubung” gerakan filantropis yang bersembunyi di balik kampanye anti-tembakau, dan hubungannya dengan kepentingan para pemodal

raksasa dunia. Hal ini penting, karena beberapa hal. Pertama, potensi nikotin Indonesia adalah surga yang menggiurkan bagi kepentingan industri kapitalisme global. Kedua, industri kretek nasional adalah salah satu industri vital bagi perekonomian nasional dan ikut menyumbang pendapatan terbesar untuk APBN.

Tim Penulis

BAB I

“Globalisasi” Lintasan Sejarah, Teori dan Praktek

Tembakau dan Politik Zig-Zag

*S*u dan gerakan kampanye anti-tembakau di Indonesia selalu retorik-filantropis mengatasnamakan dalil kesehatan masyarakat. Namun yang tidak diketahui banyak orang, di balik semua itu ada model neo-imperialisme yang bekerja memuluskan jalan bagi masuknya proses dominasi dan hegemoni kepentingan korporasi-korporasi multinasional. Itu persis seperti isu krisis pangan, krisis energi, perubahan iklim, pemanasan global, lingkungan hidup dan sebagainya. Semua hanya *epifenomena*, kemasan yang dibungkus dengan wacana filantropis yang menyembunyikan bentuk realitas kepentingan yang sesungguhnya. Sebuah fenomena “dua muka” (*double standard*) yang mengindikasikan siasat “politik-zig-zag” kapitalisme global melakukan perluasan pasar ke seluruh dunia termasuk Indonesia.

Di baliknya, tentu saja juga ada relasi kuasa-pengetahuan, dan pengetahuan-kepentingan. Bagaimanapun, kukuhnya kapitalisme

melakukan ekspansi, sejauh ini sulit dipisahkan dari klaim-klaim universalitas pengetahuan ilmiah (*knowledge*) atau praktik wacana sosial yang dibangun sebagai pintu masuk untuk legitimasi dan melanggengkan keberadaannya. Semacam upaya membangun hegemoni kesadaran masyarakat dunia, kendati yang terbaca kemudian adalah munculnya gejala “anomali” atau “paradoks” atau “keganjilan” atau “kontradiksi terselubung.”

Ada beberapa fakta yang bisa diungkapkan. Pertama, meskipun kampanye anti-tembakau yang dibungkus filantropis kesehatan telah berlangsung cukup lama belakangan marak sebagai isu global sejak adanya munculnya Kerangka Konvensi Pengendalian Tembakau (FCTC) pada 2003—tapi fenomena yang muncul adalah konsumsi tembakau masyarakat dunia malah cenderung naik dari tahun ke tahun. Ada pun tembakau tetap menjadi salah satu komoditas primadona dalam perdagangan internasional: pada 2007 nilai seluruh perdagangan tembakau dunia mencapai US\$ 378 miliar atau naik 4,6 persen dibandingkan dengan nilai perdagangan pada tahun sebelumnya.

Untuk 2012, nilai perdagangan tembakau dunia bahkan diproyeksikan meningkat 23 persen menjadi US\$ 464,4 miliar. Siapa konsumen tertinggi dari tembakau itu? Data dari Organisasi Pertanian dan Pangan Dunia atau FAO (2003) mengungkapkan negara-negara maju adalah konsumen teratas. Sekadar menyebut lima besar, negara-negara itu adalah China, Uni Eropa, India, negara-negara eks Uni Soviet, dan Amerika Serikat. Ada pun Indonesia berada di urutan kedelapan. Posisinya setingkat lebih rendah di bawah Brazil dan Jepang.

Kedua, di tengah-tengah gencar dan masifnya kampanye anti-tembakau global “memaksa” setiap negara untuk meratifikasi FCTC, yang justru muncul adalah meningkatnya pengambilalihan (aneksasi) perusahaan-perusahaan rokok nasional di negara-negara dunia ketiga

oleh perusahaan-perusahaan rokok multinasional. Di Indonesia, gejala ini antara lain muncul pada 2005, ketika Philip Morris mengakuisisi PT HM Sampoerna Tbk. bersamaan dengan akuisisi terhadap Compañia Colombiana de Tabaco SA (Coltabaco) di Kolombia. Kedua perusahaan ini adalah produsen rokok terbesar di negara masing-masing. Pada tahun yang sama Philip Morris mengumumkan perjanjian dengan China National Tobacco Corporation (CNTC) untuk lisensi produksi Marlboro China. Dua tahun kemudian Philip Morris membeli 50,2 persen saham tambahan pada Lakson Tobacco Company di Pakistan. Akibat pembelian itu, 98 persen saham Lakson dikuasai Philip Morris (Kriminalisasi Berujung Monopoli, 2011).

Ketiga, sebagai negara yang menjadi markas sekretariat Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan berperan besar dalam proses perumusan FCTC, Amerika hingga kini belum meratifikasi FCTC. Sementara gerakan kampanye anti-tembakau di sini, selalu mempersoalkan dan membesar-besarkan sikap Indonesia yang belum meratifikasi FCTC.

Keempat, Amerika adalah produsen tembakau terbesar keempat di dunia setelah China, Brazil dan India; yang justru memberikan subsidi besar kepada para petani tembakaunya. Dalam periode selama kurang-lebih empat tahun (2005-2009), total subsidi itu mencapai US\$ 944 juta. Selain itu Amerika juga memiliki program asuransi tanaman yang dikelola oleh badan manajemen resiko di bawah Departemen Pertanian (USDA). Program ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap produk atau sektor pertanian dalam negeri. Sebagai antisipasi bila terjadi kasus gagal panen yang diakibatkan faktor iklim, atau jika harga sebuah komoditas termasuk tembakau di pasar internasional jatuh.

Di luar itu, masih ada *tobacco price support program*. Program ini kali pertama dibuat pada 1930 bersama dengan program bantuan komoditas lainnya. Mirip dengan kebijakan yang pernah dilakukan pemerintah Orde Baru ketika menentukan harga gabah kering untuk menjaga harga beras agar tetap menguntungkan bagi para petani.

Kelima, Amerika menetapkan perlindungan terhadap untuk industri tembakau dalam negeri, baik melalui skema penetapan tarif impor yang tinggi maupun lewat skema non-tarif. Karena perlindungan semacam ini—antara lain seperti yang tecermin dalam Family Smoking Prevention and Tobacco Control Act—produk kretek Indonesia kemudian dilarang masuk ke pasar Amerika (Kriminalisasi Berujung Monopoli, 2011).

Dari kelima fakta tersebut, muncul kemudian pertanyaan, bagaimana anomali semacam itu bisa dipahami? Kenyataan apa yang sesungguhnya berada di balik maraknya kampanye anti-tembakau nasional?

Untuk memahami semua itu, tidak cukup digunakan pendekatan atau metode partikularistik. Tenggelam dengan suatu kebenaran satu disiplin dan satu model pendekatan adalah suatu tindakan yang teramat gegabah. Sama gegabahnya dengan mengatakan sebab-sebab globalisasi ekonomi hanya digerakkan oleh kepastian inovasi teknologi, dan mengabaikan fakta tentang sejarah panjang kolonialisme. Karena itu dibutuhkan sebuah upaya pembacaan yang menyeluruh, utuh dan tidak terpotong-potong. Sebuah analisis yang tidak sekadar merangkum kelebihan paradigma nomotetis dan idiografis sebagai suatu upaya sintetis, melainkan harus pula memadukan berbagai jenis pendekatan maupun disiplin ilmu. Lewat pembacaan seperti itu, diharapkan akan bisa dibangun teori terbaik dalam rangka memperoleh gambaran yang utuh di balik isu dan gerakan kampanye global anti-tembakau.

Sebuah Perdebatan Tiada Akhir

Berpijak dari titik ini, kampanye global anti-tembakau harus diletakkan dalam konteks lanskap yang lebih luas, yakni sebagai bagian dari praktik wacana globalisasi atau proyek isu globalisasi

itu sendiri. Globalisasi sebagai sebuah ide sebetulnya tidak terlalu jelas, dan tidak terpisah dari gagasan-gagasan lain yang pernah muncul sebelumnya, seperti kapitalisme, modernisasi neo-liberal dan humanisme. Akan tetapi, suka-tidak suka, langsung dan tidak langsung, ide yang tidak terlalu jelas itu kini telah memaksa manusia di seluruh dunia untuk saling berhubungan, untuk tidak mengatakan saling tergantung satu dengan yang lainnya bahkan dengan cara yang paling dramatis. Globalisasi dunia lalu menjadi keniscayaan, sesuatu yang tak terelakkan yang memendekkan jarak, mempercepat arus barang dan jasa, memperkecil ruang komunikasi dan sebagainya.

Manusia yang tinggal di balik gunung di Punta Arenas, kota yang paling dekat dengan kutub Selatan (Antartika) misalnya, kini dengan mudah berhubungan lewat telepon atau internet dengan manusia lain, yang tinggal di Kulon Progo, Yogyakarta. Lalu peristiwa kerusuhan yang terjadi di London, Inggris, dalam hitungan detik juga bisa diketahui oleh manusia lainnya yang tinggal pedalaman Kalimantan atau Papua. Tidak ada lagi jarak. Tidak ada lagi batas. Arus sejarah saat ini sedang bergerak menuju dunia tanpa batas (*borderless world*). Sosiolog menyebutnya sebagai abad informasi. Masyarakat jaringan, kata yang lain. Kaum futuristik mengenalinya sebagai desa dunia. Seorang penulis bahkan menyimpulkan globalisasi sebagai babak akhir sejarah manusia, kendati pernyataan ini terlalu lekas dan terkesan gegabah.

Globalisasi karena itu menjadi sesuatu yang disambut gegap gempita dengan seluruh optimisme oleh masyarakat dunia, terlebih setelah ambruknya eksperimen sosialisme-komunisme Uni Soviet dan era Perang Dingin (1989). Ia lalu memunculkan atmosfer traumatis masyarakat Barat terhadap negara. “Kemenangan sejarah” ideologi pasar bebas dan demokrasi liberal *ala* Barat beserta seluruh temuan konsep masyarakat sipil dan semakin mengecilnya peran

negara (*minimal state*) ini, lantas menjadi konsep dominan untuk merangkai berbagai temuan teoretis ilmu-ilmu sosial pada masa-masa berikutnya.

Dari titik ini, jelas sudah, istilah globalisasi sebetulnya menandai adanya upaya perluasan dan reproduksi formasi sosial sistem kapitalisme ke negara-negara Dunia Ketiga yang terlihat semakin dominan. Dulu kapitalisme hadir melalui perspektif teori pembangunan dan modernisasi. Kini selain perdagangan bebas, globalisasi yang dilahirkan oleh negara-negara maju, telah merambah pada isu-isu non-konvensional, seperti terorisme, pemanasan global, kejahatan transnasional, kemiskinan, krisis pangan, dan tanpa terkecuali isu kesehatan global. Dengan demikian, sekali lagi, bisa ditengarai konsep globalisasi tidak lebih sebagai upaya memproduksi ulang pengetahuan dalam rangka menata (sesuai yang diinginkan) atau mengembalikan pamor teori modernisasi dan pembangunan yang sempat muram. Dalam istilah I. Wibowo, mereka *emoh* negara.

Paham ini menemukan momentumnya menyusul ambruknya “pasar-terencana-terpusat” Uni Soviet, yang disusul dengan dibukanya zona khusus bagi ekonomi pasar kapitalisme di China setelah masa Mao Zedong. Lalu seperti paduan suara, mereka kembali memperdengarkan suara-suara wacana pemikiran spektrum liberalisme dari yang klasik, hingga paling kontemporer. Serpihan-serpihan mosaik pemikiran liberalisme inilah yang sekarang dikenal dengan nama ekonomi neoliberalisme. Itu adalah nama lain paham ekonomi neoklasik atau *moneterisme* yang dikembangkan dan disempurnakan lebih jauh oleh Mazhab Chicago. Pelopornya Milton Friedman. Ekonom penerima Nobel ini adalah sang penentang utama paham Keynesian yang dituding telah bersalah besar memberi basis legitimasi moral dan intelektual pada kewenangan besar negara (*statisme*) melakukan campur tangan terhadap mekanisme pasar. Menurut paham ini, campur tangan otoritas negara yang kelewat

besar terhadap mekanisme pasar, selain akan memunculkan gejala birokrasi model “negara gemuk” yang boros, juga menjadi sumber korupsi dan segala bentuk inefisiensi ekonomi.

Itu sesuai dengan semboyan “*there is no alternative*” yang disuarakan dan menjadi dasar kebijakan pemerintahan Inggris, di bawah perdana menteri, Margaret Thatcher, dan didukung sepenuhnya oleh Ronald Reagan, presiden Amerika Serikat waktu itu. “Negara harap mundur, dan biarkanlah —meminjam istilah Reagan— ‘sihir pasar’ kami bekerja menciptakan keajaiban-keajaiban ekonomi dunia.” Begitulah kira-kira semangat pada saat itu, ditingkahi lagu *Wind of Change*, dari Scorpion yang begitu populer menggambarkan semangat zaman pada waktu itu. Sejak itu, tampaknya tidak ada ide atau gagasan yang berhasil meraup popularitas yang begitu besar seperti halnya globalisasi. Istilah ini tidak hanya hadir sebagai kata kunci dalam wacana teoretis dan politik yang dominan, melainkan juga merasuki percakapan khalayak, menjadi “narasi agung” dan “mitos baru” bagi umat manusia.

Apa yang bisa dicatat di sini adalah, kapitalisme terus-menerus memproduksi dan mereproduksi pengetahuan yang selalu diperbarui. Sejak abad ke-20, ilmu sosial di Dunia Ketiga banyak didominasi oleh wacana teori modernisasi atau pembangunan yang dianggap memiliki keunggulan universal. Semenjak itu pula konsentrasi kajian ilmuwan sosial untuk memproduksi pengetahuan dan teknologi baru, tampak disebarluaskan melalui ruang pengajaran, buku ajar, jurnal ilmiah, ataupun berbagai ruang publikasi internasional prestisius yang memuat hasil-hasil riset mereka. Alasannya, obyektivitas dan universalitas teori-teori yang dihasilkan ilmuwan Barat dapat membantu membebaskan keterbelakangan sebuah masyarakat atau negara menuju peradaban manusia yang humanis. Tujuannya untuk memberi legitimasi proses integrasi negara-negara Dunia Ketiga ke dalam jaringan sistem kapitalisme.

Sampai di sini dapat dikatakan konsep globalisasi sebetulnya adalah produk termutakhir dalam sejarah wacana ilmu sosial yang dihasilkan oleh kapitalisme. Tentu saja, fenomena globalisasi itu dapat dianalisis secara kultural, ekonomi, politik, dan atau institusional. Teori-teori ini selain bermaksud menggambarkan adanya kompleksitas persoalan masyarakat kontemporer juga berpamrih mendedah secara kritis bagaimana gambaran realitas sesungguhnya.

Namun, banyak kalangan akademisi sosial justru merasa semakin kesulitan mendefinisikan hal yang sebenarnya tengah terjadi dalam globalisasi. Ini terutama ketika berbagai unsur dalam sistem kehidupan masyarakat yang mendunia itu baik ekonomi, politik, maupun kebudayaan tampak menyatu dalam suatu kecepatan dan menggerakkan perubahan yang tidak pernah terbayangkan pada fase-fase sejarah sebelumnya. Bagaimanapun realitas masyarakat global tidak lagi bisa kita andaikan bergerak dalam rumus satu arah (*one way traffic*) yang linier. Antara yang global (*center*) dan yang lokal (*periphery*) tidak hanya saling berdialektika, melainkan saling meresapi satu dengan yang lain. Membentuk lanskap dunia, yang disertai proses penyebaran nilai-nilai yang memunculkan gejala penyatuan.

Persoalannya menjadi semakin kompleks karena ledakan arus informasi (pengetahuan), keuangan (investasi), perdagangan (barang), dan jasa beserta proses migrasi masyarakat antarnegara atau kawasan yang terjadi secara masif, telah memunculkan ragam kontradiksi struktural. Membentuk konflik-konflik antarras, etnis atau agama melebihi gejala konflik kelas. Karena itulah, kompleksitas fenomena sosial, politik, dan kultural dari masyarakat kontemporer dengan sendirinya menjadi tidak mudah dianalisis dengan satu model pendekatan atau teori.

Ambil satu contoh wacana tentang lahirnya teori kritis atau Neo-Marxisme. Tradisi ini bermula sebagai koreksi terhadap praktik

Marxisme-Leninisme di Uni Soviet dan sekaligus sebagai upaya memberi pembacaan mutakhir atas fenomena masyarakat kapitalisme lanjut. Namun, langsung atau tidak langsung, teori itu memiliki hubungan sebab-akibat dan konseptual dengan konteks globalisasi dan atau terhadap isu globalisasi.

Banyak istilah atau kata kunci baru sengaja diintroduksi para akademisi sosial untuk memotret dan sekaligus memberi aksentuasi terhadap munculnya fenomena sosial, politik, dan kultural zaman ini yang dianggap memiliki ciri karakteristik yang berbeda dengan situasi periode kapitalisme awal (*early capitalism*). Itu semua adalah deretan panjang sejarah kemunculan berbagai wacana teori sosial secara bergantian mulai dari mazhab modernisasi, pasca-modernisasi, hingga pasca-kolonial yang sedikit atau banyak melukiskan gejala metamorfosis kapitalisme dalam berbagai bentuknya.

Tentu, muncul pro-kontra, meskipun akan lebih banyak muncul suatu ketidaksepakatan ketimbang kesepakatan di antara beragam teori dalam kontestasi ilmu-ilmu sosial kontemporer. Baik itu berkisar pada perbedaan penggunaan paradigma teori, pilihan pendekatan, metode yang digunakan, maupun beragam konklusi teoretisnya. Anthony Giddens (1984) menyebutkan, retakan-retakan yang terjadi pada akhir 1960-an dan awal 1970-an telah menghancurkan konsensus yang pernah ada sebelumnya tentang pendekatan pada teori ilmu sosial. Kelompok teori kritis menyebut konsensus relatif ini sebagai dominasi “positivistisme” dalam ilmu sosial, yakni suatu adopsi metodologis tradisi ilmu alam ke dalam ilmu sosial. Akibatnya, ranah teori sosial pun mengalami semacam “ledakan epistemologis” dan menjadi medan pertarungan intelektual dan politis yang semakin sengit. Kata Ernest Gellner, “Tidak ada yang pasti.”

Dengan latar belakang sejarah wacana, ilmu sosial tersebut maka wajar jika globalisasi menjadi kata kunci signifikan dalam tradisi ilmu sosial kontemporer, kendati kini justru tampak semakin

menunjukkan tidak adanya konvergensi atau konsensus. Alih-alih berharap munculnya suatu konklusi atau solusi teoretis yang general dan integral, yang muncul sebaliknya adalah terjadinya ledakan pluralitas wacana yang mengarah pada sekali lagi meminjam istilah Gellner “ultra-relativisme.”

Tradisi ilmu-ilmu sosial faktanya telah mengalami semacam ledakan wacana, bahkan pada aras epistemologis terjadi upaya pembongkaran atas positivisme. Ini seperti yang dilakukan kelompok Neo-Marxisme atau paling ekstrem ditunjukkan kelompok pasca-strukturalisme atau pasca-modernisasi. Namun dalam kenyataannya “langkah maju” pada ilmu sosial di negara-negara Dunia Ketiga (non-Barat) tampak belum signifikan dan mampu memunculkan alternatif pembangunan di luar model kapitalisme.

Benar, barangkali saja ada suara-suara yang dulu tak terdengar (*subaltern*) kini mulai “angkat bicara” yang muncul dari ruang-ruang gelap. Bahkan, benar pula jika sebagian kelompok intelektual yang karena semangatnya melakukan advokasi pada kelompok-kelompok marginal atau *subaltern*, lantas dengan berlebihan beranggapan ilmu pengetahuan (*science*) dan mitos pada hakikatnya adalah hal sama. Perbedaan keduanya hanya terletak problem “perspektivisme” atau, kebenaran adalah problem “*language games*” belaka. Konsep *indigenous people* pun segera mendapat ruang-ruang advokasi. Begitu pula dengan gagasan tentang budaya lokal, mendapat ruang representasi wacana dalam konsepsi “politik-identitas” atau teori pasca-kolonial sebagai upaya membangun perlawanan hegemoni sistem kapitalisme global ini. Namun semua usaha itu baru membentuk embrio. Masih merupakan arus kecil, yang dalam beberapa hal bahkan bisa dikatakan sebagai eksentrik genit kaum intelektual. Dengan kalimat lain, ada kesan kuat bahwa tradisi ilmu-ilmu sosial dan para akademisi di negara-negara Dunia Ketiga pada saat melakukan kerja-kerja riset, masih terjebak pada nalar rendah

diri (*inlander*). Meminjam istilah Syed Farid Alatas (2006), itulah yang disebut sebagai “benak terbelenggu” (*the captive mind*). Akibatnya masih timbul keresahan di kalangan intelektual ketika karya atau hasil penelitiannya dianggap tidak ilmiah hanya karena secara teoretis tidak menggunakan metode atau pendekatan positivistik.

Itu semua dapat dimaklumi. Pasalnya penyebaran rasionalisme yang membonceng kemajuan ilmu-ilmu pengetahuan dan teknologi, atau timbal balik antara keduanya dalam kredo metode positivistik—sebetulnya telah meresapi sumsum kesadaran masyarakat modern secara umum. Itu bersamaan dengan proses reproduksi formasi sosial sistem kapitalisme masyarakat industri ke negara-negara Dunia Ketiga. Dengan demikian, ilmu-ilmu sosial pun masuk dalam proses hegemonisasi melalui struktur kapitalisme. Celaknya, gejala “benak terbelenggu” semakin bertambah parah ketika modernisasi ternyata turut membawa proses spesialisasi akademis yang makin beragam. Terfragmentasi ke dalam pemilahan ilmu sosial dengan pagar-pagar disiplin yang semakin kaku.

Menurut Immanuel Wallerstein, gejala tersebut muncul sejak abad ke-19, yakni tumbuhnya pembagian kerja intelektual dalam ilmu-ilmu sosial yang melahirkan pembagian disiplin ilmu yang mendasarkan diri pada ideologi liberalisme yang mendominasi abad itu. Menurut paham liberalisme, negara (politik) dan pasar (ekonomi); ruang privat dan ruang publik merupakan dua entitas wilayah yang terpisah secara analitis. Dengan kata lain dalam pandangan Wallerstein, pembatasan disiplin ilmu tersebut adalah palsu. Baginya, “Tiga arena pokok tindakan manusia, ekonomi, politik, dan sosial budaya bukan merupakan wilayah yang otonom satu sama lain, karena ketiga wilayah tersebut tidak memiliki logika yang terpisah.” Wallerstein karena itu memaparkan, disiplin ilmu sosial seharusnya menjadi “satu kesatuan disiplin”.

Memang muncul beragam analisis kritis untuk membongkar epistemologi positivisme dan berbagai upaya mengembalikan ilmu-ilmu sosial pada “satu kesatuan disiplin” atau “multi-disipliner” sebagai suatu upaya membangun sebuah sintesis metodis. Namun tampaknya metodologi positivisme masih tampak kuat mendominasi perspektif ilmu-ilmu sosial di negara-negara berkembang atau Dunia Ketiga. Implikasinya, apa pun obyek analisis ilmu sosial dalam masyarakat Dunia Ketiga (non-Barat) akan selalu berada dalam dilema yang berhadapan dengan tarik-ulur antara universalisme-partikularisme, dan nomotetik-ideografis yang terus-menerus. Akibatnya, pada tataran teoretis dan metodologis, ilmu sosial justru mengalami keterbatasan ruang gerak, karena dominasi positivisme adalah produk teoretis dari sistem kapitalisme. Posisi dari kekuatan positivisme yang menekankan aspek kuantitatif, empiris, mengedepankan hukum sebab-akibat dalam perspektif logika linier maupun biner tampak masih mendominasi metodologi ilmu-ilmu sosial hingga kini. Ini pada gilirannya justru meminggirkan upaya munculnya metodologi anti-positivisme yang bersifat lebih kualitatif, normatif, dan interpretatif.

Dalam buku *One Dimensional Man* (1964), Herbert Marcuse mengkritik tajam positivisme dan ilmu pengetahuan yang dianggap telah meresapi dasar-dasar kesadaran masyarakat modern. Di mata Marcuse, ciri khas dari masyarakat industri adalah peran ilmu pengetahuan dan teknologi, persis seperti rasionalitas teknologi pada zaman ini. Segalanya lalu dipandang dan dihargai sejauh dapat dikuasai, digunakan, diperalat, dimanipulasi, dan ditangani. Instrumentalisme seolah menjadi kata kunci dalam pandangan masyarakat berteknologi.

Marcuse karena itu memperingatkan bahaya yang mengancam umat manusia akibat pesatnya kemajuan teknologi yang menguasai kehidupan modern. Karena bagaimana pun gagasan tentang manusia satu dimensi, dan masyarakat satu dimensi sebetulnya dimaksudkan

untuk menegaskan posisi rasio manusia yang menjadi adaptif, rasionalitas instrumental, dan buta. Dalam situasi penguasaan total oleh ilmu pengetahuan dan teknologi yang sudah berubah menjadi ideologi, manusia dan masyarakat modern menjadi kehilangan rasio kritisnya. Tentu kritik Marcuse ini tidak saja ditujukan kepada kapitalisme Barat, melainkan juga untuk masyarakat sosialisme-komunisme Uni Soviet yang pada saat itu masih belum ambruk. Singkatnya, substansi kritik dari salah satu eksponen penting Mazhab Frankfurt ini lebih ditujukan kepada karakteristik masyarakat industrial yang teknokratik.

Selain berasal dari kalangan Mazhab Frankfurt, kritik keras terhadap industri kapitalisme yang telah memunculkan dominasi positivisme juga muncul dari Michel Foucault. Dia menggunakan istilah “wacana” untuk menjelaskan cara berpikir dan bertindak masyarakat modern yang tidak hanya berbasis pada, tapi sekaligus didominasi oleh “ilmu pengetahuan.” Bagi Foucault, bentuk-bentuk pengetahuan tentu tidak pernah kebal dari kekuasaan, karena sejak awal sengaja dimaksudkan untuk mengatur, mengontrol, dan mendisiplinkan.

Yang menarik, dalam analisisnya tentang kesejarahan masyarakat industri kapitalisme, Foucault mendapati, bahwa kemunculan dan membesarnya industri kesehatan modern ternyata juga berperan determinan sebagai salah satu variabel penting dalam proses pembentukan pengetahuan dominan masyarakat modern. Di sini Foucault menguraikan pergeseran dari dominasi agama pada masa kehidupan pra-modern ke dominasi medis dalam kehidupan modern sebagai munculnya “kekuasaan medis” atau “kekuasaan klinik”.

Tidak jauh berbeda dengan Foucault, Ivan Illich dalam analisisnya menemukan suatu gejala terjadinya “imperialisme diagnostik” dalam masyarakat industri modern. Dalam pandangan Illich, hal ini bukan saja menyebabkan terjadinya ketergantungan masyarakat modern

terhadap rezim industri kesehatan sebagai dampak dominasi struktur industri kapitalistis, melainkan bermuara pada munculnya gejala epidemi “penyakit yang bersumber dari dokter” (*iatrogenesis*), yang bersifat klinis, sosial, maupun kultural. Sumber utamanya adalah “monopoli radikal” terhadap pengetahuan oleh para profesional (dokter) yang mendasarkan diri pada metode biomedis yang positivistik.

Illich menganggap gejala ini pun terjadi karena adanya kelebihan produksi di industri kesehatan seperti halnya sektor-sektor industri lain yang telah mendorong upaya perluasan dan pendalaman pasar industri kesehatan untuk memperoleh keuntungan dari penyebaran rasa ketakutan. Mengikuti jejak Foucault, Illich menyebut hal ini merupakan fenomena “medikalisasi kehidupan” sebagai konstruksi pengetahuan masyarakat modern. Fenomena ini tentu tidak hanya muncul pada masyarakat negara-negara berkembang atau Dunia Ketiga, melainkan bahkan—seperti analisis Marcuse perihal munculnya fenomena “*one dimensional man*”—justru semakin kentara dominan di dalam masyarakat negara-negara industri maju.

Yang bisa digarisbawahi di sini adalah, sebuah kenyataan yang tidak bisa dimungkiri tentang relasi kuasa-pengetahuan, dan relasi pengetahuan-kepentingan. Ilmu pengetahuan akan semakin dominan dan dianut kebenarannya oleh masyarakat akademik atau khalayak apabila ditopang kuat oleh struktur kekuasaan. Dalam tataran empiris, struktur kekuasaan ini dapat berupa kapital. Artinya, penguasaan struktur kapital bisa dipergunakan secara mudah untuk memengaruhi tumbuh kembang dan benar-salahnya suatu pengetahuan. Para elite politik (penguasa) dan elite ekonomi (pengusaha) dengan struktur kapital yang mereka miliki dapat dengan mudah memengaruhi dan mengendalikan proses-proses penelitian yang dilakukan oleh para ilmuwan sosial di universitas atau di luar universitas sehingga hasil penelitian tersebut sesuai dengan yang dibutuhkan mereka.

Itu sesuai dengan konsepsi Anthony Giddens (1990), bahwa modernisasi bisa berlangsung karena ditopang oleh kekuatan kapitalisme, yaitu negara-bangsa, organisasi militer, dan industrialisasi. Tidak berlebihan karena itu jika muncul skeptisme kuat di kalangan penganut relativisme, yang kemudian menyimpulkan dominasi pengetahuan atas khalayak bukanlah disebabkan oleh monopoli pengetahuan, melainkan justru karena monopoli kekuasaan. Pengetahuan ilmiah tidak berkuasa karena benar, tapi pengetahuan ilmiah benar karena berkuasa.

Dilihat dari perspektif pemikiran Neo-Marxisme baik yang menganut aliran model produksi maupun aliran sirkulasionistik hubungan ini merupakan ketidakseimbangan struktur relasi kuasa antara negara-negara maju di satu sisi dan negara-negara berkembang di sisi lain. Dampaknya adalah terjadinya dominasi di satu pihak dan subordinasi di pihak lain.

Sebetulnya, pada akhir 1960-an telah muncul suatu paradigma baru dari liberalis kiri dan Neo-Marxisme yang diilhami krisis ekonomi dan kegagalan pembangunan yang terjadi di kawasan Amerika Latin. Paradigma ini mengembangkan teori ketergantungan yang mengambil kembali pandangan teori imperialisme klasik dan memodifikasinya untuk menjelaskan sebab-sebab kegagalan pembangunan di negara-negara berkembang. Perspektif mereka bergerak dari sudut pandang yang bertolak belakang daripada asumsi teori modernisasi, yaitu bukan karena “faktor dalam” masyarakat (internal) melainkan justru “faktor luar” (eksternal) masyarakat yang merupakan penyebab kegagalan pembangunan. Faktor luar ini adalah sistem perekonomian global atau pembagian kerja internasional yang tidak seimbang sebagai variabel yang sangat menentukan dalam program pembangunan, dengan dampak terjadinya keterbelakangan negara-negara Dunia Ketiga. Akar keterbelakangan dalam perspektif teori ketergantungan adalah adanya ketergantungan ekonomi. Sementara ketergantungan

ekonomi ada ketika suatu masyarakat jatuh ke tangan kekuasaan sistem ekonomi masyarakat lain, dan ketika perekonomian masyarakat mulai diatur entah langsung atau tidak oleh orang-orang asing sedemikian rupa sehingga lebih menguntungkan perekonomian asing. Ketergantungan ekonomi berarti ada hubungan dominasi di satu pihak dan subordinasi ekonomi di pihak lain di antara dua atau lebih masyarakat.

Tentu banyak varian teori pemikiran dalam tradisi ini. Di sini teori “sistem dunia” yang dikembangkan Immanuel Wallerstein memberikan “alat” pembacaan yang tepat. Dasar asumsinya, selain dianggap sebagai teori termutakhir dalam rumpun teori ketergantungan dalam kritiknya terhadap proyek modernisasi yang gagal, secara metodologi teori itu juga memberikan kerangka pandang menyeluruh untuk memahami perkembangan kesejarahan terbentuknya masyarakat dunia. Dalam membangun kerja teoretisnya, Wallerstein mengembangkan suatu perspektif baru yang disebutnya “perspektif sistem dunia” (*the world-system perspective*) atau dapat juga disebut ajaran sistem ekonomi-kapitalis dunia (*the world capitalist-economy school*).

Wallerstein melihat, globalisasi merupakan “sistem yang menyejarah” (*historical system*). Dia karena tidak hanya memadukan pendekatan sosiologi dan sejarah secara komparatif dan komprehensif melainkan juga mendamaikan perselisihan mazhab nomotetis dan idiografis ke dalam suatu upaya sintesis. Itulah yang membuat teori tersebut mampu mengembangkan perspektif global yang kritis. Menurut Wallerstein, pandangan yang mendudukkan masyarakat atau negara Dunia Ketiga sebagai satu unit analisis tersendiri dan terpisah dari masyarakat maju, tentu merupakan suatu model analisis yang a-historis. Titik pandang teori ini melihat dunia sebagai suatu sistem tunggal. Dengan bertitik tolak dari pandangan ini, teori sistem dunia bermaksud mengungkapkan bagaimana negara-negara berkembang telah ditempatkan ke dalam sistem dunia. Di sini, teori Wallerstein memberikan perspektif analisis yang komprehensif

untuk mencermati terjadinya pola (*pattern*) pertukaran tak seimbang (*unequal exchange*) antarnegara-negara sedunia yang bersifat eksploitatif.

Meski demikian, teori sistem dunia tentu bukanlah sebagai teori globalisasi. Pasalnya teori ini sebagai peranti analisis sosiologis muncul 15 tahun sebelum penggunaan istilah globalisasi menjadi begitu populer dan meledak dalam berbagai publikasi ataupun sebagai subyek riset akademis. Dan Wallerstein melihat globalisasi bukanlah sebagai fenomena baru, melainkan lebih merupakan suatu perluasan sistem kapitalisme dunia yang sudah berlangsung sejak 500 tahun lalu. Menurut dia, ada tiga sistem yang menyejarah yang bisa diketahui, yaitu sistem mini (*mini system*), sistem kekaisaran dunia (*the world empires*), dan terakhir sistem ekonomi dunia (*the world economies*). Memasuki akhir abad ke-19-an, menurut Wallerstein, untuk kali pertama masyarakat dunia memiliki satu sistem yang menyejarah yang menyatu, yakni apa yang disebutnya sistem “ekonomi-dunia” dengan berbagai jaringan struktur politiknya yang heterogen di berbagai negara. Dengan kata lain, sistem perekonomian dunia adalah satu-satunya sistem dunia yang ada. Sistem dunia inilah yang sekarang menggerakkan negara-negara di dunia.

Kelemahan perspektif makro-sosiologi Wallerstein adalah justru pada keluasan perspektif yang ditawarkannya, sehingga akhirnya justru luput untuk melihat kerangka populisme atau nasionalisme sebagai *problem solving* model pembangunan nasional di negara-negara Dunia Ketiga. Selain itu, banyak kritik yang dialamatkan pada model analisis sirkulationistik yang meninggalkan model artikulasi produksi Marxian, membuat Wallerstein tak terlalu *concern* dengan analisis kelas dalam perspektif nasional. Namun, terlepas dari semua itu, signifikansi teori sistem dunia memberikan suatu perspektif cerdas perihal kemungkinan negara-negara pinggiran atau semi-pinggiran melompat “naik kelas.” Baik itu dengan menggunakan peluang yang muncul saat sistem kapitalisme tengah mengalami

gelombang pasang pertumbuhan ekonomi, maupun justru ketika tengah terjadi gejala krisis sistemis karena stagnasi ekonomi. Analisis sistem dunia, menurut Wallerstein, lahir sebagai “protes moral,” dan dalam pengertian yang lebih luas, bahkan sebagai “protes politik.”

Untuk memahami gejala hubungan yang tidak setara ini, harus kembali melacak sejarah integrasi kapitalisme di Dunia Ketiga. Antara lain dapat diketahui melalui analisis “sejarah pembangunan.” Ini menjadi kata kunci penting untuk mengetahui bahwa ada sebagian negara yang menolak sistem kapitalisme atau globalisasi, dan sebagian lagi menerima sistem tersebut. Di antara sikap menerima ataupun menolak itulah, tentu terdapat penyesuaian-penyesuaian. Dasar pertimbangannya adalah konteks sosial, budaya, ekonomi, serta politik. Bahkan, Jepang dan belakangan juga Korea Selatan, China, ataupun India kelompok negara Asia yang sering menjadi contoh keberhasilan pembangunan ekonomi dan *transfer of knowledge* kapitalisme di negara Asia adalah negara yang bisa merumuskan kembali kapitalisme dengan basis sistem “nilai tradisional” masing-masing. Negara-negara itu memasukkan variabel *local knowledge* ke dalam rumusan pembangunannya.

Bagaimana dengan Indonesia? Apakah negara ini masih akan terbenam dalam jeratan “benak terbelenggu” dan kemudian terus bermental *inlander* untuk merumuskan kebijakan kepentingan nasionalnya? Ataukah sudah sanggup mengambil langkah-langkah strategis dengan mengangkat kekayaan *local knowledge*, yang berasal dari nilai-nilai budaya maupun berbagai produk keunggulan komparatif yang dimiliki sebagai bangsa, sebagai konteks, dan sebagai dasar rumusan jalan pembangunan negara ini memasuki pertarungan global?

Huru-hara yang Rusuh

Sejak Konsensus Washington (1989) telah muncul kesadaran kritis terhadap globalisasi. Kesadaran ini kemudian menjelma protes-protes mengiringi berbagai pertemuan tingkat tinggi Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), Dana Moneter Internasional (IMF), dan Bank Dunia. Kalangan yang skeptis mengatakan globalisasi jelas hanya bersifat parsial karena realitasnya hanya bisa berkembang di wilayah yang menjadi pusat-pusat perekonomian dunia, yaitu di Amerika, Jepang, dan Uni Eropa.

Terjadi kemudian, antara lain apa yang disebut sebagai The Battle of Seattle. Kejadian pada Desember 1999 itu melibatkan ratusan ribu massa yang berasal dari berbagai golongan dan kelompok dari berbagai negara. Mereka tumpah ke jalan-jalan di Seattle menentang Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) sehingga konferensi organisasi itu tak jadi dilaksanakan. Kejadian lain yang menentang globalisasi terjadi di Cancun, Meksiko, September 2003. Ribuan petani berkumpul di sana memprotes WTO. Lalu atas nama seluruh petani di dunia, Lee Kyung Hae, peternak sapi dari Korea Selatan menusukkan pedang ke jantungnya. Dia bunuh di depan ribuan massa untuk memprotes WTO.

Munculnya World Social Forum (WSF) di Brasil pada 2001 juga dapat dicatat sebagai indikasi besarnya kegelisahan masyarakat dunia terhadap ancaman globalisasi dalam versi neo-liberalisme. Sementara itu, di beberapa negara Amerika Latin, seperti yang terjadi di Venezuela Bolivia, dan di Brasil— juga terjadi pergeseran orientasi politik dari kiri ke tengah yang seolah-olah mulai memilih “sosialisme” yang selalu disuarakan oleh Fidel Castro di Kuba. Castro sejauh itu, dikenal sebagai salah satu tokoh yang paling keras menyuarakan kecemasan, ketakutan, dan penolakan masyarakat Amerika Latin terhadap fenomena ekspansi globalisasi neo-liberal.

Penolakan terhadap tiga organisasi itu, semakin menguat menyusul “teror WTC” 11 September 2001. Karena derasnya isu berikut luasnya cakupan tema protes yang menghadang tiga organisasi dunia itu, banyak kalangan akademisi ilmu sosial dunia yang sampai pada kesimpulan: masyarakat dunia sebetulnya tengah menghadapi suatu persoalan yang sangat besar. Kesimpulan semacam itu antara lain datang dari Anthony Giddens (1999).

Sosok intelektual Kiri-Tengah moderat ini jauh-jauh hari sudah mengingatkan tentang “risiko tinggi” gejala modernisasi kontemporer lewat metafora “Juggernaut” alias panser raksasa. Giddens menyatakan, dalam taraf tertentu, Juggernaut memang berhasil menciptakan kecepatan dan percepatan gerak dunia yang masih dapat dikendalikan, tapi ia juga terancam lepas kendali yang bakal membuat dirinya hancur. Benar, modernisasi dalam bentuk Juggernaut sangat dinamis, tapi sekaligus merupakan “dunia yang tak terkendali” (*runaway world*) sepenuhnya.

Skeptisme, pesimisme dan bahkan penolakan atas fenomena globalisasi, belakangan terasa semakin kuat menyusul bertambahnya jumlah penduduk miskin dunia. Sejak konsep perdagangan bebas dan liberalisasi pasar modal ditempatkan sebagai komponen terpenting proyek globalisasi, menurut Seabrook sekitar 1,2 miliar penduduk dunia justru hidup dengan penghasilan kurang dari US\$ 1 per hari, dan sekitar separuh penduduk dunia hidup dengan US\$ 2 per hari. Kenyataan itu, berbanding terbalik dengan penghasilan sekelompok orang yang dijuluki sebagai manusia-manusia terkaya di dunia. Mereka yang jumlahnya hanya sekitar 1 persen dari penduduk dunia, tapi berpendapatan setara dengan penghasilan total 57 persen penduduk dunia (Wibowo, 2007). Sementara itu, solusi “satu untuk semua” — kebijakan “program penyesuaian struktural” bagi semua negara berkembang seperti deregulasi atau liberalisasi perdagangan, jasa, keuangan, investasi, privatisasi BUMN, dan pencabutan subsidi—

gagal memperbaiki keadaan dan sebaliknya malah memperburuk krisis di banyak negara berkembang.

Yang lebih memprihatinkan, kemiskinan dan ketimpangan di banyak negara justru muncul karena langkah-langkah salah yang dirancang oleh IMF, WTO, dan Bank Dunia; dan menciptakan keuntungan besar bagi negara industri maju melalui korporasi multinasionalnya. Dari data yang dikemukakan Joseph E. Stiglitz (2007) diketahui, bahwa perusahaan mobil multinasional Amerika, General Motors, misalnya, mendapat penerimaan sebesar US\$ 191,4 miliar pada 2004, atau lebih banyak dibanding produk domestik bruto 148 lebih negara. Keuntungan besar juga dikantongi oleh raksasa ritel Wal-Mart yang membukukan penerimaan US\$ 285,2 miliar pada 2005. Jumlah itu jauh di atas produk domestik bruto negara-negara di sub-Sahara.

John Pilger menyebut kenyataan itu sebagai “*new rulers of the world.*” Dalam buku *Globalization and Its Discontent*, Joseph E. Stiglitz (eks kepala ekonomi Bank Dunia dan peraih Nobel Ekonomi 2001), menuding IMF dan Bank Dunia bahu-membahu mengusung neo-liberalisme, dan neo-kolonialisme. Kenyataannya, bersatunya kepentingan IMF, Bank Dunia, dan WTO sebagai alat konsolidasi modal internasional, sudah berlangsung sejak Perang Dunia II berakhir. Antara lain ditandai dengan kemunculan Amerika sebagai kekuatan dominan, yang menggeser posisi dan peran negara Eropa seperti Inggris, Belanda, serta Prancis. Muncul kemudian apa yang disebut sebagai proyek Marshall Plan, yang hakikatnya hanya upaya dari rezim kapitalisme untuk menggalang ekonomi dunia yang porak-poranda karena perang. Dari sana, lahir IMF dan Bank Dunia (1944), dan belakangan disusul GATT (1948) yang bermetamorfosis menjadi WTO (1995).

Satu hal yang perlu dicatat, sejak berakhirnya Perang Dunia II, setidaknya muncul pula tiga entitas besar aktor global atau

internasional. Pertama, Organisasi Pemerintahan Internasional (IGO). Anggota forum ini terdiri dari negara-negara, LSM, dan organisasi nonpartai. Kedua, Organisasi Non-Pemerintahan Internasional (INGO). Dalam catatan James Petras dan Henry Veltmeyer, pada 2001 setidaknya ada sekitar 50 ribu lembaga semacam ini di Dunia Ketiga, dan menerima total dana lebih dari US\$ 10 miliar dari lembaga-lembaga keuangan internasional, agen-agen pemerintah Amerika, Eropa, Jepang dan pemerintah lokal. Tujuannya untuk melapangkan jalan masuknya globalisasi. Ketiga (dan yang memiliki peran paling dominan) adalah korporasi-korporasi multinasional.

Telah diketahui umum bahwa sistem kapitalisme bekerja dengan mendasarkan diri pada kekuatan memengaruhi kebijakan internasional yang dirumuskan oleh IGO-INGO. Lobi-lobi politik dilakukan korporasi-korporasi multinasional. Salah satunya dengan upaya konseptualisasi teoretis yang dilakukan para “intelektual organik” untuk merumuskan kepentingan bisnis, menjadi seolah-olah sebagai kepentingan bersama. Dalam perjalanannya, hal itu diletakkan menjadi dasar “konsep proyek” terhadap isu global tertentu hingga menjadi suatu konvensi internasional yang disepakati forum IGO-INGO.

Sering juga didengar berbagai penyuapan ke negara-negara tujuan investasi. Bahkan untuk mendobrak negara yang dinilai “bandel,” sering kali korporasi-korporasi internasional membuat “tekanan politik” melalui mesin negara sebagai alatnya. Dalam buku *Confessions of an Economic Hit Man* yang menggemparkan dunia, John Perkins menunjukkan bagaimana siasat licik rezim “korporatokrasi” telah dilakukan di banyak negara berkembang termasuk Indonesia. Termasuk di dalamnya adalah penggulingan kekuasaan di sebuah negara. Dan itu semua melibatkan perusahaan-perusahaan multinasional. Tidak aneh jika belakangan santer terdengar adanya “Washington-Wall Street Alliance” seperti ditengarai

Richard Peet (I. Wibowo, 2010). Dengan kata lain, memang ada indikasi kuat bahwa IMF, Bank Dunia, dan WTO hanya mengabdikan kepada kepentingan perusahaan-perusahaan multinasional.

Melihat hubungan antara IMF, Bank Dunia dan WTO dengan perusahaan-perusahaan multinasional ini, akan menarik bila mencermati temuan Stiglitz (2007). Disebutkan oleh Stiglitz, industri obat adalah satu-satunya perusahaan yang mempunyai pengaruh penting di Kantor Perwakilan Dagang Amerika. Perusahaan-perusahaan farmasi itu disebut-sebut telah mengeluarkan US\$ 759 juta untuk memengaruhi 1.400 keputusan kongres selama periode 1988-2004. Dilihat dari jumlahnya, uang dan para pelobi (3.000 orang) yang dikerahkan oleh perusahaan-perusahaan farmasi itu adalah yang paling tinggi di Amerika. Artinya, patut diduga berbagai skandal yang terkait dengan penyyuapan, sebetulnya tidak hanya melibatkan IMF, Bank Dunia, dan WTO melainkan juga melibatkan IGO yang selama ini telanjur anggap kebal dari kepentingan dan bebas nilai, yaitu WHO.

Kesadaran kritis terhadap globalisasi juga bisa dijelaskan lewat berbagai krisis ekonomi, seperti yang terjadi di Asia Tenggara (1997-1998), di Amerika Latin (2000), jatuhnya nilai mata uang dolar, dan krisis keuangan global 2008 yang kini terus membelit Amerika dan Uni Eropa. Bahkan krisis keuangan di Amerika dan Uni Eropa (tempat di mana sistem kapitalisme dibangun), memberi bukti tegas ringkihnya pertumbuhan ekonomi dunia yang hanya didorong dan hanya bertumpu pada arus perdagangan sektor portofolio dan mengabaikan neraca produksi di sektor riil. Itulah yang disebut-sebut oleh banyak ahli ekonomi sebagai fenomena “gelembung ekonomi” atau “gelembung keuangan global.”

Tentu saja Amerika berusaha keras menjaga agar gelembung ekonomi mereka tidak pecah berantakan. Itu sebabnya, dicarikan jalan keluar seperti yang dulu pernah dilakukan negara itu, ketika

dihantam depresi pada 1930-an. Dalam hal ini, keberadaan negara lalu dihidupkan kembali untuk melakukan intervensi pasar dan memberi perlindungan lewat program “American buy American” yang diprakarsai Presiden Barrack Obama. Termasuk ke dalam program ini, adalah kebijakan penerapan tarif impor untuk menghadang produk ban dari China menyusul musim rontok industri ban Amerika. Artinya, ketika dihadapkan kepada pemulihan krisis ekonomi, Amerika bisa dengan sangat mudah mengambil jalan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip perdagangan bebas yang justru dirumuskan sendiri oleh mereka melalui GATT dan WTO.

Bukan suatu hal yang mustahil pula, berbagai resep model neo-merkantilistik kelak akan ditebus oleh Amerika untuk mengobati neraca perdagangan internasionalnya. Tidakkah bagi Amerika yang raksasa, bukan suatu yang sulit untuk menganut prinsip “korbankan tetanggamu” (*beggar thy neighbor*) atas nama kepentingan nasional mereka?

Gejala ini, antara lain bisa dilihat dari invasi militer Amerika ke Afganistan dan Irak yang sebetulnya merupakan gambaran dari hasrat Amerika menguasai sumber-sumber minyak dunia di tengah-tengah isu krisis energi yang mulai muncul sejak 1970-an. Ini pula yang terjadi ketika Amerika dengan dukungan PBB dan NATO, mendukung penggulingan Khadafi di Libya (2011). Semua gejala ini semakin menguatkan dugaan banyak kalangan bahwa negara-negara maju telah bertindak memaksakan kehendaknya sesuai dengan nalar pemahaman nasional mereka (*national interest*).

Dengan kata lain, prisma kebijakan dan agenda internasional negara-negara maju baik langsung maupun tidak langsung, selalu ikut mewarnai semua konsep kepentingan nasional di banyak negara. Semacam, ada siasat “politik zigzag” untuk tidak mengatakan ada standar ganda dalam setiap orientasi kebijakan. Persoalannya adalah, pada saat negara-negara maju mengalami gelombang pasang

pertumbuhan ekonomi, secara sepihak mereka gencar melakukan kampanye isu “deregulasi” dengan beragam turunan isu lain ke seluruh penjuru dunia. Akan tetapi, ketika negara-negara maju itu mengalami gejala gelombang surut, diam-diam dilakukan “regulasi” yang restriktif terhadap ekonomi nasional mereka.

Kini, mitos-mitos mulai memudar, dan kemasam filantropis juga mulai terbuka: globalisasi ekonomi sebetulnya adalah gejala “dua muka” (*double standard*) dan hipokrit. Contoh paling nyata dari kemunafikan itu adalah terhentinya perundingan WTO pada Putaran Doha (Doha Development Round), menyusul keengganan negara maju (Amerika, Uni Eropa, dan Jepang) yang tidak bersedia membuka pasar mereka bagi produk pertanian negara berkembang. Padahal, sektor pertanian menjadi keunggulan komparatif (*comparative advantage*) dari negara-negara berkembang dalam perdagangan internasional, setelah sektor manufaktur, hak cipta dan jasa hanya dikuasai oleh negara-negara maju.

Intinya adalah kepentingan politik sebuah negara sebetulnya senantiasa pekat mewarnai rumusan sebuah kebijakan pada era globalisasi. Asumsi kepentingan nasional tetap menjadi landasan bagi pemerintah negara-negara maju untuk berkiprah pada era globalisasi. Lalu sudahkah negara-bangsa dan nasionalisme mati, seperti klaim Kenichi Ohmae? Tidak. Ini pula bukan “akhir sejarah” sebagaimana klaim Francis Fukuyama dulu ketika menyambut berakhirnya perang dingin. Bahkan ke depan, ide negara-bangsa dan nasionalisme tampaknya masih akan tetap relevan dan bukan hanya menjadi sebuah gejala anakronisme historis.

Dalam konteks Indonesia pasca-kolonial, integrasi ke pasar kapitalisme secara pragmatis terjadi sejak ambruknya pemerintah Sukarno dan digantikan Soeharto (1967). Benar, proyek pembangunan Orde Baru adalah sebuah sistem ekonomi nasional yang rapuh. Ada ketergantungan struktural yang sangat kentara. Proses pembangunan

yang ditopang skema pembiayaan utang luar negeri dan relasi patron-klien antara negara dan borjuasi nasional, juga hanya memunculkan “kapitalisme semu” (Yoshihara Kunio, 1991). Ini adalah gejala umum kapitalisme Asia Tenggara memang.

Akan tetapi harus diakui pula, pemerintah Soeharto relatif cukup selektif dan sedikit-banyak memiliki posisi tawar yang cukup kuat, ketika mengintegrasikan perekonomian nasional bangsa ke dalam ekonomi dunia. Setelah kekuasaan Soeharto dijatuhkan (1998), posisi tawar semacam itu nyaris tidak pernah ada. Kondisi yang terjadi, bahkan bisa dikatakan semakin memalukan. Ini terlihat dari berbagai kebijakan ekonomi nasional, yang tampak mengalami gejala liberalisasi sedemikian rupa sehingga terlihat sekadar mengikuti langgam atau bahkan terkesan didikte kepentingan pasar internasional. Celaknya, gejala ini justru mendapat legitimasi moral dan intelektual yang kuat dari kelompok masyarakat sipil, baik organisasi masyarakat maupun LSM. Mereka berbarengan membangun wacana “*emoh* negara” dan mengampanyekan isu-isu global lain, tanpa menimbang bijak siapa sebetulnya yang diuntungkan atau dirugikan.

Tentu saja, dengan kebijakan ekonomi membabi buta yang mengadopsi Konsensus Washington, potensi Indonesia menjadi korban globalisasi akan sangat besar. Potensi ini sudah terlihat ketika kebijakan negara pada sektor pertanian sangat berbeda dengan kebijakan “pasang badan” yang dilakukan negara-negara maju. Sejak Indonesia —didesak dan dipaksa— menandatangani kesepakatan *letter of intent* (LoI) pada Januari 1998, pemerintah melakukan liberalisasi sektor pertanian secara besar-besaran. Batasan tarif impor produk pertanian pangan terjun bebas menjadi 0 persen, sementara untuk non-pangan hanya disisakan dalam besaran 5 persen.

Lalu, Badan Urusan Logistik (Bulog) yang dulu memiliki otoritas penyangga harga komoditas pangan domestik sengaja dipereteli. Kredit likuiditas yang pernah diberikan oleh Bank Indonesia untuk pengadaan

stok beras nasional ditiadakan karena hanya alasan Bulog, pernah menjadi ATM para elite Orde Baru. Akibatnya, pernah terjadi harga gabah kering giling ditingkatkan petani hanya berkisar Rp 700 per kilogram. Padahal biaya produksinya saja sudah mencapai Rp 800 per kilogram. Semua kebijakan tersebut niscaya sangat merugikan petani, tapi siapa yang peduli?

Lihatlah pula, garam pun kini bahkan harus didatangkan dari luar negeri sehingga merugikan para petani dan sektor industri garam nasional. Sebuah ironi yang menggelikan, sebab bagaimana mungkin, sebuah negeri kepulauan yang memiliki bentangan garis laut terpanjang sedunia (*archipelagic state*), kemudian harus mengimpor garam. Itu belum termasuk berbagai kebijakan liberalisasi yang sudah diterapkan di sektor keuangan, pendidikan, pertambangan migas maupun nonmigas, swastanisasi perusahaan-perusahaan BUMN, pemotongan subsidi BBM dan tarif dasar listrik, dan sebagainya. Amanat “Konsensus Washington” sudah berlangsung di Indonesia.

Satu hal yang tidak kalah memprihatinkan adalah ketika perdagangan bebas China-ASEAN (CAFTA) mulai diberlakukan sejak awal 2010. Salah satu dampak dari CAFTA ini adalah banyak perusahaan nasional mengalami penurunan produksi dan penjualan, sehingga berujung pada pengurangan jumlah tenaga kerja (PHK). Nasib seperti ini terutama dialami oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak di sembilan sektor industri yaitu tekstil dan produk tekstil; elektronik; mebel kayu dan rotan; mainan anak-anak; permesinan; besi dan baja; makanan dan minuman; jamu; dan kosmetik. Muncul kemudian gejala deindustrialisasi seperti yang terkonfirmasi dalam validitas hasil penelitian Pusat Penelitian Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2E LIPI) 2009.

Di tengah situasi liberalisasi semacam itu, sektor industri hasil olahan tembakau (industri kretek) yang terbukti pejal menghadapi deraan gelombang krisis keuangan global selama beberapa periode, ironisnya justru digiring menuju tubir kehancuran. Benar Indonesia

belum menandatangani FCTC, tapi akhir-akhir ini gerakan kampanye anti-tembakau tampak gencar mendorong agar konsensus itu diadopsi ke dalam regulasi nasional. Apa yang disebut sebagai gerakan kampanye anti-tembakau adalah salah satu isu global yang bermaksud melakukan proses pengaturan secara restriktif terhadap industri tembakau dunia melalui kerangka FCTC.

Mengikuti analisis historis Michel Foucault dan Ivan Illich, tentu gerakan kampanye anti-tembakau harus disikapi secara skeptis. Walaupun gerakan kampanye itu selalu mengatasmakan isu kesehatan masyarakat yang terkesan filantropis, jelas sekali tidak bisa menutupi dengan sempurna adanya agenda dan kepentingan lain di baliknya. Orang-orang bisa menduga ada kepentingan korporasi industri farmasi multinasional saja yang langsung atau tidak langsung akan mengambil keuntungan dari kampanye anti-tembakau, misalnya dengan menjual produk *nicotine replacement therapy* dan bisnis klinik jasa berhenti merokok. Atau menduga ada kepentingan korporasi industri rokok multinasional yang terus berekspansi untuk mengambil keuntungan di tengah gencarnya serangan terhadap industri kretek nasional. Akan tetapi, agenda dan kepentingan di balik kampanye anti-tembakau, sangat boleh jadi, lebih dari itu semua.

Foucault dan Illich telah mengajarkan tentang bahaya yang muncul dari dominasi pengetahuan yang diproduksi dan diproduksi-ulang secara terus-menerus oleh rezim industri kesehatan. Ancamannya tidak hanya soal terjadinya *iatrogenesis* yang berdampak pada memunculkan ketergantungan manusia modern atas industri kesehatan, tapi juga ancaman homogenisasi kesadaran melalui serangkaian upaya medikalisasi kehidupan masyarakat. Jika hal ini terjadi, tentu bukan hanya soal sehat dan sakit, normal dan abnormal, ataupun baik dan buruk. Seluruh atribut politik identitas kebangsaan dan bernegara akan dirumuskan oleh kepentingan industri kapitalisme yang tengah bergerak mendunia ini

Tak lalu tidak ada jalan keluar. Korea Selatan sejauh ini mungkin bisa dijadikan contoh. Negara itu berhasil mengedepankan peran negara untuk memanfaatkan utang, dan sebagai pelaku kegiatan pembangunan ekonomi. Di bangun pula kerja sama yang jelas antara negara dan pengusaha nasional. Antara lain, negara mengeluarkan peraturan tegas dengan memaksa penduduk memakai produk dalam negeri. Negara juga selektif mengontrol masuknya kekuatan-kekuatan multinasional sehingga dapat menguatkan perekonomian nasionalnya melalui proses alih teknologi. Ini terlihat ketika Korea Selatan mampu melaksanakan “substitusi impor” dalam bidang otomotif.

Pada 1967 didirikan perusahaan Hyundai sebagai perusahaan perakitan. Melalui lisensi, perusahaan ini membuat mobil Ford Cortina. Lalu, bekerja sama dengan perusahaan Italia untuk desain dan Mitsubishi untuk mesin, Hyundai akhirnya mampu memproduksi mobil sendiri. Kini, Hyundai sudah mampu bersaing dengan pasar Amerika, Eropa, dan Jepang.

Contoh lainnya adalah China. Meski pun sejak Deng Xiaoping berkuasa perekonomian nasional Negeri Tirai Bambu itu terintegrasi ke dalam pasar kapitalisme global, bukan berarti negara mundur sebagai pelaku kegiatan ekonomi yang dominan. China memiliki posisi tawar yang kuat terhadap negara-negara maju (Barat) ketika pelan-pelan membuka “tirai bambu” sehingga membuka terjadinya “keajaiban ekonomi.” Salah satu hasilnya: tiga dari empat bank terbesar di dunia berdasarkan nilai kapitalisasi pasar adalah perusahaan milik negara China. Tiga bank itu adalah Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction, dan Bank of China.

Dengan semua contoh itu, Indonesia mestinya juga melakukannya. Benar, katakanlah globalisasi adalah suatu gejala yang tak terelakkan. Namun ibarat pedang bermata dua, globalisasi juga menyimpan tantangan di satu sisi dan ancaman di sisi lain. Jika tidak berhati-hati

menyikapi siasat “politik *zigzag*” semacam ini, globalisasi bukan tidak mungkin justru akan menjadi perangkap yang akan menempatkan Indonesia dalam “kerangkeng besi” hukum ekonomi pasar kapitalistis. Di saat itu, Darwinisme sosial pun niscaya terjadi dan logika *survival of the fittest* kemudian akan menjadi neracanya. Meminjam analogi Joseph E. Stiglitz, “pesta Olimpiade” dimulai sebelum waktunya, karena peta kekuatan industri yang tidak setara (*unequal*), kuatnya dominasi struktural (sains-teknologi, modal, sumber daya manusia) negara-negara industri maju (Kelompok Utara) terhadap negara-negara berkembang (Kelompok Selatan).

Secara singkat bisa dikatakan, kepentingan nasional semestinya ditempatkan di atas semua rumusan kebijakan pembangunan. Sudah bukan saatnya, sok gagah bersikap mendukung globalisasi tanpa mengukur kemampuan negara dan bangsa. Yang harus disadari adalah bangsa dan negara ini sangat besar dan kaya, sehingga seharusnya tidak pada tempatnya kepentingan negara lain ikut mengatur dan mengendalikannya.

Bab II

Empat Abad Retorika Anti-Tembakau dari Paus Urban VII hingga Bloomberg

Tobacco, divine, rare, superexcellent tobacco, which goes far beyond all the panaceas, potable gold, and philosophers stones, a sovereign remedy to all diseases but as it is commonly abused by most men, which take it as tinkers do ale, 'This a plague, a mischief, a violent purge of goods, lands, health; hellish, devilish and damned tobacco, the ruin and overthrow of body and soul.

Robert Burton (1577–1640), British clergyman, author. *The Anatomy of Melancholy*, pt. 2, sct. 4, memb. 2, subsect. 1 (1621)

*R*etika Columbus (dalam penjelajahan ke benua Amerika) bertemu suku Indian Arawak dan Taino yang sedang merokok tembakau pada 12 Oktober 1492, dia pasti tidak akan mengira tembakau akan menjadi komoditas politik dan penggunaannya menuai pro-kontra yang bahkan berlangsung

hingga sekarang. Awalnya pro-kontra itu hanya terjadi di tingkat yang lebih lokal, tapi kini pertentangannya menjadi lebih masif. Melibatkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) di bawah PBB, yang menginisiasikan Kerangka Konvensi Pengendalian Tembakau (FCTC).

Pertentangan penggunaan tembakau yang dicatat sejarah, awalnya hanya muncul pada kegiatan-kegiatan ilmiah. Antara lain dimulai ketika Duta Besar Prancis untuk Portugal Jean Nicot de Villemain menuliskan manfaat pengobatan tembakau kepada pengadilan Prancis (1559). Dia menyebutnya sebagai Panacea (nama dewi penyembuh dalam mitologi Yunani). Sekitar lima belas tahun kemudian, Michael Bernhard Valentini, seorang dokter kebangsaan Jerman menjelaskan dalam buku *Polychresta Exotica (Exotic Remedies)* tentang tembakau sebagai sumber daya alami yang bermanfaat bagi pengobatan medis. Pada tahun yang sama, dokter Nicholas Monardes dari Spanyol merekomendasikan tembakau sebagai tradisi pengobatan di Eropa. Rekomendasi itu, dia tulis di buku *De Hierba Panacea*.

Hingga 50 tahun kemudian, muncul publikasi ilmiah tandingan yang menganggap tembakau berbahaya bagi kesehatan. Berjudul *Worked of Chimney Sweepers* (juga dikenal sebagai *Chimney-Sweepers* atau *A Warning for Tobacconists*), publikasi yang terbit pada 1602 itu ditulis oleh dokter yang menyembunyikan identitasnya dan hanya menuliskan namanya sebagai Phillaretes. Dia antara lain menyebutkan, dampak dari mengonsumsi tembakau sama dengan menghirup jelaga dari cerobong asap.

Pelarangan penggunaan tembakau yang paling terang-terangan baru muncul pada 1590. Saat itu Paus Urban VII mengeluarkan peraturan mengonsumsi tembakau dengan cara apa pun di lingkungan gereja. Mereka yang melanggar diancam dikeluarkan dari *excommunication* (komune dalam tradisi gereja Katolik). Larangan ini

berlangsung hingga hampir satu setengah abad (1724), sebelum Paus Benedict XIII menghapuskannya karena dia adalah seorang perokok.

Dalam rentang waktu tersebut, Raja James I dari Inggris mengeluarkan manifesto “A Counterblasts to Tobacco” (1604). Isinya melarang rakyat Inggris merokok, dan menyamakan perbuatan orang yang merokok dengan perbuatan barbar, liar, dan musyrik (*godless*) seperti cap yang diberikan kepada bangsa Indian yang belum menganut ajaran Kristen. Raja James I juga menaikkan pajak tembakau hingga 4.000% (dari semula 2 pence/lb menjadi 6 shillings 10 pence/lb) dan mempertanyakan manfaat dari tembakau, dan membangun argumen (yang kemudian dikenal hingga sekarang) tentang apa yang disebut sebagai bahaya rokok terhadap perokok pasif (*passive smokers/secondhand smokers*): “*loathsome to the eye, hateful to the nose, harmful to the brain*” dan “*dangerous to the lungs.*”

Raja James I mengeluarkan manifesto menyusul keluhan yang disampaikan oleh sejumlah ahli pengobatan di Inggris, setahun sebelumnya. Mereka antara lain mengeluhkan, tembakau telah digunakan sebagai bahan pengobatan tanpa resep dari mereka. Akan tetapi beberapa ahli sejarah berspekulasi, manifesto itu terutama didorong oleh kebenciannya kepada Sir Walter Raleigh. Nama yang disebut terakhir, adalah bangsawan Inggris yang pernah melakukan percobaan kudeta terhadap Raja James I. Dia ditugaskan Ratu Elizabeth untuk mendirikan koloni di dunia baru (Virginia, Amerika) dan sekaligus yang memperkenalkan tembakau ke Inggris. Tembakau dari Virginia itulah yang lantas menjadi komoditas ekspor utama ke Inggris.

Lalu sepanjang tahun 1630-an, sejarah mencatat periode kemunculan peraturan yang melarang merokok di beberapa negara. Di Cina, Dinasti Qing mengeluarkan kebijakan anti-tembakau pada 1634, dan mengancam dengan hukuman mati bagi siapa pun yang

melanggar kebijakannya. Bangsa Cina mengenal tembakau dari bangsa Jepang di pengujung abad 16, dan lalu menjadi produsen terbesar tembakau bahkan hingga kini. Akan tetapi kebijakan anti-tembakau dari Dinasti Qing ini bukan atas nama kesehatan, melainkan karena alasan ketidaksenangan terhadap ketidakseimbangan perdagangan Cina dan Korea.

Larangan yang kurang lebih sama juga diberlakukan oleh Jepang dan Korea. Dua negara itu melarang orang merokok bukan untuk alasan kesehatan, melainkan karena alasan bahaya kebakaran yang bisa dipicu oleh api rokok. Alasan serupa digunakan oleh koloni Massachusetts pada 632. Karena dianggap sebagai perbuatan dosa, Sultan Murad IV dari Kekaisaran Ottoman, Turki (1633), dan Czar Michael dari Rusia (1634) melarang orang merokok. Di Prancis, King Louis XIII (1635), mengeluarkan kebijakan anti-tembakau dengan membatasi penjualan tembakau hanya untuk apoteker, dan konsumen harus menunjukkan resep dokter untuk membelinya. Pembatasan ini dicabut dua tahun kemudian, karena King Louis XIII ternyata juga penikmat tembakau.

Pada 1899 muncul gerakan anti-tembakau di Amerika Serikat yang melibatkan publik. Lucy Page Gaston, tokoh gerakan Women's Christian Temperance Union mendirikan Anti-Cigarettes League of America. Lucy dan gerakannya menganggap penggunaan tembakau terutama merokok adalah gerbang menuju perilaku tidak bermoral, khususnya di kalangan perempuan-perempuan muda. Lalu antara 1890-1930, ada 15 negara bagian di Amerika yang melarang memproduksi, menjual dan memiliki tembakau.

Kebijakan anti-tembakau yang semakin kuat dan dilandasi oleh argumen ilmiah yang lebih modern berlangsung di Jerman pada era Nazi. Kebijakan ini dipicu oleh hasil penelitian Franz H. Muller dari University of Cologne's Pathological Institute pada 1939, yang dilanjutkan oleh penelitian Eberhard Schairer dan Erich Schoniger dari

Jena Institute for Tobacco Hazzards Research pada 1943. Keduanya menggunakan metode riset epidemiologi berdasarkan analisis statistik yang mendemonstrasikan indikasi kuat hubungan meningkatnya kasus kanker paru-paru dengan meningkatnya penjualan rokok. Kesimpulannya: rokok adalah penyebab utama penyakit kanker paru-paru. Berdasarkan hasil penelitian itu dan tujuan ideologi Nazi, pemerintah Jerman kemudian meningkatkan intensitas larangan pada kebijakan anti-tembakau.

Akan tetapi, belakangan sejumlah peneliti mengungkapkan, riset ilmiah tersebut dinilai tidak bebas dari kepentingan. Karl Astel, Rektor University of Jena, yang mendirikan Jena Institute ternyata seorang perwira SS (polisi khusus Nazi). Ada juga keterlibatan Gauleiter Fritz Sauckel , Chief Organizer of German System of Forced Labor, yang menyediakan dana, dan donasi khusus dari Adolf Hitler senilai 100.000 Reichsmarks.

Pada tahun yang sama, ketika Muller memublikasikan hasil penelitiannya, Fritz Lickint, berkolaborasi dengan Reich Committee for the Struggle Against Adictive Drugs dan German Anti-Tobacco League, memublikasikan *Tabak un Organismus* (Tembakau dan Organisme). Publikasi ini berusaha membangun rasionalitas ilmiah tentang tembakau sebagai penyebab kanker bagi organ-organ sepanjang *Smokey-alley* atau lintasan asap rokok, yang meliputi bibir, lidah, mulut, rahang, kerongkongan dan paru-paru. Disebutkan pula dalam publikasi tersebut istilah perokok pasif (*passivrauchen*) untuk pertama kalinya dalam pengertian kesehatan publik modern.

Kebijakan anti-tembakau Nazi (Proctor, 1996) meliputi:

- Larangan merokok di area publik
- Meningkatkan pajak/cukai rokok
- Larangan iklan rokok
- Larangan merokok bagi perempuan hamil
- Larangan merokok bagi remaja (di bawah umur 18 tahun)

Robert N. Proctor dalam jurnal ilmiah yang dipublikasikan oleh *BMJ* volume 313 pada 7 Desember 1996 mengungkapkan, kebijakan anti-tembakau yang diberlakukan oleh Nazi di bawah kepemimpinan Adolph Hitler, terutama bertujuan untuk kepentingan ideologi politik Nazi yang ingin menjaga kemurnian ras (*racial hygienist*) bangsa Jerman dari *racial poisons*. Hitler menggambarkan tembakau sebagai *the wrath of the red man against the white man for having been given hard liquor*. Tembakau dianggap sebagai identifikasi dari ras kulit merah (Indian) sehingga mengonsumsinya dianggap bisa mencemarkan keunggulan ras kulit putih (bangsa Jerman). Dalam kampanye anti-tembakau Nazi disebutkan pula, tembakau sebagai *corrupting force in a rotting civilization that has become lazy*.

Dalam artikel “Nazi Medicine and Public Health Policy” yang dipublikasikan di *Dimensions*, Vol 10, No 2, 1996, Proctor menyebutkan, sentimen anti-tembakau yang berkembang dalam berbagai kalangan di era kekuasaan Nazi, adalah sebagai berikut:

- Oleh kalangan *racial hygienists*, tembakau dianggap akan mengorupsi *germ plasma* ras bangsa Jerman.
- Kalangan perempuan terutama para perawat dan ibu-ibu hamil menganggap tembakau bisa membahayakan dan merusak *maternal organism*. Artinya bisa merusak kemurnian dan kesempurnaan keturunan yang dilahirkan perempuan-perempuan Jerman.
- Kalangan industri menilai, kebiasaan merokok akan mengurangi kapasitas dan produktivitas kerja masyarakat.

Retorika anti-tembakau Nazi, terutama didasari pada retorika *eugenics* pada masa sebelumnya yang juga merefleksikan kemurnian atau kesempurnaan tubuh dan semangat kerja sebagai definisi nilai kesempurnaan manusia. Tembakau yang bisa merangsang kimia tubuh manusia untuk mencapai sensasi euforia, lalu dianggap sebagai

wabah penyakit. Dianalogikan sebagai sesuatu yang memabukkan (*dry drunkenness*), masturbasi paru-paru (*lung masturbation*), menjadi penyakit peradaban dan simbol gaya hidup liberal.

Mulanya, kampanye anti-tembakau Nazi yang menggunakan sentimen politik ras, tidak efektif. Apalagi pada masa itu, industri tembakau berpengaruh pada perekonomian dan perpolitikan Jerman karena menyumbang pendapatan pada kas negara. Angka konsumsi rokok masyarakat Jerman pun justru meningkat.

Pada tahun 1932 misalnya, angka konsumsi rokok per kapita Jerman mencapai 500 batang per tahun. Enam tahun berikutnya, angka itu menjadi 900 batang per tahun. Secara keseluruhan angka konsumsi rokok masyarakat Jerman pada 1940-1941 mencapai 75 miliar batang rokok, dan menyumbangkan pendapatan negara dari pajak dan cukai rokok sebesar 1 miliar Reichsmarks atau 1/12 dari total pendapatan kas nasional Jerman.

Angka itu baru terlihat menurun ketika memasuki 1940, bersamaan dengan rasionalisasi argumen yang datang dari kalangan ilmiah Jerman. Mereka membangun korelasi antara rokok dan penyebab kanker lewat pendekatan epidemiologi yang berujung pada intensitas kebijakan anti-tembakau. Untuk mencapai pada tujuan ideologi politik keunggulan ras Nazi, larangan merokok kemudian diberlakukan secara ketat terutama bagi perempuan. Kaum ini dianggap sebagai agen reproduksi yang akan melahirkan keturunan-keturunan bangsa Jerman.

Dari uraian tersebut tampak hubungan yang meyakinkan, antara legitimasi ilmiah dan semangat anti-tembakau Nazi. Legitimasi itu yang memperlihatkan indikasi pesanan dari Nazi, di satu sisi telah mendorong tingkat penerimaan publik dan menjadi dasar untuk mengintensifikasikan kebijakan anti-tembakau Nazi. Di sisi lain, semangat anti-tembakau Nazi ternyata tidak berujung pada pemberangusan atau pelarangan tembakau secara total, karena

sumbangan industri tembakau Jerman terhadap perekonomian dan pendapatan negara yang sangat besar. Dengan kata lain, rezim Nazi sebetulnya bersikap mendua: mengakomodasi kepentingan ideologi politik dan kepentingan ekonomi, dengan menempatkan isu tembakau sebagai wilayah “abu-abu.”

Lalu di tengah-tengah perdebatan pro-kontra tembakau di Jerman itu, perusahaan-perusahaan pecahan dari American Tobacco berikut sindikasi usahanya mulai berkembang sebagai perusahaan-perusahaan trans-nasional. Produk tembakau dari perusahaan ini (termasuk yang berasal dari Inggris, seperti British American Tobacco dan Imperial Tobacco) mulai diperdagangkan dan menyebar ke banyak negara di dunia. Perkembangan ini justru mulai terlihat setelah diberlakukannya Sherman Anti-Trust Act di Amerika Serikat. Dan ini yang mencengangkan: industri tembakau menjadi sahabat dekat industri kesehatan.

Di Amerika Serikat, perusahaan rokok menempatkan iklannya di jurnal-jurnal medis dan memberikan bantuan pendanaan bagi riset-riset medis. Camels salah satu brand rokok produksi RJ Reynold Tobacco, bahkan menyebutkan dalam salah satu reklamanya *More Doctors Smoke Camels Than Any Other Cigarette!* Lalu saham-saham perusahaan tembakau menjadi incaran bagi investasi dana-dana publik, termasuk dana yang dimiliki oleh lembaga-lembaga riset dan pendidikan.

Hindia Belanda

Di saat yang bersamaan, di Indonesia, industri tembakau khususnya industri kretek menjadi primadona bagi pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Itu sebabnya, retorika kebijakan anti-tembakau tidak ikut mewarnai perjalanan sosial, politik dan budaya di Indonesia. Bahkan pada era 1930-

an, bisa dikatakan sebagai era keemasan industri kretek Hindia Belanda, karena terus meningkatnya produksi dan pemain di industri tersebut.

Benar, ekonomi dunia saat itu dilanda krisis menyusul limbungnya nilai perdagangan saham di Wall Street New York. Potensi ekspor tembakau Hindia Belanda pun ikut terkena dampaknya. Namun situasi itu tidak terlalu berpengaruh terhadap industri kretek di Hindia Belanda yang diperlakukan istimewa ketimbang industri rokok putih melalui kebijakan pajak maupun harga. Akibatnya mudah ditebak: potensi ekspor tembakau diserap oleh industri kretek di dalam negeri yang terus berkembang.

Situasi itu, sayangnya berbalik ketika Perang Dunia II pecah dan Jepang mengambil alih kekuasaan. Kebutuhan perang mendorong pengalihan produksi bagi komoditas-komoditas strategis, dan tembakau tidak termasuk di dalamnya. Tembakau pun menjadi barang yang langka. Industri kretek Indonesia kembali mulai hidup bersamaan dengan berakhirnya Perang Dunia II, tapi retorika pertentangan nilai soal tembakau tetap menjadi bagian dari sejarah perkembangan selanjutnya. Masa itu (1950-an) bahkan bisa dikatakan sebagai awal dari pro-kontra tembakau.

Itu antara lain ditunjukkan dengan kemunculan hasil riset epidemiologi yang menghubungkan tembakau dengan kanker paru-paru dan penyakit lain terkait kesehatan paru-paru dipublikasikan oleh *Journal of American Medical Association* (JAMA) dan *British Medical Journal* (BMJ). Metode dan hasil riset ini, persis sama dengan publikasi serupa yang dilakukan oleh para peneliti Jerman di era Nazi, 10 tahun sebelumnya. Publikasi dari JAMA dan BMJ itulah yang belakangan, terus menjadi rujukan gerakan anti-tembakau hingga saat ini.

Isu-isu yang diangkat pun tidak jauh berbeda pada masa-masa sebelumnya: etika sosial, kepentingan ekonomi dan iptek (kesehatan),

yang sifatnya pun lebih kepada kesehatan individu. Gerakan anti-tembakau yang dilakukan oleh Partai Nazi di Jerman pada sebelumnya, seperti tidak menyisakan sedikit pun jejak dalam dinamika pro-kontra pada masa itu.

Ironisnya, Amerika Serikat dan Inggris yang mengalahkan Nazi pada Perang Dunia II lalu menjadi pelopor kebijakan anti-tembakau. Semua isu terkait tembakau dan rokok sebagai produk turunan tembakau, bahkan bersumber pada dinamika yang terjadi di kedua negara tersebut, dan berimbas pada negara-negara lain. Riset-riset tentang risiko mengonsumsi tembakau, kegiatan-kegiatan litigasi yang menempatkan industri tembakau menjadi sasaran ataupun pemenang, pertarungan kepentingan antara industri kesehatan dan industri tembakau, semuanya berujung pada retorika isu yang saling mengisi dalam keemasan industri tembakau dan kesehatan.

Memasuki dasawarsa 90-an, gerakan anti-tembakau semakin menguat dan mencapai puncaknya di Amerika Serikat. Hal itu antara lain ditandai dengan pemboikotan produk tembakau yang dipelopori kalangan intelektual dan akademisi. Hasilnya terjadi penjualan besar-besaran saham perusahaan-perusahaan tembakau di lantai bursa. Walaupun tidak memberikan dampak kehancuran pada industri tembakau, aksi boikot itu harus dikatakan telah memengaruhi industri tembakau secara keseluruhan yang pada waktu itu, investasinya banyak diminati dan berasal dari lembaga-lembaga kesehatan (rumah sakit) dan pendidikan (perguruan tinggi).

Kebijakan anti-tembakau semakin menguat, ketika pada Mei 1995 muncul wacana membentuk hukum internasional pengendalian tembakau yang kemudian menghasilkan resolusi World Health Assembly (WHA 48.11). Tiga tahun kemudian, Ketua WHO dokter Gro Harlem Burtland mulai memfokuskan pengendalian tembakau menjadi isu internasional lewat program Tobacco Free Initiative. Program inilah, yang belakangan menghasilkan kesepakatan internasional yang dikenal saat ini sebagai FCTC.

Pada era ini tembakau yang awalnya dituding sebagai penyebab risiko kesehatan dan penyakit, dituduh sebagai penyebab utama kematian, bukan hanya bagi individu yang mengonsumsi melainkan untuk seluruh masyarakat di seluruh dunia. Lalu, seiring dengan peningkatan status tembakau dari akibatnya terhadap “risiko kesehatan” menjadi “penyebab utama kematian,” alasan-alasan yang disajikan untuk mendukung klaim tersebut tetap menggunakan isu dan metode yang sama dan tidak jauh berbeda dengan retorika anti-tembakau yang pernah terjadi pada era kekuasaan Nazi di Jerman.

Dan salah satu tokoh yang paling mencolok dalam gerakan anti-tembakau global adalah Michael Bloomberg. Dia dikenal sebagai wali kota New York dan memberlakukan kebijakan anti-tembakau yang paling ketat di seluruh dunia, di wilayahnya. Selain tempat-tempat publik dalam kategori dalam gedung (*in-door*), larangan merokok pun diberlakukan Bloomberg di luar gedung (*out-door*) yang didasari oleh rasionalisasi risiko kesehatan yang diakibatkan Environmental Tobacco Smoke. Bloomberg juga ikut mendanai gerakan perang global anti-tembakau dengan menyediakan dana jutaan dolar, sebagai mitra WHO dan lembaga-lembaga lainnya untuk mengimplementasikan ketentuan FCTC di seluruh negara di dunia.

Bab III

Siapakah Michael Bloomberg?

*I'm Jews, I'm rich, I'm pro-choice, I'm pro-gay, I'm pro-abortion,
I'm pro-immigration, I'm pro free-trade, I'm pro-gun control
I'm against tobacco, I believe in Darwin*

Memegang Kepala Ular

*If you are going to succeed, you need a vision,
one that's afford-able, practical, and fills a
customer need. Then, go for it. Don't worry too
much about the details. Don't second-guess your
creativity. Avoid over-analyzing the new project's
potential. Most importantly, don't strategize
about the long term too much.*

(Mike Bloomberg dari Bloomberg by Bloomberg, 1997)

*R*ejutan itu datang pada suatu pagi, Sabtu, 1 Agustus 1981. Michael Ruben Bloomberg atau Mike Bloomberg yang telah bekerja selama 15 tahun di perusahaan investasi, Salomon Brothers Inc. diminta menemui John H. Gutfreund, CEO perusahaan. Setelah menyampaikan gambaran tentang kondisi

terakhir perusahaan, Gutfreund menyodorkan selebar cek kepada Bloomberg. *“Here’s US\$ 10 million, you’re history, time for you to leave.”* Hari itu, komite eksekutif Salomon Brothers telah memutuskan menjual perusahaan dan bergabung (merger) dengan Phibro Corporation, perusahaan publik perdagangan komoditas dan Bloomberg dipecat. Cek yang disodorkan Gutfreund adalah pesangon untuk Bloomberg.

Tentu Bloomberg sakit hati, tapi dia juga paham, pesangon yang diterimanya juga sangat besar untuk ukuran profesional di Wall Street seperti dirinya, yang saat itu berusia 39 tahun. Dari uang pesangon itulah, dia kemudian memutuskan membangun kerajaan bisnis di bidang jasa keuangan, tak jauh dari pekerjaan yang pernah ditekuninya di Salomon Brothers. Di benaknya, terbayang sebuah perusahaan sekuritas dan investasi yang didukung oleh teknologi informasi. Namanya Innovation Market System (IMS).

Dia lalu menyewa sebuah ruangan kecil dengan pemandangan gang sempit di Madison Avenue, New York. Modal usahanya US\$ 300 ribu. Awalnya Bloomberg hanya merekrut beberapa eks koleganya di Salomon Brothers, yaitu Duncan MacMillan, Chuck Zegar, dan Tom Secunda. Tiga tahun berikutnya dia mulai membuka lowongan untuk profesional lainnya, dan sejak itu kerajaan bisnis Bloomberg terus berkembang hingga 20 tahun berikutnya menjadi raksasa bisnis bernilai miliaran dolar Amerika.

Pada masa-masa awal perusahaannya, Bloomberg selektif memilih pelanggan. Sasaran utamanya adalah perusahaan-perusahaan yang dianggap bisa memberikan pengaruh positif bagi perusahaannya. Dia karena itu memilih perusahaan-perusahaan yang memiliki citra dan pengaruh yang kuat di lingkungan Wall Street agar ada perhatian terhadap IMS, perusahaannya.

Salah satu sasarannya adalah Merrill Lynch & Co. yang saat itu berada di puncak ketenaran Wall Street. Sam Hunter, Jerry Kenney,

dan Gerry Eli; tiga anggota paling berpengaruh di Merrill Lynch & Co. berhasil diyakinkan oleh Bloomberg dan koleganya, bahwa IMS bisa mempelajari hubungan Merrill Lynch's dengan pelanggan potensialnya yang berbasis institusi. Tiga eksekutif Merrill Lynch & Co. itu setuju dengan tawaran Bloomberg, dan akhirnya terpujau ketika Bloomberg kemudian memberikan laporannya soal hubungan potensial Merrill Lynch & Co. dengan para pelanggannya. Sebagai gantinya, Merrill Lynch & Co. membayar Bloomberg US\$ 100 ribu tapi nama IMS dan Bloomberg mulai mendapat perhatian di Wall Street.

Lalu ketika mendapat kesempatan bertemu dengan Ed Moriarty, pemimpin Divisi Pasar Modal Merrill Lynch & Co., Bloomberg seolah menemukan pintu terbuka untuk menjual gagasan tentang pentingnya gagasan pasar modal yang berbasis teknologi. Dia menggunakan kesempatan itu untuk mempresentasikan dan mendemonstrasikan konsep sistem IMS di depan Ed Moriarty dan Hank Alexander, yang mengelola semua kegiatan pengembangan perangkat lunak Merrill Lynch & Co. Hasilnya: Bloomberg mendapat kepercayaan membangun sistem layanan IMS di Merrill Lynch & Co. dan hingga 1983, Merrill Lynch & Co. memesan 22 terminal dari IMS, dengan syarat layanan itu tidak dijual kepada pesaing. Puncak dari semua itu, Merrill Lynch & Co. akhirnya memutuskan untuk membeli 30 persen kepemilikan saham IMS senilai US\$ 30 juta, dan Merrill Lynch & Co. menjadi perusahaan investasi pertama yang terhubung dengan para pelanggan secara teknologi.

Pencapaian besar IMS itu, akan tetapi tidak memuaskan Bloomberg. Perjanjian eksklusif dengan Merrill Lynch & Co. agar IMS tidak menjual layanannya kepada perusahaan lain dianggapnya terlalu sempit untuk melebarkan ekspansi usaha IMS bahkan ketika Merrill Lynch & Co. sudah menguasai 30 persen saham IMS. Belakangan, pada 1985 Bloomberg berhasil meyakinkan Merrill Lynch & Co. untuk

mengubah isi perjanjian dan memperluas pelanggan. Merrill Lynch & Co. setuju, dan dalam waktu singkat IMS mendapat kepercayaan dari Bank of England dan Bank of Vatican.

Pada tahun berikutnya, Bloomberg mengubah nama IMS menjadi Bloomberg L.P. dan mengembangkannya menjadi perusahaan yang berbasis pelanggan di semua lini. Mulai dari lini pembeli seperti dana pensiun, bank sentral, asuransi hingga lini penjual seperti perusahaan pialang serta sekuritas. Bendera Bloomberg semakin berkibar, dan mulai merambah pasar dunia. Kantor cabang pertama Bloomberg L.P. di luar Amerika dibukanya di London pada awal 1987. Pelanggan utamanya selain Merrill Lynch & Co. adalah Bank of England, dan Bank for International Settlement.

Empat bulan berikutnya, Bloomberg membuka kantor cabang di Tokyo dan di pengujung tahun mengakuisisi Sinkers Inc. Nama yang disebut terakhir adalah perusahaan riset data keuangan. Perusahaan inilah yang pada 1996 berganti nama menjadi Bloomberg Princeton, yang bertugas mengumpulkan dan menganalisis data untuk kepentingan Bloomberg. Ada ratusan peneliti di dalamnya, yang setiap saat bisa menyediakan ribuan prospektus dan laporan keuangan perusahaan publik di hampir seluruh negara melalui saluran terminal Bloomberg.

Namun puncak dari bisnis Bloomberg, sebetulnya bisa dikatakan dimulai pada 1989, saat dia membuka kantor cabang di Australia. Bloomberg bertemu dengan Matthew Winkler, yang mengusulkan untuk mengembangkan layanan berita bisnis. Bloomberg tertarik dan ide itu direalisasikan setahun kemudian setelah pertemuan di Australia. Namanya Bloomberg Business News (BBN), sebuah “kantor berita” yang menjadi corong pemasaran bisnis Bloomberg.

Awalnya BNN hanya memberitakan isu-isu bisnis tapi belakangan BNN membuka kantor di Washington untuk meliput isu-isu politik. Pada masa-masa awal itu, BNN akan tetapi tidak punya akses meliput

berita politik di Washington sebagai pusat politik Amerika karena belum mendapat akreditasi dari Washington's Standing Committee of Correspondence (SCC), badan yang berkuasa menentukan siapa yang boleh disebut sebagai jurnalis dan mendapat akses ke Capital News Makers. Alasan SCC, BNN masih terafiliasi dengan Merrill Lynch & Co. sehingga dikhawatirkan menimbulkan konflik kepentingan.

Karena penolakan SCC itu, Bloomberg mulai bermanuver termasuk dengan memberitakan hal-hal negatif tentang Merrill Lynch & Co. Tujuannya untuk membangun imaji kemandirian media Bloomberg. Dia menawarkan pula surat utang Bloomberg L.P. kepada *Associated Press (AP)*, kantor berita Amerika secara gratis alias tanpa harus membayar agar BNN diizinkan menampilkan berita-berita AP. Pada 1991, atau sekitar dua tahun setelah BNN beroperasi, perusahaan itu menekan kontrak kerja sama dengan majalah *Time*. Isinya: *Time* akan memuat sisipan BNN, dengan kompensasi mendapat fasilitas terminal Bloomberg secara gratis. Karena semua manuver Bloomberg itu, SCC akhirnya “menyerah” dan memberikan akreditasi untuk BNN. “Kantor berita” milik Bloomberg itu pun diakui sebagai salah satu sumber berita nasional Amerika.

Menyusul diakuinya BNN oleh SCC itu, nilai pendapatan Bloomberg L.P. pun terus terkerek. Pada tahun 1991, Bloomberg L.P. membukukan pendapatan US \$ 800 juta dengan 14 ribu terminal yang terpasang. Dua tahun kemudian, ada 31 ribu terminal Bloomberg yang terpasang di seluruh dunia. Hingga tiga berikutnya, Bloomberg sudah menginstalasi 10 ribu terminal untuk para pialang di Eropa dan berhasil membangun pusat European Bloomberg Information di London yang menyediakan fasilitas siaran Bloomberg TV yang bisa diakses via satelit dan televisi kabel. Kini, BNN telah beroperasi di seluruh dunia dengan 56 biro (termasuk Johannesburg dan Beijing) dan 335 reporter. Pada Mei 1997, tercatat telah terpasang 75 ribu terminal dan 70 kantor biro berita di seluruh dunia.

Keberhasilan Bloomberg membangun kerajaan bisnisnya tentu saja didukung oleh kepiawaiannya menciptakan suatu peluang. Sebagai seorang pebisnis dan kapitalis sejati, Bloomberg memiliki insting yang sangat tajam dan mental yang berani. Bloomberg memahami momentum perubahan yang terjadi dan kemudian memilih sasaran strategis yang bisa membawanya menuju posisi yang menguntungkan. Dengan memilih Merrill Lynch & Co. pada awal-awal bisnisnya, Bloomberg memahami bahwa untuk menguasai ular, yang harus dipegang terlebih dulu adalah kepalanya. Dan Merrill Lynch & Co. yang saat itu adalah pemimpin utama di pasar Wall Street adalah ular yang tak berkulit di tangan Bloomberg.

Kapitalisme, Aku Datang!

Someone once said, "Be nice to people on the way up; you'll pass the same ones on the way down." I believe in treating associates well, but not for that cynical reason: Having been both up and down repeatedly, my experience says you pass different people as you go through the inevitable cycle.

(Michael Bloomberg dari Bloomberg by Bloomberg, 1997)

Lahir di Brighton, Massachusetts pada 14 Februari 1942, Bloomberg menamatkan SMA di Medford, tak jauh dari kota kelahirannya. Dia lalu mendaftarkan diri sebagai mahasiswa teknik kelistrikan di Universitas Johns Hopkins (JHU) di Baltimore atas rekomendasi salah seorang anggota staf perusahaan elektronik di Cambridge, Massachusetts, tempat Bloomberg bekerja sambil semasa SMA. Selama menjadi mahasiswa di JHU, Bloomberg terbilang mahasiswa yang memiliki kemampuan akademis dengan nilai rata-rata tapi dia sebetulnya

lebih banyak menghabiskan waktunya di lingkungan sosial kampus ketimbang berkonsentrasi di bidang akademis.

Dia antara lain tercatat pernah bergabung dengan satu perkumpulan kampus bernama Phi Kappa Psi, dan didaulat menjadi presiden perkumpulan tersebut. Bloomberg juga pernah menjadi presiden untuk Dewan Antar-Perkumpulan kampus (Inter-Fraternity Council), dan menjadi ketua kelas. Karena keterlibatannya di banyak kegiatan dan pesta bersama perkumpulannya, tidak heran bila Bloomberg menjadi mahasiswa yang populer. Dia menyelesaikan kuliah di JHU pada 1964 dengan nilai rata-rata A tapi Bloomberg tidak berminat menjadi seorang insinyur. Dia sebaliknya meneruskan studi ke Harvard Business School (HBS) dan pada 1966 mendapatkan gelar Master of Business Administrasi (M.B.A.).

Itu bersamaan dengan operasi militer Amerika di Vietnam yang mengerahkan pemuda Amerika dalam wajib militer termasuk Bloomberg. Beruntung, dokter yang memeriksa kesehatan Bloomberg menyatakan, Bloomberg tidak bisa ikut wajib militer karena memiliki kelainan pada kakinya (*flat feet*). Atas saran teman baiknya, Steve Fenster (di belakang hari menjadi direksi di perusahaan Bloomberg), Bloomberg memasukkan lamaran kerja ke perusahaan Salomon Brothers dan Goldman, Sachs & Co. tapi dia memilih menerima dari Salomon Brothers. Gajinya US\$ 9.000 berikut pinjaman US\$ 2.500, dan Bloomberg bekerja sebagai staf administrasi yang melakukan pencatatan secara manual surat utang dan sertifikat saham yang akan dikirim ke pihak bank sebagai jaminan *overnight loans* untuk perdagangan keesokan hari.

Bagi Bloomberg yang lulusan HBS, kondisi itu tentu saja mengenaskan tapi dia tidak punya pilihan karena belum memahami seluk-beluk perdagangan saham di Wall Street. Bloomberg menyebut tempat kerjanya sebagai "*the case*," ruang lemari besi tanpa penyejuk udara. Tiga bulan di ruangan "*the case*," Bloomberg dipindah ke

bagian pembelian dan penjualan, dan di akhir pekan mendapat kesempatan berada di lantai bursa di bagian utilitas. Tugasnya melakukan pemutakhiran posisi *inventory* yang diperdagangkan, dan bertanggung jawab menyediakan pensil siap pakai untuk Ira Lichtman dan Connie Maniatty, *general partner* di Salomon untuk perdagangan surat utang. Satu bulan berikutnya, Bloomberg dipindahkan ke bagian ekuitas, dan dari sinilah dia memulai petualangannya di dunia perdagangan efek. Sebuah impian Amerika, di mana uang dalam jumlah besar bisa dihasilkan dalam hitungan menit hanya dengan memperdagangkan surat-surat saham. “*Capitalism, here I come!*”

Bekerja di Salomon Brothers, ada suatu kebiasaan yang dilakukan Bloomberg. Setiap hari, dia biasanya akan berangkat kerja menggunakan kereta bawah tanah dan tiba pukul 7 pagi di kantor. Tujuannya untuk menghemat 15 sen dan agar dia bisa membaca koran *Wall Street Journal* milik kantor karena pada jam 7 pagi belum ada karyawan yang datang kecuali Billy Salomon, sang bos. Tak hanya datang lebih awal setiap pagi, Bloomberg juga selalu pulang lebih akhir dari yang lain, kecuali dari John Gutfreund, orang nomor dua di Salomon Brothers. Karena kebiasaannya itulah, Bloomberg akrab dengan Billy dan Gutfreund. Di pagi hari dia menjadi teman bicara Billy sebelum rutinitas kantor dimulai, dan di waktu pulang dia berbincang dengan Gutfreund. Sering kali, Bloomberg ikut menumpang mobil Gutfreund.

Karir Bloomberg di Salomon Brothers, akan tetapi masih belum berubah, bahkan setelah dia bekerja selama enam tahun. Ketika Salomon Brothers mengeluarkan daftar status mitra baru pada Agustus 1972, nama Bloomberg juga tak muncul di daftar itu. Dia terpukul tapi tetap bekerja keras dan berusaha tetap tersenyum. Nasib baik mulai menghampirinya setelah tiga bulan dikeluarkannya daftar mitra baru Salomon Brothers. Bloomberg dipanggil ke kantor Billy dan diangkat sebagai mitra umum (*general partner*). Sejak itu, karirnya

menanjak cepat hingga enam tahun kemudian, kemampuan bekerja mulai dipertanyakan karena tidak lagi mendatangkan keuntungan bagi perusahaan.

Bersamaan dengan itu, Salomon Brothers merombak susunan dewan direksi yang berujung dengan pemindahan Bloomberg ke bagian sistem informasi. Di posisi barunya ini, Bloomberg bertanggung jawab atas gugus tugas sistem informasi yang mengelola seluruh catatan aktivitas perusahaan dan menyediakan alat analisis yang diperlukan bagi para pedagang saham dan personel pemasaran. Posisi ini dipegang Bloomberg hingga dia dipecat pada 1981 dan mendapat pesangon US\$ 10 juta.

Kekayaan, Politik, dan Filantropi

People need to understand that life, like it or not, has to be Quid Pro Quo.

(Michael R. Bloomberg dari Bloomberg by Bloomberg, 1997)

Kini, Bloomberg adalah salah satu penguasa di industri media dan layanan data keuangan di dunia dengan jaringan yang tersebar hampir di seluruh dunia. Kekayaan pribadinya pribadi US\$ 18 miliar dan terus bertambah. Majalah *Forbes* menempatkannya sebagai salah seorang terkaya di dunia. Dengan semua kemasyhuran (terkenal dan kaya), Bloomberg ikut menginvestasikan kekayaannya untuk mendanai berbagai kegiatan sosial, budaya, ilmu pengetahuan, teknologi dan sebagainya. Investasinya dalam kegiatan filantropi (amal) dikelola lewat yayasan yang didirikannya dan lewat program-program inisiatif.

Dia antara lain mendirikan Bloomberg Family Foundation dan memercayakan sebagian pengelolaan dana filantropinya kepada

Carnegie Corporation of New York. Menurut *The Chronicle of Philanthropy*, sejak 2004, Bloomberg masuk dalam daftar 50 penyumbang paling top di Amerika dengan total nilai donasi lebih dari US \$ 1,4 miliar. Pada 2010, posisi sebagai penyumbang top berada di urutan kedua setelah George Soros.

**Catatan Peringkat dan Nilai Donasi Michael R. Bloomberg
Periode 2004-2010**

Tahun	Peringkat	Total Donasi
2010	2	US\$ 279,2 juta
2009	4	US\$ 254 juta
2008	9	US\$ 235 juta
2007	7	US\$ 205 juta
2006	10	US\$ 165 juta
2005	8	US\$ 144 juta
2004	10	US\$ 138 juta

Sumber: *The Chronicle of philanthropy* (philanthropy.com/article/philanthropy50/126107/)

Bloomberg kemudian menjadi figur filantropis papan atas Amerika dengan kepemilikannya sebesar 88 persen di Bloomberg LP yang mencetak pendapatan US\$ 6,9 miliar (2010). Citranya sebagai sosok dengan kekayaan berlimpah dan kedermawanannya kemudian membawa Bloomberg terjun ke dunia politik. Pada 2001, Bloomberg mengikuti pemilihan wali kota New York. Dengan semua dukungan finansial dan imaji nama dan sosoknya yang kuat, dia terpilih sebagai wali kota New York. Bukan hanya sekali, melainkan selama tiga kali berturut-turut.

Semula Bloomberg tercatat sebagai orang Partai Demokrat, tapi ketika mengikuti pemilihan wali kota New York itu, dia lebih

memilih bergabung di bawah bendera Partai Republik. Partai yang mengantarkannya menjadi wali kota New York selama dua kali berturut-turut itu pun, belakangan juga dia tinggalkan. Dia menyatakan independen saat mencalonkan diri sebagai wali kota New York untuk ketiga kalinya. Lalu pada musim pemilihan presiden Amerika 2008, muncul spekulasi bahwa Bloomberg akan mencalonkan diri, kendati spekulasi itu tidak pernah terbukti.

Dengan semua sikap politik Bloomberg yang mudah meloncat dari partai yang satu ke partai yang lain, tentu sulit untuk mengatakan, dia adalah seorang loyalis. Bagi Bloomberg politik adalah sebuah peluang yang harus dihitung untung-ruginya, sama seperti ketika dia memperdagangkan saham di lantai bursa Wall Street. Dan itulah yang terjadi ketika dia berhasil mengubah peraturan Dewan Kota tentang masa jabatan wali kota.

Kisahnyanya terjadi ketika masa jabatannya yang kedua sebagai wali kota New York akan segera berakhir. Dia mengumumkan akan mencalonkan kembali sebagai wali kota New York pada 2 Oktober 2008. Bloomberg sadar, niatnya itu akan membentur peraturan Dewan Kota yang melarang seseorang menjabat wali kota selama tiga kali berturut-turut. Akan tetapi dengan semua jaringan lobi dan kekayaannya, Bloomberg berhasil memengaruhi para tokoh di New York dan Amerika untuk merombak peraturan Dewan Kota. Alasan dia, di tengah krisis keuangan yang menghantam Wall Street dan Amerika saat itu, kapasitas kepemimpinan dan pengalamannya sebagai wali kota tetap dibutuhkan untuk mengendalikan New York agar tidak terseret dalam krisis ekonomi.

Ada 30 tokoh papan atas Amerika yang mendukung ide Bloomberg itu, termasuk David Rockefeller, eks sekretaris Henry Kissinger, dan CEO J.P. Morgan (waktu itu), Chase Jamie Dimon. Mereka memublikasikan surat terbuka untuk mendesak Dewan Kota memperpanjang batas periode jabatan wali kota New York. Hasilnya

cukup mencengangkan: sebanyak 27 orang dari 51 anggota Dewan Kota menyatakan mendukung gagasan perubahan pembatasan masa jabatan wali kota New York, seperti yang diusulkan Bloomberg. Lalu pada tahun berikutnya, Bloomberg benar-benar maju sebagai calon wali kota New York dan terpilih. Dia mengantongi 51 persen suara mengalahkan calon yang diusung Partai Demokrat dan Partai Keluarga Pekerja, yang hanya mendapat 46 persen suara.

Tentu semua tidak gratis. Untuk ambisi politiknya itu, Bloomberg telah menghabiskan US\$ 90 juta untuk kepentingan kampanye dan sebagainya. Belakangan warga New York juga dikejutkan dengan pemberitaan media, tentang aliran dana senilai US\$ 750 ribu dari Bloomberg kepada Partai Republik. Dana itu mengalir melalui Special Elections Operations LLC, perusahaan konsultan yang dikelola John Haggerty Jr., fungsionaris Partai Republik. Kasus aliran dana ini kemudian masuk pengadilan sebagai kasus penggelapan. Haggerty Jr. menghadapi ancaman hukuman 15 tahun penjara.

Belum ada penjelasan, apakah Partai Republik terlibat dalam kemenangan Bloomberg sebagai wali kota New York untuk ketiga kalinya. Namun sebagai politisi dan wali kota New York, platform kebijakan dan advokasi yang dilakukan Bloomberg dapat dilihat, berjalan paralel dengan platform Partai Republik ataupun Partai Demokrat yang menjadi kekuatan politik mayoritas di Amerika. Bloomberg bahkan bisa dibilang sangat liberal dalam pandangannya terhadap isu-isu sosial, tapi sangat konservatif untuk isu-isu domestik, ekonomi, dan kebijakan luar negeri. Dan sebagai wali kota New York, Bloomberg mengeluarkan banyak kebijakan kontroversial, yang saling berbenturan.

Isu Kebijakan Defisit Anggaran Kota New York

Ketika pemerintah kota New York mengalami defisit anggaran US\$ 6 miliar pada awal masa jabatannya 2001, Bloomberg

menaikkan pajak properti dan melakukan pemotongan anggaran di seluruh departemen pemerintah kota, kecuali departemen kepolisian dan kebakaran. Sebagai gantinya, melalui kegiatan amal, Bloomberg memberikan dana bantuan ke banyak organisasi yang terkena imbas kebijakan tersebut. Kebijakan untuk memotong anggaran ataupun menaikkan pajak di mana pun itu bukan menjadi kebijakan yang populer bagi publik dan menguntungkan secara politis. Namun Bloomberg adalah seorang miliuner, yang dengan kekayaan pribadi dan kendaraan filantropinya mampu meredam gejolak yang mungkin akan membahayakan karir politiknya.

Isu Kebijakan Pendidikan

Di bidang pendidikan, sepanjang 2002-2010, Bloomberg melakukan sejumlah perubahan. Antara lain menempatkan kendali pendidikan langsung di bawah otoritas wali kota, menghapus program sosial promosi (kenaikan kelas berdasarkan alasan sosial), memberikan insentif kenaikan gaji guru sebesar 15 persen apabila nilai ujian dan tingkat kelulusan siswa meningkat. Namun kebijakan anggaran pendidikan melalui pemotongan anggaran bertolak belakang dengan tujuan meningkatkan kualitas pendidikan. Dan sejak 2002, Bloomberg telah menutup paling tidak 90 unit sekolah (sebagian besar berada di lingkungan kumuh dan minoritas) karena dianggap tak memberikan performa yang baik. Situs New York Times pada 23 Agustus 2001 menulis, 780 orang pekerja sekolah dan lingkungan pendidikan terancam akan kehilangan pekerjaan pada bulan Oktober. Namun, sekali lagi, di tengah gejolak yang ditimbulkan dari kebijakan tersebut, Bloomberg melakukan manuver melalui inisiatif filantropinya. Agustus 2011, bersama George Soros, dia mengumumkan

akan menginvestasikan dana senilai US\$ 30 juta untuk melaksanakan program membantu generasi muda dari kalangan minoritas untuk mendapat kesempatan pendidikan dan pekerjaan yang lebih baik.

Isu Kebijakan Mariyuana untuk Medis dan Rekreasi

Gerakan legalisasi mariyuana atau ganja telah dimulai sejak awal 1990, tapi baru bergerak secara masif antara 1992-1993 ketika George Soros menginvestasikan dana pribadinya senilai US\$ 15 juta lewat yayasan Open Society Institute. Yayasan itu bertugas mengadvokasi isu kebijakan legalisasi ganja. Pada 2002, NORML Foundation menghabiskan dana US\$ 500 juta untuk biaya iklan dukungan kebijakan legalisasi ganja. Gambar iklannya adalah Bloomberg bersama kutipannya yang populer "You bet I smoked pot; and I enjoyed it." Kutipan tersebut diambil dari hasil wawancara New York Magazine pada 2001 saat Bloomberg mencalonkan diri sebagai wali kota. Kepada New York Times (10 April 2002) Bloomberg mengatakan, dirinya percaya dekriminialisasi marijuana bukanlah ide yang bagus. Namun dia sama sekali tidak menolak penggunaan figurinya dalam kampanye NORML.

Isu Hak Aborsi

Bloomberg aktif memberikan dukungan memperjuangkan hak aborsi bagi perempuan. Seperti dikutip The Sun New York edisi 28 April 2006, Bloomberg mengatakan "Reproductive choice is a fundamental human right and we can never take it for granted. On this issue, you're either with us or against us." Pada 16 Maret 2011, Bloomberg menandatangani peraturan Kota New York untuk melegalkan tindakan aborsi bagi warganya.

Isu Perkawinan Sesama Jenis

Bloomberg mendukung ide tentang perkawinan sesama jenis, dan pada Juni 2011 menjadikan New York resmi menjadi kota ke-6 di Amerika yang melegalkan perkawinan sesama jenis. Alasan Bloomberg “siapa pun boleh mengawini siapa pun, tidak peduli jenis kelaminnya.” Bloomberg berpandangan pemerintah tidak boleh mengintervensi pasar bebas, private association, termasuk perjanjian antarpihak yang saling menyetujui seperti halnya perkawinan.

Isu Hukuman Mati

Pada 2005, menanggapi pertanyaan tentang hukuman mati terhadap kasus pembunuhan terhadap petugas polisi New York, Bloomberg mengatakan dirinya lebih baik mengurung seseorang dan membuang kuncinya kemudian menemukannya untuk kerja paksa dan menentang hukuman mati. Bloomberg berpendapat melihat suatu potensi lain dari seorang kriminal daripada harus dihukum mati. Antara lain bisa menjadi sumber daya pekerja yang sangat ekonomis.

Isu Kebijakan Imigran

Meski pun masalah imigran telah menciptakan persoalan tersendiri bagi Amerika, Bloomberg menolak ada pembatasan imigran. Dia menilai, kontrol perbatasan yang ketat sebagai tindakan melawan hukum alam dari supply and demand, dan insting alami manusia untuk mencari kebebasan dan peluang yang menjadi jiwa tanah air Amerika. Kebijakan pembatasan imigran karena itu dianggap sebagai tindakan bunuh diri nasional. Bloomberg yang begitu gencar mendorong nilai-nilai globalisasi berpendapat, imigrasi merupakan faktor esensial bagi perekonomian, sebagai sumber daya tenaga

kerja, progresivitas pasar, dan asimilasi budaya. Dia karena itu bergabung dengan koleganya, Rupert Murdoch, kemudian mendorong terwujudnya reformasi hukum imigrasi di Amerika.

Isu Kebijakan Lingkungan dan Pemanasan Global

Pada 2007, Bloomberg memprakarsai program jangka panjang kota New York sebagai kota ramah lingkungan untuk merespons isu pemanasan global, yang disebut PlaNYC. Salah satu kebijakannya adalah mengonversi 30 ribu unit taksi berteknologi bahan bakar minyak menjadi berteknologi hibrida. Bloomberg juga mengeluarkan proposal biaya masuk kendaraan senilai US\$ 8 untuk mengurangi minat penggunaan kendaraan pribadi dan mendorong penggunaan sarana transportasi publik. Juli 2011, Bloomberg juga memelopori program untuk memerangi penggunaan batu bara. Dia menyediakan dana US\$ 50 juta bagi Sierra Club's Beyond Coal Campaign untuk mendukung advokasi menghentikan penggunaan batu bara dan menutup tambang batu bara yang ada.

Isu Kebijakan Perdagangan Bebas

Sebagai seorang industrialis sekaligus politisi Amerika, Bloomberg aktif dalam mendorong kebijakan perdagangan bebas dan menolak bentuk-bentuk proteksionisme dalam perdagangan sebagai wujud kekuatan ekonomi Amerika. Seperti yang diungkapkan dalam artikelnya di Financial Time pada 11 Desember 2007, "It is easy to say that times have changed and take a more protectionist viewpoint. In fact, times have changed. Dramatic advances in technology and increased global trade are creating enormous economic opportunities, but also challenges. If America is to remain

the world's economic superpower, it must capitalize on the opportunities and confront the challenges. Countries that run away from globalization will pay a heavy price for decades to come.”

Bloomberg paham, tanpa perdagangan bebas, ekonomi kapitalisme Amerika tidak akan menjadi kekuatan ekonomi superior di dunia. Tanpa perdagangan bebas, para penguasa modal di Amerika yang menguasai industri raksasa multinasional akan mengalami hambatan dalam meningkatkan pertumbuhan investasi. Mengandalkan potensi dalam negeri Amerika yang terbatas tentu hanya akan membawa pertumbuhan kapitalisasi industri milik penguasa modal berada pada kondisi stagnasi. Sementara itu, untuk bisa berekspansi memperluas peluang, agenda perdagangan bebas dan globalisasi menjadi faktor penting. Dan untuk menyuksekkannya, hambatan proteksi atas nama kepentingan nasional suatu negara harus dihilangkan.

Isu Kebijakan Kesehatan Publik

Untuk isu kesehatan publik Bloomberg memprioritaskan penanganan HIV/AIDS, diabetes, dan hipertensi dengan mengeluarkan berbagai kebijakan yang cukup radikal. Antara lain melarang penggunaan trans-fat dan garam secara berlebihan oleh restoran, dan yang paling spektakuler adalah larangan merokok di bar dan restoran, dan di ruang terbuka New York lainnya seperti taman kota dan daerah pantai. Kebijakan anti-tembakau ini, kemudian menjadi salah satu agenda utama Bloomberg dan jangkauannya diperluas hingga ke banyak negara.

Dari semua isu yang menjadi perhatian Bloomberg, tampak jelas adanya sebuah ironi karena pertentangan nilai filosofis. Ketika Bloomberg bicara tentang hak-hak sipil atau hak asasi seseorang ketika melegalkan aborsi, dan perkawinan sesama jenis, dasar filosofi Bloomberg adalah *pro-choice*. Dari kedua kebijakan itu, bisa dilihat bahwa Bloomberg adalah seorang liberal.

Apakah kemudian Bloomberg menjadi seorang *pro-life* ketika menolak hukuman mati yang diselaraskan dengan kepentingan seorang industrialis ketika melihat potensi tenaga kerja bebas biaya? Apakah pandangan Bloomberg tentang kebijakan hak aborsi dan perkawinan sesama jenis adalah cara efektif untuk mengendalikan populasi yang berakibat pada tingginya biaya layanan publik? Faktanya, Bloomberg membela Cathie Black (New York City School Chancellor) yang mengeluarkan pernyataan kontroversial: “Salah satu solusi menyelesaikan karut-marut dunia pendidikan yang diakibatkan populasi adalah melalui pengendalian kelahiran (*birth control*).”

Dalam hal pelarangan atau pembatasan konsumsi lemak jenuh (minyak goreng), garam, dan rokok (yang semuanya atas nama kesehatan publik), Bloomberg telah menempatkan warga New York sebagai obyek yang tidak mampu mengurus diri sendiri sehingga sebagai wali kota, dia karena itu harus mengatur perilaku dan pola hidup mereka. Padahal dalam hal dukungan terhadap perkawinan sesama jenis, Bloomberg jelas mengatakan, pemerintah tidak seharusnya mengintervensi nilai-nilai yang menjadi hak warganya. Itu pula yang dilakukan Bloomberg, ketika mengeluarkan kebijakan larangan merokok di dalam dan di luar ruangan. Dengan tetap menempatkan rokok sebagai komoditas legal yang diperjualbelikan, hak sipil konsumen rokok kemudian dikecualikan dari konteks kepentingan publik.

Lalu, pada 2 April 2003, otoritas Kota New York merilis pengumuman mengenai program pembagian produk terapi pengganti nikotin

(NRT) dan kursus bagaimana cara menggunakannya secara gratis kepada 35 ribu warga New York untuk menghentikan kebiasaannya merokok. Sejak lama, NRT sudah diindikasikan menjadi motif utama gerakan antirokok di mana terlibat kepentingan industri farmasi untuk meningkatkan penjualan produk NRT mereka. Kebijakan yang dipimpin Bloomberg itu, seperti menjadi bagian dari kegiatan pemasaran dalam format contoh produk bagi para konsumen rokok. Apakah Bloomberg di sini membawa kepentingan industri farmasi yang pastinya mendapat keuntungan dari penjualan NRT?

Terkait isu pemanasan global, pada 2004, emporium miliknya, Bloomberg L.P., membuka divisi fitur baru dalam layanan terminal data, yaitu Bloomberg New Energy Finance. Fitur ini bertujuan memberikan analisis dan data keuangan untuk menciptakan nilai strategis dan membantu para pelanggan guna mengidentifikasi peluang di bidang inovasi energi baru ramah lingkungan dan pasar karbon. Momentum pemanasan global apabila dilihat dari kaca mata bisnis tentu merupakan peluang pada masa depan, ketika gerak perekonomian didorong mengikuti kecenderungan digunakannya bahan bakar ramah lingkungan.

Itu sama halnya dengan kebijakan proteksi terkait isu perdagangan bebas. Amerika adalah negara yang memiliki kebijakan proteksi terhadap kepentingan industrinya. Ini termasuk kebijakan proteksi di industri tembakau yang oleh Bloomberg dinyatakan sebagai musuh publik. Sementara itu negara-negara lain, khususnya negara berkembang, didorong untuk melakukan deregulasi terkait kebijakan proteksinya.

Dari berbagai kebijakan yang dikeluarkan maupun dukungan terhadap isu-isu lain, agak susah melihat kiblat dari pendirian politik dan idealisme seorang bernama Bloomberg. Tampak jelas Bloomberg mencoba membidik hampir semua segmen masyarakat New York, yang kemudian memberikan insentif lewat advokasi isu dan kebijakan

yang dikeluarkannya. Pragmatisme sikap politik semacam ini dapat dilihat sebagai langkah strategis mengakomodasi kepentingan masing-masing segmen yang akan meningkatkan popularitas dan dukungan terhadap karir politiknya. Ketika terjadi pertentangan filosofis atas kebijakannya, Bloomberg menempatkan persoalan tersebut sebagai bagian dari dinamika nilai yang terjadi di masyarakat.

Itu seperti halnya ketika kebijakan anti-tembakau, yang apabila dilihat lebih jauh tidak sejalan dengan kebijakan proteksi yang berlaku di industri tembakau Amerika (lihat *Salamudin Daeng dkk.*, 2011). Bahkan, kontradiksi tersebut berlanjut ketika pada 2010, pemerintah Amerika melakukan pelarangan impor kretek, rokok khas Indonesia. Ironisnya, alasan larangan tersebut disebabkan kretek termasuk ke dalam kategori rokok beraroma yang dianggap bisa mendorong minat remaja untuk merokok. Sementara itu, rokok mentol yang diproduksi di Amerika yang juga masuk dalam kategori yang sama tidak dilarang untuk diperjualbelikan di pasar rokok Amerika. Kebijakan ini tentu bertentangan dengan semangat perdagangan bebas, yang diatur dalam perjanjian Hambatan Teknis Perdagangan (TBT) oleh Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Celakanya, meski dinilai sangat berlebihan dan merugikan sebagian pihak, agenda anti-tembakau menjadi kabar gembira bagi pihak lain yang mendapat insentif dan manfaat. Ini seperti kepentingan industri farmasi dan tembakau yang secara langsung ataupun tidak mendapat keuntungan dari dampak kebijakan tersebut.

Singkat kata, lewat berbagai sepak terjangnya, Bloomberg meramu sumber daya kekayaan, politik, dan filantropinya menjadi suatu integrasi kekuatan untuk memainkan setiap momentum agar memiliki nilai yang berpihak kepada kepentingannya. Tipikal Bloomberg yang mampu bermain di dua peran sekaligus ini, dapat dilihat dari jejaknya mengelola emporium Bloomberg L.P. yang mengelola dua basis segmen yang saling berinteraksi yaitu penjual dan pembeli.

Juga di dunia politik, ketika dia meninggalkan Partai Demokrat dan Partai Republik tapi justru mengelola konflik kepentingan dengan mengakomodasi masing-masing kepentingan tanpa dibebani batas-batas keberpihakan seorang loyalis partai. Sikap semacam ini tentu memberikan ruang bagi Bloomberg untuk meraih manfaat dari kedua sisi, sekaligus mendominasi dinamika yang terjadi akibat interaksi keduanya.

Dari titik ini, bisa diketahui pula, pragmatisme pendirian sosial-politik Bloomberg sebetulnya berkorelasi kuat dengan pembentukan dinamika kepentingan ekonomi kapitalistis yang dibutuhkan industrialis penguasa modal Amerika. Dan dengan kapasitasnya sebagai seorang kapitalis, filantropis, dan politisi, Bloomberg leluasa ikut mengendalikan dinamika kepentingan di tiap-tiap dimensi. Dia bukan saja menguasai sumber daya informasi, yang bisa menggerakkan kecenderungan ekonomi global untuk memberikan keuntungan bagi para industrialis penguasa modal, tapi gerakan filantropisnya ikut pula mengatur nilai-nilai sosial yang secara simultan diarahkan untuk dinamika kepentingan ekonomi kapitalisme Amerika.

Di Balik Kampanye Anti-Tembakau

“No one has enough intellectual honesty to do so any way. We always assume that ‘it will all work out’. Some trends, however, are so certain, they’re coming no matter what, and we’ll just have to learn to live with them and adjust our behavior accordingly.

(Michael R. Bloomberg dari Bloomberg by Bloomberg, 1997)

Tentu saja dari semua isu kebijakan Bloomberg, yang paling menonjol adalah perannya dalam gerakan anti-tembakau. Gerakan ini dia mulai pada 30 Desember 2002 atau tak lama setelah dia menjabat wali kota untuk kali pertama, dengan mengeluarkan peraturan kota

mengenai udara bersih. Peraturan yang berlaku efektif 31 Maret 2003 ini melarang kegiatan merokok dalam ruangan tertutup hampir di semua tempat publik di New York, termasuk perkantoran, bar, restoran, dan klub malam. Peraturan ini disusul dengan peraturan berikutnya yang ditetapkan pada 2 Februari 2011. Isinya pelarangan merokok di luar ruangan yang meliputi 1.700 lokasi taman kota dan 14 mil sepanjang garis pantai New York.

Akan tetapi perang Bloomberg terhadap rokok tidak hanya berhenti untuk pembatasan di New York. Pada 2006, dia menginvestasikan dana US\$ 125 juta dalam bentuk hibah untuk Bloomberg Initiative to Reduce Tobacco Use. Dua tahun berikutnya kembali dia menggelontorkan dana US\$ 250 juta untuk Bloomberg Initiative untuk mengampanyekan gerakan global anti-tembakau. Gerakan ini bekerja sama dengan Gate Foundation yang diketuai oleh Bill Gate, pendiri perusahaan perangkat lunak raksasa Microsoft yang ikut menginvestasikan dana US\$ 125 juta. Jadi, total dana yang diinvestasikan untuk Bloomberg Initiative to Reduce Tobacco Use-Grants Program mencapai US\$ 500 juta.

Dana-dana itu kemudian didistribusikan untuk menyokong gerakan global anti-tembakau di seluruh dunia yang dikelola melalui lima mitra utama yaitu Campaign for Tobacco-Free Kids (Washington), Johns Hopkins University School of Public Health (Baltimore), US Centre of Disease Control & Prevention Foundation (Atlanta), World Health Organization Tobacco-Free Initiative (Geneva), dan World Lung Foundation and The International Union Against Tuberculosis and Lung Disease (New York dan Paris).

Ada pun Bloomberg Initiative telah beroperasi di lebih 50 negara termasuk Indonesia. Agenda utamanya adalah memaksimalkan kapasitas gerakan anti-tembakau dalam mengintervensi kebijakan pengendalian tembakau di negara-negara sasaran sesuai dengan Konvensi Kerangka Pengendalian Tembakau atau FCTC. Bloomberg

Initiative diimplementasikan dalam bentuk pembiayaan proyek advokasi bagi lembaga-lembaga, baik lembaga negara maupun lembaga swadaya masyarakat, yang memiliki program mendorong implementasi ataupun memaksimalkan kebijakan anti-tembakau di negaranya. Ini mengacu pada ketentuan dalam FCTC yang diprakarsai WHO pada 2003.

Daftar Negara Penerima Dana Hibah Bloomberg Initiative

NO.	NEGARA	JUMLAH (US\$)
1.	India	9.393.498
2.	China	7.631.253
3.	Indonesia	5.559.203
4.	Meksiko	4.693.818
5.	Filipina	4.278.009
6.	Bangladesh	3.896.127
7.	Vietnam	3.357.456
8.	Brasil	2.728.906
9.	Thailand	2.674.559
10.	Rusia	2.504.022
11.	Pakistan	1.848.482
12.	Turki	1.773.552
13.	Polandia	1.633.340
14.	Mesir	1.520.944
15.	Ukraina	1.418.946
16.	Jamaica	1.272.874
17.	Argentina	970.530
18.	Chad (Afrika)	839.125
19.	Laos	693.051
20.	Sri Lanka	691.706
21.	Afrika Selatan	517.057
22.	Uruguay	511.188

NO.	NEGARA	JUMLAH (US\$)
23.	Kenya	507.150
24.	Georgia	465.594
25.	Romania	449.086
26.	Paraguay	418.831
27.	Kolombia	387.494
28.	Ekuador	376.197
29.	Lebanon	375.806
30.	Nepal	316.858
31.	Tanzania	310.062
32.	Peru	309.800
33.	Guatemala	285.525
34.	Cile	259.715
35.	Kamboja	208.144
36.	Burkina Faso	192.452
37.	Ghana	183.137
38.	Moldova	160.720
39.	Kosta Rika	145.645
40.	Zambia	130.420
41.	Mauritius	130.000
42.	Azerbaijan	116.109
43.	Kazakhstan	106.000
44.	Madagaskar	96.669
45.	Niger	94.900
46.	Togo	90.000
47.	Mozambique	50.000
48.	Guyana	32.414
49.	Malaysia	19.200
50.	Honduras	7.308

*Sumber: Diolah dari situs resmi
Bloomberg Initiative tobaccocontrolgrants.com/Pages/40/What-we-fund*

Selain kegiatan yang dikelola oleh lima mitra utama tersebut, Bloomberg Initiative juga membuka pendaftaran (*call for entry*) setiap tahun, untuk mengajukan proposal program kegiatan pengendalian tembakau. Kriteria proposal yang diajukan adalah program yang bertujuan khusus terkait regulasi anti-tembakau di suatu negara. Lembaga-lembaga penerima dana Bloomberg Initiative tersebut akan melakukan pendampingan kepada lembaga-lembaga negara strategis untuk membentuk regulasi anti-tembakau. Selain itu juga kegiatan litigasi yang mendukung implementasi kebijakan anti-tembakau.

Tentu keterlibatan dan dukungan Bloomberg secara finansial yang angkanya sangat fantastis itu menimbulkan pertanyaan: Apa motif Bloomberg yang sesungguhnya? Pertanyaan ini penting, karena Bloomberg tidak hanya mengambil peran dalam peperangan tembakau bagi warga New York dan Amerika, tapi juga secara global. Padahal sebelumnya, kiprah Bloomberg dalam gerakan anti-tembakau tidak begitu signifikan.

Itu berbeda dengan Bill Gates, yang keikutsertaannya dalam agenda global perang anti-tembakau telah memunculkan kritik dari beberapa pihak. Sebuah artikel berjudul “Global Health Philanthropy and Institutional Relationships: How Should Conflicts of Interest Be Addressed?” yang dipublikasikan *plosmedicine.org* 12 April 2011, mengkritik keterlibatan Bill Gates dalam kampanye anti-tembakau karena berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dengan korporasi besar lewat platform investasi.

Dana yang digunakan dalam operasi Bill & Melinda Gates Foundation berasal dari kekayaan pribadi Bill Gates dan saham di Berkshire Hathaway atas pemberian Warren Buffet. Tidak tanggung-tanggung, pada 2006, Warren Buffet memberikan seluruh kepemilikan sahamnya di Berkshire Hathaway kepada Gates Foundation. Lalu, pada 2010, ditambahkan lagi sebanyak 24,7 miliar saham. Jadi, Gates Foundation memiliki 10 persen hak kepemilikan dari Berkshire

Hathaway. Selain itu, pada akhir 2008, dana yang dikelola manajemen Gates Foundation mencapai nilai US\$ 26,9 miliar. Dana ini tersebar di beberapa platform investasi, yaitu US\$ 13,5 miliar di saham korporasi, US\$ 1,8 miliar di surat utang korporasi, US\$ 6,1 miliar di surat utang pemerintah Amerika, dan US\$ 8,2 miliar dalam bentuk tanah, saham jangka pendek, serta investasi lain.

Daftar Investasi Bill & Melinda Gates Foundation

Entity	Holding	Portfolio Rank	US Dollars, Billion	Portfolio Share	Company Share
Bill & Melinda Gates Foundation Trust	Berkshire Hathaway	1	5.89	49.75%	3.19%
	McDonald's	2	0.62	5.21%	0.88%
	Coca-Cola	4	0.51	4.31%	0.44%
	Waste Management	5	0.49	4.15%	3.25%
	Walmart	7	0.44	3.75%	0.13%
	Coca-Cola FEMSA	9	0.35	2.97%	2.47%
	Costco	10	0.34	2.83%	1.39%
	Monsanto	>20	0.02	0.19%	0.20%
	Total	—	11.85	—	—
	Berkshire Hathaway	Coca Cola	1	10.0	21.58%
Procter & Gamble		4	4.7	10.08%	2.75%
Kraft Foods		5	2.9	6.34%	6.03%
Johnson & Johnson		6	2.4	5.25%	1.50%
Walmart		7	1.9	4.04%	1.07%
Nestle		23	0.16	0.35%	0.09%
Sanofi-Aventis		29	0.12	0.26%	0.15%
GlaxoSmithKline		34	0.05	0.11%	0.06%
Total		—	46.44	—	—

Notes: (1) Because one-half of Gates endowment is held in Berkshire Hathaway, a figure which will rise in the future, we also report the holdings of Berkshire Hathaway. Data retrieved from <http://www.sec.gov/edgar.shtml> (accessed 30 June 2010). Company share calculated based on dividing number of shares held by total company shares outstanding. See Text S4 for full listing of stock holdings. (2) The largest stock-related holding of Ford Foundation is in MFO capital international emerging markets (~\$400 million) and TCW strategic mortgages (~\$490 million); of Rockefeller Foundation is in Adage Capital Partners (~\$98 million); and of W. K. Kellogg is in Kellogg stock, a producer of snack foods and cereals (\$4.1 billion). Robert Wood Johnson Foundation's main stock holding reported to the SEC is in Johnson & Johnson, valued at over \$800 million.
doi:10.1371/journal.pmed.1001020.t003

Sumber: plosmedicine.org/article/slideshow.action?uri=info:doi/10.1371/journal.pmed.1001020&imageURI=info:doi/10.1371/journal.pmed.1001020.t003

Memotret jejaring relasi Gates Foundation dengan korporasi besar dan metode pengelolaan sumber daya keuangan yang digunakan untuk operasi kegiatan filantropinya memberikan sebuah perspektif terhadap bagaimana sebuah kegiatan filantropi dijalankan. Definisi “sumbangan” dalam konteks kegiatan amal dari sebuah gerakan filantropi tidaklah semata-mata “sumbangan”. Lebih jauh, ini bisa diartikan sebagai sebuah investasi. Layaknya investasi, dengan logika

bisnis sederhana, tentu ada ekspektasi terhadap pengembalian investasi (*return on investment* atau ROI). Sebagai sebuah lembaga nonprofit, ekspektasi ROI dari kegiatan investasi tentu bukan semata-mata keuntungan finansial. Selain aktivitas investasi tersebut menjadi sebuah pola dalam menjaga kontinuitas dan pertumbuhan skala sumber daya keuangan untuk operasinya, dampak dari operasi filantropi yang dilakukan tentu memiliki nilai strategis bagi kepentingan yang terasosiasi.

Mengacu pada pemahaman tersebut, muncul pertanyaan apakah kegiatan-kegiatan filantropi yang dilakukan orang-orang kaya tersebut bebas nilai? Terkait topik pembahasan, apakah sepak terjang Bloomberg dalam kegiatan filantropinya tidak memiliki motif-motif kepentingan lain?

Ketika Bloomberg mencalonkan diri sebagai wali kota New York pada 2001, salah satu isu kampanyenya adalah aspek kesehatan publik. Platform itu juga sejalan dan didukung penuh oleh almamaternya, JHU, yang menjadi mitra utamanya dalam Bloomberg Initiative. Dukungan itu terlihat ketika pada tahun yang sama mereka memberikan anugerah kehormatan dengan menambahkan nama Bloomberg untuk menamai salah satu lembaga bidang kesehatan publik: Johns Hopkins University Bloomberg School of Public Health. Penganugerahan tersebut tentu saja memberikan legitimasi yang kuat terhadap pencitraan Bloomberg sebagai seorang pejuang kesehatan publik dan terhadap platform kebijakannya yang didukung sebuah lembaga besar sekelas JHU.

Dalam siaran persnya, 21 April 2001, JHU menyebutkan keputusan menggunakan nama Bloomberg tidak lepas dari dana ratusan juta dolar yang didonasikan oleh Bloomberg. Faktanya, pada 1995, Bloomberg menyumbangkan US\$ 100 juta untuk JHU dan disusul US\$ 45 juta pada tiga tahun berikutnya. Bloomberg juga mendukung program riset yang terkait dengan pengembangan bio-medikal, salah satunya

program *embryonic stem cell research* yang dilakukan JHU dengan mendonasikan dana senilai US\$ 100 juta. Majalah *Forbes* menulis, dana yang disumbangkan oleh Bloomberg untuk JHU mencapai US\$ 300 juta. Sebagai wali kota New York, dia juga meneruskan jejak pendahulunya Rudolph Giuliani, dengan menyediakan lahan seluas lebih dari 8 juta hektare untuk pengembangan laboratorium dan investasi baru bagi perusahaan *bio-tech*.

Menarik ditelusuri peran JHU sebagai salah satu lembaga riset dan pendidikan di bidang medis dan kesehatan publik, yang ternyata memiliki peran penting dalam kampanye global anti-tembakau. Awalnya adalah gagasan mengenai sebuah hukum internasional pengendalian tembakau yang muncul pada pertengahan 1990-an. Ide ini berasal dari empat orang akademisi dan aktivis anti-tembakau, antara lain Ruth Roemer, Allyn Taylor, Derek Yach, dan Judith Mackay. Kecuali Mackay, tiga orang lainnya memiliki hubungan dengan JHU. Ruth Roemer adalah profesor dari UCLA School of Public Health, istri dari Milton Roemer yang memiliki kedekatan khusus dengan Henry Sigerist, profesor bidang sejarah medis di JHU. Taylor adalah profesor bidang hubungan internasional di JHU, Paul H. Nitze School of Advanced International Studies. Ada pun Derek Yach, alumnus JHU Bloomberg School of Public Health. Saat ini dia juga tercatat sebagai Senior Vice President Global Health Policy Pepsi Co. dan sebelumnya menjabat Ketua Global Health at the Rockefeller Foundation.

Lalu sejak 1998, JHU mendirikan sebuah lembaga yang bernama Institute for Global Tobacco Control yang berpusat di Johns Hopkins University Bloomberg School of Public Health. Peran dari lembaga ini adalah menghasilkan, mensintesis, dan menerjemahkan bukti-bukti ilmiah yang kemudian digunakan untuk mendukung dan memengaruhi kebijakan, program, dan kegiatan pengendalian tembakau global. Pada 1998, ketika WHO fokus kepada tembakau sebagai masalah kesehatan dunia lewat Free Tobacco Initiative,

lembaga ini dipimpin Gro Harlem Brundtland, alumnus JHU. Bahkan, lahirnya FCTC juga tidak lepas dari sepak terjang tokoh-tokoh yang terkait langsung dengan JHU.

Salah satu catatan yang mendokumentasikan kiprah Bloomberg dalam gerakan anti-tembakau sebelum periode politiknya, ketika dia tercatat sebagai salah satu peserta undangan pertemuan antara Komite Tembakau JHU dan Philip Morris bersama beberapa alumni lain. Antara lain H. Furlong Baldwin (*Chairman of Mercantile Bankshares Corporation, Baltimore*), Andre W. Brewster (*General Partner Piper & Marbury, Baltimore*), Robert D.H. Harvey (*Former Chairman Maryland National Bank, Baltimore*), Alan P. Hoblitzell Jr. (MNC Financial Inc., Baltimore), dan George G. Radcliffe (Baltimore Life Insurance Company, Baltimore). Bloomberg adalah satu-satunya yang berasal dari luar Baltimore.

Pertemuan pada 10 Desember 1990 itu membicarakan proyek divestasi saham tembakau. Saat itu JHU, seperti yang dilaporkan *Los Angeles Times* 23 Februari 1991, akan menjual kepemilikan sahamnya di perusahaan-perusahaan tembakau (terkait proyek divestasi tembakau) senilai US\$ 5,3 juta. Pada laporan yang sama tersebut, Carl A. Latkin, seorang mahasiswa pasca-doktoral yang dalam forum fakultas-mahasiswa membahas isu itu sebelumnya— menyatakan 1,5 persen dari total portofolio investasi JHU senilai US\$ 700 juta, atau lebih dari US\$ 10 juta diinvestasikan ke perusahaan tembakau. Dalam laporan tersebut juga dijelaskan, ketika ditanyakan ada perbedaan nilai yang signifikan antara Latkin dan O'Shea, perbedaan itu terjadi karena nilai portofolio tersebut terus berubah secara konstan.

Maka ketika Bloomberg memprakarsai Bloomberg Initiative to Reduce Tobacco Use, bukan sesuatu yang mengejutkan bila JHU menjadi mitra utama pengelola dana hibah yang disediakannya bersama keempat lembaga lain. Jelas sekali peran JHU dalam proyek perang global anti-tembakau ini sangat dominan dan besar. Pertanyaannya

BAB Tiga

kemudian, siapa yang sesungguhnya memiliki kepentingan terhadap agenda perang global anti-tembakau? Bloomberg atau Johns Hopkins University? Lalu, apa kepentingan mereka?

Bab IV

Invisible Head, Sebuah Imperium Kapitalisme

Johns Hopkins University, “Pintu Gerbang Kepentingan”

*“If we assist the highest forms of education—
in whatever field—we secure the widest
influence in enlarging the boundaries of human
knowledge.”*

(John D. Rockefeller Sr.—www.rockarch.org)

Perkembangan perang tembakau modern yang didorong oleh legitimasi ilmiah di bidang medis dan kesehatan berjalan berdampingan dengan kepentingan industri farmasi yang telah menjelma sebagai bagian dari sistem rezim kesehatan modern. Hampir semua karya ilmiah di bidang medis dan kesehatan yang dihasilkan lembaga-lembaga otoritas ilmu pengetahuan dan teknologi disponsori atau berdasarkan pesanan industri farmasi. Ini mulai dari formula obat, nutrisi, dan gaya hidup sampai formulasi untuk kesehatan publik. Sebagai agen perubahan,

universitas, otoritas ilmu pengetahuan dan teknologi telah mendorong sebuah revolusi peradaban. Inilah yang membuat budaya masyarakat dalam paradigma kesehatan, bergeser dari ketergantungan manusia pada interaksi dengan alam, menjadi ketergantungan manusia pada interaksi dengan layanan rumah sakit dan perusahaan obat. Dinamika manusia untuk mencapai kualitas hidup dan merayakan kematian telah tergantikan menjadi pertempuran melawan sakit serta kematian.

David N. Smith dalam bukunya berjudul *Who Rules The University* (1975) mengungkapkan fakta, otoritas pendidikan dan penelitian bergantung pada kekuatan modal para industrialis dan penguasa modal. Dan kapitalisme yang tumbuh subur di Amerika Serikat telah membentuk peran universitas sebagai kepanjangan tangan kepentingan kapitalisme di negara itu. Dengan demikian, perjalanan rezim ilmu pengetahuan yang memberi fondasi pada perkembangan peradaban modern tentu tidak lepas dari jaring kepentingan berdasarkan satu visi kapitalisme.

Perkembangan itu juga membentuk peran universitas dalam membangun rezim kesehatan modern yang bertindak sebagai satu-satunya dimensi kebenaran tentang nilai-nilai kesehatan. Apabila dilihat dari kepentingannya, industri farmasi memiliki kepentingan langsung terhadap nilai-nilai yang dilegitimasi rezim kesehatan modern bagi produk-produk yang dihasilkannya. Inilah yang lantas membuat keterlibatan industri farmasi tidak bisa dipisahkan dari banyak universitas yang bertanggung jawab dalam dinamika perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi medis dan kesehatan. Logika umum yang bisa digunakan adalah, industri farmasi merupakan tahap selanjutnya untuk mengapitalisasi hasil-hasil riset dan pengembangan yang dilakukan universitas maupun lembaga-lembaga penelitian lain.

Johns Hopkins University (JHU) yang sejarah pendirian dan kebesarannya dekat dengan tradisi medis, menjadi salah satu bagian dari dinamika industri kesehatan modern. Sebagai sebuah universitas

swasta berbasis penelitian (*private research university*), JHU memiliki banyak lembaga pendidikan dan penelitian yang bernaung di bawahnya, antara lain sebagai berikut.

DIVISI PENDIDIKAN	DIVISI MEDIS	DIVISI R & D
<ul style="list-style-type: none"> ▪ School of Medicine ▪ School of Public Health ▪ School of Nursing ▪ School of Arts and Sciences ▪ School of Advanced International Studies ▪ School of Engineering ▪ School of Education ▪ Applied Physics Laboratory 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Johns Hopkins Hospital ▪ Johns Hopkins Bayview Medical Center ▪ Johns Hopkins Singapore International Medical Centre ▪ Howard County General Hospital 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Center for Biotechnology ▪ The Center for Language and Speech Processing ▪ Johns Hopkins Institute for Policy Studies ▪ The Berman Institute of Bioethics ▪ Johns Hopkins Information Security Institute ▪ Space Telescope Science Institute ▪ Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health Center for Communication Programs ▪ Center for Talented Youth-Summer Institute for Gifted Students

JHU didirikan oleh Johns Hopkins pada 22 Januari 1876. Dia seorang filantropis yang dilahirkan dari keluarga petani tembakau di Maryland, yang memiliki lahan pertanian tembakau 2.000 meter persegi, dan mempekerjakan sedikitnya 500 budak. Lebih dari satu abad sejak didirikan, pada 2009 JHU dinobatkan sebagai universitas di urutan pertama yang bergerak dalam bidang ilmu pengetahuan, medis, dan pengembangan riset teknik rekayasa (*engineering*) di Amerika oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Nasional (NSF). Lembaga itu sekaligus juga menobatkan JHU sebagai universitas berbasis riset dan pengembangan yang paling banyak dijadikan sumber referensi (*cited*) oleh banyak peneliti di dunia. Peringkatnya berada di urutan ketiga, setelah Harvard University dan Max Planck Society. Maka wajar saja, kalau kemudian banyak penelitian terkait aspek medis

dan kesehatan dewasa ini dilakukan oleh JHU. Universitas itu, juga berperan sebagai embrio atas klaim terhadap lebih dari 6.000 artikel dan jurnal ilmiah tentang bahaya tembakau yang belakangan menjadi amunisi gerakan anti-tembakau.

Menarik diamati, bagaimana JHU telah memegang peran utama dalam perang anti-tembakau. Semuanya bermula pada 1938, delapan tahun sejak para peneliti di Cologne, Jerman membuat hubungan statistik antara kanker dan merokok. Dr. Raymond Pearl dari JHU kemudian melaporkan hasil penelitiannya, bahwa orang yang merokok tidak hidup selama orang yang tak merokok. Temuan ini direspons oleh American Cancer Society (ACS) pada 1944, dengan mulai memperingatkan kemungkinan penyakit sebagai akibat dari merokok meskipun pada masa itu juga diakui oleh ACS, tidak ada bukti definitif yang menghubungkan rokok dengan kanker paru-paru.

Tentu dalam proyek-proyek riset dan penelitian ilmu pengetahuan modern, JHU tidak berjalan sendiri melainkan didukung oleh para lulusannya yang menguasai industri dan modal. Kemitraan JHU dengan para industrialis kakap Amerika terjalin secara mutualisme lewat gerakan filantropis para miliarder negara itu, yang ikut mengendalikan gerak perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi bagian dari progresivitas industri. Sebut saja antara lain peran Robert Wood Johnson Foundation, yayasan milik pendiri perusahaan farmasi Johnson & Johnson. Ada pula Bill & Melinda Gates Foundation, yayasan yang dimiliki Bill Gates, pendiri perusahaan teknologi raksasa Microsoft. Lalu Michael Bloomberg sebagai pemilik perusahaan raksasa media dan layanan data keuangan Bloomberg L.P. Dan yang paling mendominasi adalah Rockefeller Foundation (RF).

Para lulusan JHU itulah yang antara lain mendirikan Johns Hopkins University Bloomberg School of Public Health, sebuah lembaga riset yang menjadi bagian dari JHU yang bersama Bloomberg kemudian

menjadi mesin perang utama dalam perang global anti-tembakau. Lembaga itu didirikan atas inisiatif John D. Rockefeller lewat RF pada 1916 menyusul ketertarikannya pada isu kesehatan publik. Dia menunjuk William Henry Welch yang sebelumnya pernah menjadi dekan pertama untuk Johns Hopkins School of Medical yang juga menjadi ketua dewan di Rockefeller Institute for Medical Research (sekarang menjadi Rockefeller University). Sejak saat itu, RF dan JHU menjadi sekutu dekat dalam perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi medis modern.

Masih lewat RF, lima tahun kemudian, Rockefeller menginvestasikan dana untuk mendirikan University Harvard School of Public Health dan University of Michigan School of Public Health. Sejak itu, RF terus berperan membentuk sekolah-sekolah kesehatan publik di berbagai kota di dunia. Antara lain di Prague, Warsaw, London, Toronto, Copenhagen, Budapest, Oslo, Belgrade, Zagreb, Madrid, Cluj (Romania), Ankara, Sofia, Roma, Tokyo, Athena, Bucharest, Stockholm, Calcutta, Manila, dan Sao Paulo. Total kontribusi RF dalam pendirian sekolah-sekolah kesehatan publik tersebut mencapai US\$ 357 juta.

Rockefeller seperti sudah jamak diketahui, adalah industrialis penguasa modal paling kuat dan berpengaruh dalam perekonomian Amerika. Kerajaan bisnisnya dimulai dari kepiawaiannya mengelola bisnis minyak di Amerika lewat perusahaan minyak terbesar di negara itu, Standard Oil. Bisnisnya ini kemudian berkembang pesat dan bahkan memonopoli seluruh kegiatan produksi dan perdagangan minyak di Amerika lewat Standard Oil Trust. Ini adalah korporasi dalam korporasi yang mengoperasikan 41 perusahaan minyak dan menguasai hampir 90 persen operasi kilang minyak dunia.

Memasuki era 1900-an, Rockefeller bekerja sama dengan sekutunya, John Pierpont Morgan (J.P. Morgan). Nama yang disebut terakhir adalah seorang bankir paling berpengaruh di Amerika dan menjadi

bagian dari kepanjangan tangan sindikasi keuangan dan perbankan Rothschild, penguasa industri keuangan dan perbankan dari Inggris. Keduanya, Rockefeller dan J.P. Morgan, lalu mengonsolidasi kendali industri di Amerika dengan mengeliminasi kompetisi lewat pembentukan sindikasi korporasi. Duet raksasa ini memonopoli hampir semua industri yang sedang tumbuh dan menjadi primadona di Amerika. Antara lain industri minyak dan energi, besi dan baja, peleburan, perkapalan, transportasi, properti, makanan, alat-alat pertanian, serta tembakau.

Namun sekitar 10 tahun setelah pemerintah Amerika menerbitkan undang-undang anti-monopoli yang dikenal dengan Sherman Anti-Trust Act 1890, Mahkamah Agung mengeluarkan keputusan bagi Rockefeller untuk memecah Standard Oil menjadi 34 perusahaan, tapi dia tetap mendapatkan hak kepemilikannya pada masing-masing perusahaan tersebut. Pecahan Standard Oil yang dikenal publik antara lain Conoco Phillip, Amoco (sekarang bagian dari British Petroleum), Chevron, Exxon (sebelumnya Esso, sekarang ExxonMobil), Mobil (sekarang ExxonMobil), dan Sohio (sekarang bagian dari British Petroleum). Sementara itu, Pennzoil dan Chevron tetap sebagai perusahaan yang terpisah.

Pada waktu yang hampir bersamaan, Mahkamah Agung juga mengeluarkan keputusan yang sama bagi James Buchanan Duke. Dia diperintahkan memecah American Tobacco Company, karena praktik monopoli yang dilakukan. Akibat pemecahan itu, American Tobacco Company terbagi menjadi empat perusahaan: American Tobacco Company, R.J. Reynolds, Liggett & Myers, dan Lolliland. Pemecahan itu termasuk kepemilikan Duke di British American Tobacco (BAT) yang sebelumnya didirikan atas merger Imperial Tobacco Company dari Inggris dengan American Tobacco Company dari Amerika pada 1902. Pecahnya imperium tembakau James B. Duke inilah yang menjadi titik awal konsolidasi baru industri tembakau, yang dikendalikan oleh

J.P. Morgan melalui konsolidasi BAT, Imperial Tobacco, American Tobacco Company, dan pecahannya yang lain.

Tak lalu keputusan Mahkamah Agung melunturkan kongsi Rockefeller dan J.P. Morgan. Sebaliknya mereka terus menghidupkan semangat kapitalisme. Rockefeller dengan kekayaannya, dan J.P. Morgan dengan pengaruh dan kekuasaan yang dibangun lewat industri keuangan, kemudian menjelma menjadi imperium baru yang mengendalikan gerak dinamika industri dan perekonomian di Amerika. Lewat J.P. Morgan & Co., (saat ini menjadi J.P. Morgan Chase), keduanya membangun imperium industri dan kekuasaan modal yang menempatkan Amerika sebagai kekuatan super-ekonomi dunia.

Setelah menguasai industri strategis lain, dimensi medis dan kesehatan menarik minat Rockefeller. Pada 1913, dia meninggalkan identitasnya sebagai pengusaha, dan memilih berada di balik layar dengan mendirikan RF. Sebuah mainan baru yang dikelola lewat sistem *foundation* dan *trusts*. Kedua sistem ini memungkinkan Rockefeller tidak tampak sebagai konglomerat, karena bekerja sebagai tangan-tangan tidak terlihat (*invisible hand*) di balik kepentingan korporasi-korporasi raksasa dan pembentukan sistem sosial-ekonomi-politik di dunia.

Namun belajar dari pukulan Sherman Anti-Trust Act yang memecah Standard Oil, Rockefeller tidak secara langsung mendirikan entitas bisnis yang nyata (*tangible*) untuk membangun imperium industri medis dan kesehatan (Rockefeller Medical Monopoly). Dia membangunnya lewat berbagai bentuk platform *trusts* yang dikelola J.P. Morgan, yang diinvestasikan ke dalam berbagai kepentingan industri. Platform ini ditopang oleh RF sebagai motor penggerak atas nama kesejahteraan manusia, yaitu medis, kesehatan, ilmu pengetahuan masyarakat; pertanian dan ilmu pengetahuan alam; seni dan sastra; ilmu sosial; dan hubungan internasional.

Salah satu sepak terjang RF yang terkenal adalah berhasil mengubah paradigma kesehatan dan medis di China pada 1917, yang disusul dengan mendirikan Peking Union Medical College, dan memprakarsai China Medical Board. Semua usaha ini didukung penuh oleh JHU. China adalah negeri yang memiliki tradisi medis dan kesehatan yang sangat terkenal di seluruh dunia. Namun ada perbedaan yang sangat mendasar dari paham ilmu kesehatan tradisi China dengan kepentingan Rockefeller.

Tradisi medis dan kesehatan China berasal dari gerak kebudayaan yang diwariskan turun-menurun dan berproses selama berabad-abad. Ada pun kepentingan Rockefeller dilandasi paradigma medis dan kesehatan dari tradisi Allopathy Medicine yang dikembangkan di Jerman sejak abad ke-19, dan melandasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi farmasi serta kesehatan modern saat ini. Dua hal yang berbeda ini dibuat saling berhadapan, untuk menyebabkan terjadinya ketergantungan kepada nilai-nilai kesehatan dan medis pada rezim kesehatan yang dibangun di atas fondasi rasionalitas ilmiah, kapitalisasi produk medis dan kesehatan, yang ujung-ujungnya memberikan keuntungan bagi industri farmasi.

Di negara asalnya, Amerika, RF juga berada di belakang gerakan perang anti-perdukunan yang diperkenalkan pada 2 November 1963. Perdukunan yang dimaksud adalah praktik medis yang saat ini dikenal sebagai “pengobatan alternatif” yang menggunakan metode tradisional dan berdasarkan pada pemanfaatan sumber daya alam hayati. Ini antara lain berupa pemijatan (*chiropractic*), tusuk jarum (*acupuncture*), *homeopati*, jamu-jamuan (*naturopati/sin she*), terapi vitamin, serta pengobatan alternatif *cancer and arthritis*. Metode-metode ini memiliki pertentangan kepentingan dari yang ditawarkan rezim kesehatan modern.

Gerakan anti-perdukunan RF ini berhasil membentuk Komisi Perdukunan (*quackery*), yang diprakarsai oleh American Medical

Association (AMA). Dibentuk pula Coordinating Conference on Health Information (CCHI) untuk menjalankan kampanye anti-perdukunan. Anggotanya terdiri dari American Cancer Society, American Pharmaceutical Association, Arthritis Foundation, Council of Better Business Bureaus, National Health Council, Food and Drug Administration (FDA), Federal Trade Commission (FTC), U.S. Postal Service, Office of Consumer Affairs, U.S. and State Attorney Generals' Office, serta Internal Revenue Service.

Dengan kata lain, jejak langkah Rockefeller membentuk tatanan modern rezim pengetahuan medis dan kesehatan untuk menempatkan fondasi monopolinya, sebetulnya telah dimulai sejak awal abad ke-20. Jauh sebelum mendirikan Peking Union Medical College di China, Rockefeller pada 1897 telah menunjuk Frederick T. Gates untuk mengelola kekayaannya dalam agenda filantropi. Orang inilah yang kali pertama mengusulkan untuk mendominasi dan memonopoli sistem pendidikan medis dan kesehatan di Amerika. Survei untuk kepentingan itu dilakukan oleh Abraham Flexner, berdasarkan penugasan Carnegie Foundation atas permintaan AMA. Abraham adalah saudara dari Simon Flexner, yang menjadi ketua Rockefeller Institute of Medical Research.

Dalam laporannya, Abraham menyatakan terlalu banyak jumlah dokter di Amerika yang karena itu, menyebabkan para dokter susah diatur. Sebuah temuan yang sebetulnya juga dikeluhkan oleh AMA. Sebagai solusi, dibuatlah rencana untuk mengurangi jumlah dokter dan membangun sekolah medis sebagai sekolah elite dan mahal dengan standar yang tinggi, dan hasilnya sungguh mencengangkan. Setelah Perang Dunia I, sekolah medis di Amerika yang awalnya mencapai 650 unit berkurang menjadi 50 unit. Sepak terjang Rockefeller mendominasi dunia pendidikan medis ini, kemudian terus diperluas lewat General Education Fund (Rockefeller Foundation).

Selesai mendominasi dan mengendalikan dunia pendidikan medis, perhatian Rockefeller lewat RF untuk memegang kendali industri medis dan kesehatan, ditujukan dalam perang melawan kanker. Sebelumnya, pada era medis tradisional, catatan tentang kanker tidak ditemukan. Namun pada 1830-an, setelah revolusi industri menyebar dengan pesat, dinyatakan bahwa penyakit kanker menjadi penyebab 2 persen kematian di Prancis, dan pada 1900 menjadi penyebab 4 persen kematian di Amerika. Pada 1913, Rockefeller melatarbelakangi pembentukan American Society for Control Cancer, yang berganti nama pada 1944 menjadi American Cancer Society (ACS). Penasihat hukumnya, Debevoise & Plimpton, yang ditempatkan untuk mengawasi administrasi organisasi tersebut. Pendanaan pun digelontorkan lewat Yayasan Laura Spelman Rockefeller dan J.P. Morgan.

Awalnya adalah James Douglas, pengusaha tambang tembaga terbesar di Amerika yang memberikan dana US\$ 100 ribu kepada Memorial Hospital untuk mengembangkan pengobatan kanker menggunakan radium. Dia menunjuk langsung dokter pribadinya Dr. James Ewing sebagai kepala proyek sehingga menjadikan Memorial Hospital sebagai rumah sakit spesialis penderita kanker. Namun perubahan besar-besaran terhadap rumah sakit itu, baru terjadi setelah salah seorang anak dan ahli waris Douglas menikahi salah seorang rekan kerja J.P. Morgan. Sejak itu Memorial Hospital berada di bawah kendali langsung Rockefeller-Morgan.

Kendali mereka semakin menguat, pada saat dua raksasa industri otomotif Amerika, yakni Alfred P. Sloan (salah satu direktur di J.P. Morgan & Co.) dan Charles Kettering yang mewakili kepentingan J.P. Morgan di General Motor, menjadi kontributor untuk Memorial Hospital pada 1930. Nama Memorial Hospital pun diubah menjadi Memorial Sloan-Kettering Cancer Centre. Tentu saja Rockefeller-Morgan tetap menjadi kontributor utama untuk *Memorial Sloan*

Kettering, selain untuk *General Motor Cancer Institute*, dan mengendalikan *American Cancer Society* yang kemudian menjadi pusat riset dan pengembangan pengobatan kanker.

Belakangan, Albert Lasker yang dikenal sebagai “the father of modern advertising” dan Elmer Bobst yang dikenal sebagai figur di balik suksesi Presiden Nixon, bergabung pula dengan Rockefeller-Morgan untuk mengawal ACS mengampanyekan perang terhadap kanker (*war against cancer*). Usaha ini lalu menjadi bisnis miliaran dolar bagi monopoli medis Rockefeller.

Kini, sudah lebih dari 100 tahun pengobatan modern untuk kanker yang dipelopori Rockefeller berjalan. Metode yang digunakan masih tetap sama, yaitu memakai prosedur kemoterapi (berbasis radiasi) dan obat-obatan keras dari hasil pengembangan industri-industri farmasi yang dikendalikan lewat sindikasi industri farmasi Imperium Rockefeller-Morgan. Nyaris tidak ada kritik terhadap semua program dan kampanye melawan kanker itu, hingga di pengujung 1988 sebuah acara di TV CBS Network mengungkapkan adanya “ketidakberesan.”

Acara *Sixty Minute* menayangkan laporan berjudul “The Facts Were Fiction” yang mengekspos subyek yang disebut sebagai “*one of the leading scientific scholar*” di Amerika. Menurut *Sixty Minute*, 10 dari 30 persen proyek penelitian tentang kanker di Amerika adalah palsu dan hanya untuk mengejar persyaratan mendapat dana hibah penelitian. Bahkan, salah satu sarjana peneliti yang diwawancara mengatakan, dia akan berpikir dua kali sebelum percaya apa yang ditulis oleh jurnal medis.

Kritik pun bermunculan kepada Memorial Sloan Kettering. Rumah sakit itu dianggap tidak melakukan penelitian dan pengembangan apa pun untuk mencegah ataupun mengobati kanker kecuali hanya berkuat pada metode pengobatan yang mereka miliki, yaitu kemoterapi. Dasar ilmiah yang digunakan pun, dinilai hanya berpijak pada “fakta” bahwa sel adalah faktor yang

paling bertanggung jawab atas penyebaran kanker, dan karena itu menjadi dasar tindakan dari prosedur perawatan kemoterapi untuk menghambat dan menghentikan perkembangan sel kanker. Ada pun penelitian yang dilakukan, tidak pernah diarahkan pada kemungkinan untuk merangsang sistem kekebalan tubuh sebagai sistem alami tubuh melawan penyakit termasuk serangan sel kanker. Kepada semua penderita kanker hanya selalu diterapkan metode “*cut, slash and burn*”. Metode ini mirip dengan tradisi pengobatan *allopathic* yang diperkenalkan Samuel Hahnemann dan dibawa oleh German Allopathic School of Medicine di Amerika lebih dari 100 tahun sebelumnya, yang dikombinasikan dengan kemoterapi dan obat-obatan berat lainnya.

Celaknya, guna memperkuat legitimasi terhadap metode perawatan penderita kanker, kampanye pengobatan yang menawarkan metode lain selain apa yang disediakan Rockefeller Medical Syndicate akan diserang sebagai suatu kebohongan. Dr. Muriel Shimkin dari National Institute of Health pada 1973 menulis di *The Institute's Official Primer* perawatan penderita kanker dengan metode diet adalah bagian dari praktik dunia perdukunan. Lalu untuk menghadapi meningkatnya bukti-bukti yang menunjukkan kenyataan yang sebaliknya, ACS pada 1984 menerbitkan laporan khusus dengan mengusulkan beberapa program, yaitu menghindari obesitas; mengurangi asupan lemak sebanyak 30 persen dari total kalori; mengonsumsi makanan berserat tinggi; mengonsumsi makanan yang banyak mengandung vitamin A dan C; memasukkan variasi sayuran dalam menu diet; tidak mengonsumsi alkohol secara berlebihan; dan tidak mengonsumsi garam, rokok, dan makanan yang mengandung penyedap rasa berlebihan.

(Catatan: Program yang sama yang menjadi kebijakan kesehatan publik yang dikampanyekan Bloomberg sebagai Wali Kota New York)

Sebelumnya, ACS sudah mengambinghitamkan *Laetrile* sebagai senyawa potensial dalam memerangi kanker. Di sebuah seminar American Cancer Society Science Writer 2 April 1975, Dr. Lewis Thomas sebagai ketua di Sloan Kettering menyatakan: “*Laetrile had absolutely no value combating cancer.*” Setahun sebelumnya, Dr. Robert Good, Presiden Sloan Kettering, juga mengeluarkan pernyataan: “*At this moment there is no evidence that laetrile has an effect on cancer.*” Tentu saja pernyataan-pernyataan itu justru bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan para peneliti di lembaga tersebut.

Penelitian Dr. Lloyd Schoen dan Dr. Elizabeth Crockett menghasilkan kombinasi enzim dari nanas dengan laetrile mendorong penyembuhan tumor sebanyak 50 persen dari 34 percobaan terhadap 34 binatang eksperimen.

Harold Manner, peneliti di pusat kanker, menemukan kombinasi laetrile, enzim, dan vitamin A memiliki efek positif terhadap perawatan tikus percobaan yang mengidap kanker.

Pada 13 Juni 1973, setelah sembilan bulan melakukan tes penggunaan laetrile pada penyakit kanker, Dr. Kanematsu Sugiura (yang telah bergabung di Memorial sejak 1917) menyatakan: “The result clearly show that Amygdaline significantly inhibits the appearance of lung metastasis in mice.”

Salah satu penerima manfaat dari penggunaan laetrile adalah aktor ternama Steve McQueen, setelah dokter yang merawat menyerahkannya sebagai uji coba penggunaan laetrile. Tubuh McQueen merespons dengan baik terhadap terapi laetrile yang dilakukan sampai akhirnya para dokter membujuknya melakukan operasi terhadap tumor yang menyerang tubuhnya. Namun McQueen meninggal di ruang operasi akibat embolisme. Kejadian itu diklaim sebagai bukti bahwa laetrile tidak berguna.

Dalam perang terhadap kanker yang dilakukan sindikasi monopoli medis Rockefeller-Morgan, terlihat jelas ada kepentingan-kepentingan bisnis triliunan dolar yang terlibat. Dengan segala cara, sindikasi itu berusaha mengeliminasi kompetisi yang muncul dari kemungkinan lain yang bisa mengancam kepentingan mereka. Apa pun karena itu dilakukan oleh mereka termasuk untuk menyembunyikan bahkan membelokkan fakta-fakta ilmiah yang muncul.

Dari potret perang melawan kanker itu dapat pula dilihat, RF telah membawa tradisi imperialisme ke dalam kegiatan filantropi, yang dikemas dengan tampilan sosial dan kemanusiaan. Di balik setiap misi RF, dapat dilihat selalu membawa kepentingan bisnis korporasi untuk membuka peluang penguasaan pasar, baik di Amerika maupun di luar negeri. Isu kesehatan publik yang juga berarti terkait peran dan tanggung jawab negara mengurus warganya menjadi amunisi ampuh bagi jejaring institusi riset dan pengembangan Rockefeller untuk memengaruhi kebijakan suatu negara.

Kini, fondasi nilai-nilai yang dibangun aliansi kekuasaan Rockefeller-Morgan dikendalikan oleh David Rockefeller Jr. Selain menjadi pimpinan di dewan yayasan RF, David juga menjadi CEO di J.P. Morgan Chase, imperium keuangan paling berpengaruh di dunia. Persekutuan Rockefeller-Morgan itu pula yang menjadi pendukung utama Bloomberg, ketika dia maju bertarung untuk kali ketiga dalam pemilihan wali kota New York. Gabungan mereka, telah menciptakan sebuah kekuatan ekonomi dan kepentingan yang luar biasa, yang bisa menggerakkan arah dan tujuan ekonomi global.

Bloomberg dengan Bloomberg L.P. berperan sebagai garda depan yang mengarahkan kecenderungan ekonomi dunia lewat informasi dan data yang didistribusikan melalui jaringan media. Rockefeller bersama J.P. Morgan Chase dan RF mengelola proses kapitalisasi potensi yang ada untuk meningkatkan keuntungan sekaligus mengendalikan tren dunia. Sementara JHU, yang menjadi mitra sindikasi Rockefeller-

Morgan, berperan sebagai otoritas yang “mengendalikan rasionalitas” dalam kerangka ilmiah untuk menggerakkan perspektif berpikir yang sesuai dengan arus kepentingan mereka. Bersama sindikasi dan jaringan otoritas ilmiah lain yang berada di bawah pengaruh Rockefeller, mereka telah menjelma menjadi sesuatu kekuatan atas kebenaran yang tidak terbantahkan. Dan bagi Bloomberg, JHU adalah pintu gerbang menuju imperium kekuasaan yang akan mendukung kepentingannya.

Raksasa Industri Farmasi dan Tembakau Dunia

“All this story about humanity and philanthropy is foolish, I want it understood that I shall do what I like with the radium that belong to me.”

(James Douglas, pemilik perusahaan tambang Copper Queen Lode dan donatur riset pengobatan kanker dengan radium/kemoterapi di Memorial Hospital, New York Times, 24 Oktober 1913)

Sungguh menarik melihat hubungan Rockefeller-Morgan-Bloomberg dalam perang global melawan tembakau. Awalnya perang melawan tembakau sering dikaitkan dengan kepentingan korporasi farmasi untuk mengambil keuntungan dari konsumen rokok (produk tembakau) lewat produk-produk farmasi agar berhenti merokok. Sejak tembakau telah menjadi produk rokok yang dikonsumsi secara masif di seluruh dunia, segmen perokok telah menciptakan sebuah refleksi potensi pasar yang besar. Ketika otoritas kesehatan mulai menghakimi rokok sebagai penyebab kanker, segmen perokok menjadi sangat berharga bagi produk “obat penyembuh” kebiasaan merokok.

Dalam *Nicotine War* (2008), Wanda Hamilton mengungkap relasi kepentingan antara gerakan global anti-tembakau dan industri farmasi, khususnya dalam peningkatan penjualan produk terapi

pengganti nikotin (NRT) itu. Sejak para ilmuwan farmasi pada 1962 mulai meneliti terapi pengganti nikotin, perusahaan besar seperti Johnson & Johnson, GlaxoSmithKline (GSK), Hoechst Marion Roussel, Novartis, dan Pfizer—berlomba-lomba memproduksi dan memasarkan produk NRT. Di sisi lain, kampanye anti-tembakau yang menuntut para perokok berhenti dan mengikuti terapi semakin gencar dilakukan. Bahkan, dalam Konvensi Kerangka Pengendalian Tembakau (FCTC) juga dirumuskan pembangunan klinik-klinik terapi berhenti merokok, yang tentu saja telah melibatkan produk-produk terapi berhenti merokok, di mana Rockefeller-Morgan berada di belakangnya.

Eustace Mullins menuliskan di buku *Murder Injection* (1987), awal dari perkembangan industri raksasa farmasi dimulai pada 1939. Hal itu terjadi ketika sebuah aliansi dibentuk oleh Rockefeller-Morgan lewat Chase Manhattan Bank (sekarang J.P. Morgan Chase) dengan perusahaan kimia Jerman era Nazi, IG Farben (Bayer). Aliansi inilah yang tercatat sebagai embrio tradisi industri farmasi saat ini. Benar, usai Perang Dunia II, IG Farben dibubarkan. Para direktornya ditangkap atas tuduhan kejahatan kemanusiaan karena menggunakan manusia sebagai obyek eksperimen, dan memproduksi gas beracun untuk membunuh ribuan orang. Namun itu tak berlangsung lama, karena IG Fargen kembali muncul dalam bentuk beberapa perusahaan yang terpisah tapi terikat dalam suatu aliansi. Itu termasuk beberapa perusahaan yang terkenal, antara lain Bayer AG, Imperial Chemical Industries (ICI), Borden, Carnation, General Mills, M.W. Kellogg Co., Nestlé, Pet Milk, Squibb and Sons, Bristol Meyers, Whitehall Laboratories, Procter & Gamble, Roche, Hoechst, dan Beyer and Co.

Tidak terbatas hanya dengan perusahaan-perusahaan Jerman, Rockefeller-Morgan juga menggandeng Rothschild dari Inggris untuk membentuk sindikasi besar perusahaan-perusahaan farmasi dunia yang berada di bawah kendalinya. Sindikasi mereka dikenal dengan

sebutan “*The Drug Trusts.*” Hingga 1987, paling tidak terdapat 18 perusahaan besar dunia yang terkait erat dengan Rockefeller-Morgan.

The Drug Trust - Sindikasi Industri Farmasi

No.	Perusahaan	Keterangan
1.	Merck (Amerika)	Tetap sebagai Merck & Co. Inc.
2.	Glaxo Holdings (Inggris)	Setelah melalui serangkaian proses merger dan akuisisi sekarang menjadi GlaxoSmithKline (GSK).
3.	Hoffman La Roche (Swiss)	Juga dikenal sebagai Roche Holding AG
4.	Smith Kline Beckman (Amerika)	Setelah melalui serangkaian proses merger dan akuisisi sekarang menjadi GlaxoSmithKline (GSK).
5.	Ciba-Geigy (Swiss)	Setelah melalui serangkaian proses merger dan akuisisi sekarang menjadi Novartis International AG.
6.	Pfizer	Setelah melalui serangkaian proses merger dan akuisisi sekarang menjadi Pfizer Inc.
7.	Hoechst AG (Jerman)	Setelah melalui serangkaian proses merger dan akuisisi sekarang menjadi Sanofi SA berkedudukan di Prancis.
8.	American Home Products (Amerika)	Setelah melalui serangkaian proses merger dan akuisisi sekarang menjadi Pfizer Inc. Sebelumnya juga dikenal sebagai Wyeth.
9.	Eli Lilly (Amerika)	Tetap sebagai Eli Lilly and Company.

10.	Upjohn (Amerika)	Setelah melalui serangkaian proses merger dan akuisisi sekarang menjadi Pfizer Inc. , setelah merger dengan Pharmacia yang kemudian dibeli Pfizer Inc. pada Juli 2002.
11.	Squibb (Amerika)	Setelah melalui serangkaian proses merger dan akuisisi sekarang menjadi Bristol-Myers Squibb .
12.	Johnson & Johnson (Amerika)	Tetap sebagai Johnson & Johnson.
13.	Sandoz (Swiss)	Sekarang Novartis International AG .
14.	Bristol Myers	Setelah melalui serangkaian proses merger dan akuisisi sekarang menjadi Bristol-Myers Squibb .
15.	Beecham Group (Inggris)	Setelah melalui serangkaian proses merger dan akuisisi sekarang menjadi GlaxoSmithKline (GSK) .
16.	Bayer A. G. (Jerman)	Tetap sebagai Bayer AG.
17.	Syntex (Amerika)	Terintegrasi dengan Hoffman La Roche (Holding Roche AG)
18.	Warner Lambert (Amerika)	Setelah melalui serangkaian proses merger dan akuisisi sekarang menjadi Pfizer Inc.

Sumber: Muder Injection, The Drug Trust oleh Eustace Mullins (1987) dan keterangan diolah dari berbagai sumber.

Dari perusahaan-perusahaan farmasi yang disebutkan Wanda Hamilton dan berdasarkan daftar tersebut, terbaca jelas hampir semua perusahaan farmasi dunia memiliki hubungan langsung atau tidak dengan Rockefeller-Morgan. Beberapa figur penting yang diungkap

oleh Wanda adalah termasuk William C. Weldon. Dia pemimpin dan CEO Johnson & Johnson sejak 2002, dan anggota dewan direksi di J.P. Morgan Chase. Ada juga GSK dan Rockefeller University yang menjadi mitra dalam penelitian dan pengembangan medis.

Sementara Hoechst, Pharmacia, Novartis, dan Pfizer adalah perusahaan yang berada di bawah kendali Rockefeller-Morgan sejak konsolidasi industri farmasi pasca-Perang Dunia II dan pembubaran IG Fargen (Bayer AG) yang terus berlanjut hingga saat ini. Berdasarkan rilis dari Irving Levin Associates Inc. yang dipublikasikan *pharmiweb.com* 26 Maret 2010, selama kurun waktu 10 tahun yang berakhir hingga 31 Desember 2010, paling tidak telah terjadi 1.345 proses penggabungan dan akuisisi yang diumumkan atas aset serta perusahaan di industri farmasi. Bila dihitung mundur ke belakang, tercatat ada 15 ribu proses merger dan akuisisi sejak 1993.

Untuk membangun fondasi kepentingan untuk menguasai industri farmasi global, Rockefeller-Morgan tidak hanya melakukan konsolidasi dengan misalnya mengapitalisasi industri maupun gerakan filantropis bersama lembaga-lembaga riset dan pendidikan. Akan tetapi mereka juga memahami pentingnya relasi struktural dari suatu otoritas yang mampu menggerakkan arah kebijakan yang berdampak lebih luas dan berkelanjutan, sehingga ikut membangun suatu tatanan politik internasional sebagai rezim kesehatan global. Lewat semua itu, Rockefeller-Morgan mendorong sebuah paradigma baru dalam perspektif kesehatan publik berdasarkan pada prinsip *social medicine*.

Social medicine adalah suatu bentuk pemahaman munculnya penyakit yang penyebarannya tidak hanya disebabkan faktor biologis melainkan oleh faktor sosial. Kondisi suatu kelompok masyarakat ikut menyebabkan muncul dan menyebarnya penyakit, sehingga bentuk penanganannya tidak lagi hanya sebatas faktor-faktor biologis melainkan melibatkan pula kondisi sosial masyarakat itu sendiri.

Prinsip semacam ini awalnya dibangun Rudolf Virchow (1821-1902), dokter berkebangsaan Jerman sekaligus ahli antropologi, ahli patologi, prasejarah, biologi dan politisi. Belakangan, prinsip ini menjadi landasan perkembangan paradigma kesehatan masyarakat sebagai salah satu aspek kepentingan publik. George Rosen (1977-2007), ahli sejarah medis dari Yale University, merangkum prinsip-prinsip *social medicine* Virchow menjadi tiga bagian.

Pertama, kondisi sosial dan ekonomi sangat memengaruhi kesehatan, penyakit dan praktik kedokteran. Kedua, kesehatan penduduk adalah masalah kepedulian sosial. Dan ketiga, masyarakat harus mempromosikan kesehatan secara individu maupun sosial.

Bangkitnya paradigma kesehatan publik kemudian dimanfaatkan oleh Rockefeller-Morgan menjadi akar dari rezim kesehatan modern. Pemanfaatan ini membuka peluang untuk menempatkan kendali industri medis dan kesehatan lewat sistem politik domestik dan internasional. Embrio terbentuknya WHO di bawah PBB bahkan bisa dikatakan tidak lepas dari kepentingan Rockefeller-Morgan. Lembaga kesehatan internasional yang menjadi embrio terbentuknya WHO, antara lain International Sanitary Bureau (sekarang menjadi Pan American Health Organization atau PAHO) yang berdiri pada 1902; L'Office International d'Hygiene Publique (OIHP) berdiri 1907; dan League of Nation Health Organization (LNHO) berdiri 1919.

Organisasi-organisasi itu terbentuk lewat Technical Preparatory Committee yang diadakan oleh PBB di Paris, Prancis, 18 Maret-5 April 1946, yang merencanakan agenda International Health Conference. Dua bulan kemudian, konferensi itu terselenggara di New York, dan sebanyak 22 perwakilan dari 66 negara peserta ikut menandatangani konstitusi WHO pada 22 Juli 1946 meski secara definitif, WHO baru terbentuk pada 1 September 1948.

Ada tiga dokter yang menjadi tokoh kunci di Technical Preparatory Committee. Mereka adalah Rene Sand, G. Brock Chisholm, dan Manuel

Martinez Baez yang semuanya, memiliki kedekatan hubungan dengan RF. Sand didukung penuh oleh RF untuk mengembangkan karir di Universitas Brussels, Belgia selain bergabung dengan LNHO. Baez bertugas di China, salah satu negara yang menjadi perhatian utama kepentingan RF. Ada pun Chisholm yang menjadi direktur umum WHO pertama sejak berdiri 1948, terasosiasi dengan kontribusi RF terkait isu kesehatan mental. Dia juga pendiri World Federation for Mental Hygiene atas prakarsa Chisholm dan John R. Rees, yang merupakan direktur Tavistock Institute di Inggris dan disponsori oleh RF dalam mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang psikiatri atau kejiwaan sejak era sebelum Perang Dunia II.

Peran WHO sebagai mitra strategis RF mencapai misi globalnya tecermin dari sikap Chisholm, yang digambarkan Farley (2008) sangat frustrasi karena setiap usahanya, menghadapi gangguan dari kepentingan nasional negara-negara anggota WHO dan situasi politik yang ditimbulkan era perang dingin. Farley menyebutkan, kepentingan nasional, identitas budaya dan nasionalisme dalam perspektif global, telah menjadi hambatan utama bagi suatu gerak ekspansi global, khususnya yang menjadi kepentingan RF yang mewakili kepentingan industri farmasi. Faktanya, lewat kebijakan dan program yang diprakarsai WHO, langsung atau tidak langsung, RF memberikan peluang bagi kepentingan sindikasi industrinya untuk ambil bagian. Sejak 1950, peran RF dan sindikasi industri farmasinya bahkan sama sekali tidak terlepas dari perjalanan WHO membentuk suatu rezim medis dan kesehatan dunia (Evans, UNDP, 2002).

Salah satu kebijakan WHO yang dibuat bersama Organisasi Pertanian dan Pangan (FAO) adalah Codex Alimentarius. Kebijakan ini dirintis sejak 1945 dan terus dikembangkan di bawah Codex Alimentarius Commission yang berdiri pada 1963, dan hingga Juni 2011 telah menerbitkan panduan edisi ke-20. Panduan ini menjadi pijakan bagi lembaga-lembaga otoritas pengendalian obat dan

makanan di seluruh dunia, termasuk bagi Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM) di Indonesia.

Implikasi Codex juga menjadi rujukan kebijakan perdagangan bebas di bawah payung WTO. Hal ini tecermin ketika Codex memperluas perannya lewat The Joint FAO/WHO Conference on Food Standards, Chemicals in Food and Food Trade, Maret 1991. Melalui standar ini, Codex berusaha menetapkan standardisasi ilmiah internasional makanan dan obat di bawah Agreement on The Application of Sanitary and Phytosanitary dan Agreement on Technical Barriers to Trade. Perjanjian itu adalah bagian dari Kesepakatan Tarif dan Perdagangan (GATT) yang berada di bawah WTO yang mulai diberlakukan sejak 1 Januari 1995.

Setelah diperbarui dan diintegrasikan dengan kepentingan perdagangan bebas pada 1995, Codex bahkan menghambat penggunaan *micro-nutrient* lewat aturan soal paten (*intellectual property right*) yang pada era modern telah dikembangkan sebagai metode pengobatan alamiah menggunakan unsur-unsur vitamin, mineral, dan asam amino yang lebih aman dibanding metode obat-obatan farmasi dan kemoterapi untuk kanker. Ini merupakan sebuah pemahaman modern atas ilmu medis dan kesehatan yang bertentangan dengan yang dianut rezim medis dan kesehatan modern serta industri farmasi di belakangnya. Lewat kaca mata tersebut, tak berbeda dengan RF sebagai garda depan Rockefeller-Morgan, WHO pun memiliki peran penting dalam konsolidasi kepentingan RF di tingkat global.

Singkat kata, lewat supremasi Codex sebagai pedoman internasional, kepentingan RF dan industri farmasi bisa tersebar ke seluruh dunia. Dari sini bisa dilihat, bahwa kuasa relasi para industrialis penguasa modal dunia terhadap perjalanan sejarah medis dan kesehatan, baik dari aspek perkembangan iptek, ekonomi, sosial dan politik— dan agenda anti-tembakau, berasal dari alasan kepentingan

yang sama. Tidak mudah memang menemukan jawaban, apakah motif kampanye global anti-tembakau yang berlangsung, semata-mata perang antara industri farmasi melawan industri tembakau. Namun dilihat dari hubungan yang saling menguntungkan, doktrin dari rezim kesehatan saat ini sudah tegas menyatakan bahwa tembakau adalah sumber penyakit. Dengan demikian, sumber penyakit itu berarti adalah sumber keuntungan bagi industri farmasi.

Fakta lain menunjukkan, sejak awal abad ke-20 setelah masa monopoli tembakau American Tobacco Company oleh Duke berakhir, ada empat perusahaan besar tembakau di Amerika, yaitu American Tobacco Co., R.J. Reynolds, Liggett & Myers Tobacco Company, dan Lorillard. Pada era selanjutnya, industri tembakau Amerika ini melewati proses konsolidasi yang dikendalikan Rockefeller-Morgan. Itu termasuk untuk Philip Morris, yang di awal kebangkitannya dimulai setelah melalui campur tangan George J. Whelan. Dia adalah bankir yang mengonsolidasi industri tembakau lewat Tobacco Production Corp., yang karena kekuasaan tidak bisa dilepaskan dari sindikasi keuangan J.P. Morgan.

Artinya, dengan kekuasaan di industri keuangan Amerika, J.P. Morgan sebetulnya berada di balik kesuksesan semua perusahaan besar tembakau tersebut. Lewat cara itulah, terwujud raksasa-raksasa industri tembakau global yang dikuasai Philip Morris International (Altria Group), British American Tobacco (BAT), Japan Tobacco (JT), dan Imperial Tobacco. Di masa sekarang, J.P. Morgan bahkan menjadi sponsor utama konferensi tembakau dunia. Perusahaan itu juga memiliki divisi khusus di bawah J.P. Morgan Securities yang dikepalai Erik Bloomquist bernama Global Tobacco Research.

Dari pemetaan ini, jelas sudah, Amerika adalah motor utama dari terbentuknya inisiatif FCTC oleh WHO dalam agenda kampanye global melawan tembakau. Celaknya, setelah delapan tahun FCTC ditandatangani oleh anggota-anggotanya pada 2003, Amerika belum

meratifikasinya. Dulu, berbagai analisis media menyinggung posisi politik George W. Bush yang berasal dari Partai Republik dan dekat dengan industri tembakau, yang menjadi penyebab keengganan Washington meratifikasi FCTC. Namun hingga Barrack Obama dari Partai Demokrat menggantikan Bush, Amerika tidak juga meratifikasi FCTC.

Dari keengganan Amerika meratifikasi FCTC, menarik untuk menyimak keberadaan American Legislative Exchange Council (ALEC). Ia adalah organisasi nirlaba yang berpendirian konservatif, berisi para anggota legislatif dan korporasi Amerika. Misi ALEC adalah mendorong kemajuan prinsip-prinsip pasar bebas yang mewakili kepentingan para industrialis dan penguasa modal Amerika. Fungsinya sebagai wadah koordinasi untuk sinkronisasi kepentingan industrialis dan penguasa modal Amerika terhadap setiap kebijakan yang dikeluarkan badan legislatif dan pemerintah Amerika, baik kebijakan nasional maupun terkait politik luar negerinya.

Susunan Pengurus Dewan Eksekutif ALEC periode 2011

JABATAN	NAMA	ASAL PERUSAHAAN
Ketua Nasional	W. Preston Baldwin	Center Point 360 (mantan CEO UST, anak perusahaan Altria Group).
Wakil Ketua I	Sandy Oliver	Wakil Presiden Urusan Pemerintahan Federal, Bayer Corp.
Wakil Ketua II	John Del Giorno	Wakil Presiden Urusan Pemerintahan Federal, GlaxoSmithKline.

JABATAN	NAMA	ASAL PERUSAHAAN
Bendahara	David Powers	Wakil Presiden Urusan Pemerintahan, Reynolds American (Cabang BAT Amerika).
Sekretaris	Maggie Sans	Wakil Presiden Urusan Publik dan Hubungan Pemerintahan, Wal-Mart Stores.
Ketua Kehormatan (Emeritus)	Jerry Watson	Penasihat Hukum Senior American Bail Coalition.
Anggota	Michael Hubert	Vice President of U.S. Public Affairs & State Government Relations Pfizer Inc.
Anggota	Teresa Jennings	State Government Affairs Team Leader Reed Elsevier Inc.
Anggota	Kenneth Lane	Vice President of Government & Trade Relations Diageo
Anggota	William Leahy	Vice President of Legislative and Regulatory Affairs Atlantic Region AT&T
Anggota	Kelly Mader	Vice President of State Government Relations Peabody Energy
Anggota	Richard McArdle	UPS

JABATAN	NAMA	ASAL PERUSAHAAN
Anggota	Bernie McKay	Vice President of Government Affairs Intuit Inc.
Anggota	Mike Morgan	Director of Public & Government Affairs Koch Companies Public Sector, LLC
Anggota	Gene Rackley	Director of Public Affairs & Government Relations Coca-Cola Refreshments
Anggota	Daniel Smith	District Director of State Government Affairs Altria Client Services
Anggota	Randall Smith	U.S. Government Affairs Manager ExxonMobil Corporation
Anggota	Russell Smoldon	Manager of State & Local Government Relations Salt River Project
Anggota	Roland Spies	State Farm Insurance Co.

Dengan misi, fungsi dan komposisi orang-orang yang berada di ALEC yang diwakili raksasa korporasi dari industri strategis yang menjadi tulang punggung kekuatan super-ekonomi Amerika di dunia, ALEC jelas telah menjadi kepanjangan tangan dari kepentingan kapitalisme global. Dari ALEC ini pula terlihat ada hubungan antara kepentingan industri tembakau dan farmasi Amerika, yang terikat pada suatu sistem koordinasi yang solid.

Selain ALEC, terdapat banyak forum yang berpengaruh kuat mengarahkan kebijakan di Amerika di tingkat global yang mewakili kepentingan kekuatan ekonomi. Salah satunya adalah Council of Foreign Relations (CFR), organisasi nirlaba dan nonpartisan yang mengkhususkan pada kebijakan luar negeri Amerika dan internasional. Lembaga ini memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap proses kebijakan luar negeri dan intervensi Amerika dalam proses kebijakan internasional. Dalam perjalanannya, CFR –Bloomberg menjadi anggota aktif di dalamnya— ternyata juga tidak bisa dilepaskan dari peran dan pengaruh Rockefeller. Pada 1970, David Rockefeller Sr., generasi ketiga Rockefeller ditunjuk menjadi ketua CFR, dan David Rockefeller Jr., menjadi ketua kehormatan (*chairman emeritus*) di CFR pada masa berikutnya.

Pertanyaannya, apakah ALEC dan CFR ini, yang menyebabkan Amerika tidak meratifikasi FCTC?

Untuk ukuran dunia, industri tembakau di Amerika adalah pemain papan atas dunia. Data yang FAO pada 1970 menunjukkan, Amerika berada di urutan pertama untuk produsen tembakau dunia. Posisinya turun menjadi keempat 37 tahun kemudian, dan digantikan China— yang sudah meratifikasi FCTC sejak 2005. Dari penjelasan ini, Amerika tentu punya kepentingan untuk tidak meratifikasi FCTC karena dengan tidak meratifikasi FCTC, negara itu tidak memiliki kewajiban memberlakukan ketentuan FCTC sebagai hukum nasional, dan itu berarti melindungi industri tembakau dalam negerinya. Kenyataan ini tentu saja paradoks dengan genderang perang melawan tembakau yang dimotori Amerika. Akan tetapi Washington mengakalinya dengan mengakomodasi FCTC lewat otoritas kesehatan publik, seperti Center of Center of Disease Control (CDC) dan FDA. Hal ini sesuai dengan sistem negara federal yang dianut Amerika, di mana otoritas regulasi pun tidak bersifat terpusat. Peraturan larangan merokok yang ketat pun, hanya berlaku pada beberapa negara bagian. Salah satunya

berlaku di New York yang diprakarsai oleh wali kotanya, Bloomberg.

Timbul sekarang pertanyaan: untuk apa Bloomberg menginvestasikan dana ratusan juta dolar dan ikut membiayai agenda perang global anti-tembakau, jika tidak mampu mendorong pemerintah Amerika untuk meratifikasi FCTC?

Dari memo yang disampaikan anggota senior CFR, Thomas J. Bollyky pada 18 Agustus 2011, muncul kesan tentang sikap CFR yang tetap menempatkan industri tembakau sebagai prioritas. Bollyky terutama berpijak pada agenda pengendalian tembakau dan negosiasi tentang Trans-Pacific Partnership yang telah diprakarsai pemerintahan Obama sejak 2009, ada empat poin utama.

1. **Reduce subsidies.** *U.S. negotiators should seek reduced agricultural subsidies for tobacco, which would level the playing field for U.S. tobacco producers and help diminish foreign production. The United States phased out its own tobacco quota and price support programs in 2004 with a \$9.6 billion buyout to producers.*
2. **Harmonize regulations.** *The United States, which now has strict tobacco labeling and content restrictions, should use the TPP Agreement as a vehicle to coordinate with TPP partners on adopting the same high standards. Common standards and labeling requirements promote trade and effective tobacco regulation and reduce the likelihood of smuggling and trade disputes.*
3. **Make health exceptions for tobacco control explicit.** *The United States should seek to explicitly identify tobacco control measures as among the general exceptions to the TPP Agreement. This exception would limit the ability*

of tobacco companies to abuse TPP dispute resolution to block effective advertising and labeling measures.

- 4. Exclude Vietnam from tobacco tariff reductions.** *Entry of multinational tobacco companies and marketing tactics into Vietnam would be disastrous. Vietnam has joined the WHO Framework Convention on Tobacco Control, but is still implementing its requirements. Cigarette taxes in Vietnam are much lower than the WHO recommends. Its labeling requirements do not yet apply to imported products. A state-owned tobacco company dominates local sales, so there is little incentive for advertising. Forty-six percent of Vietnamese men smoke, but less than two percent of Vietnamese women.*

Benar, apa yang disampaikan Bollyky lebih kepada bentuk proposal konsolidasi kebijakan yang menempatkan kepentingan Amerika sebagai mercusuar agenda global anti-tembakau yang diselaraskan dengan agenda kepentingan industri tembakau global yang berakar di negara itu lewat agenda perdagangan bebas internasional. Akan tetapi dari fakta ini, jelas terlihat agenda pengendalian tembakau global tidak lebih dari agenda politik ekonomi dunia.

Paradoks lain juga terlihat dari perjalanan kampanye anti-tembakau di Amerika. Pada 1998, ada gugatan *class action* yang dilakukan 46 negara bagian terhadap industri tembakau di Amerika yang dianggap menjadi penyebab tingginya biaya kesehatan publik yang harus dikeluarkan. Gugatan itu kemudian menghasilkan suatu perjanjian yang disebut Master Settlement Agreement (MSA) 1998.

Ringkasan isinya antara lain membatasi kegiatan periklanan, *sponsorship*, lobi, dan litigasi khususnya yang menjadikan sasarannya generasi muda; membubarkan tiga organisasi yang terkait industri tembakau (Tobacco Institute, Center for Indoor Air Research, dan Council for Tobacco Research) dan melarang semua hasil kerjanya dijadikan referensi kebijakan perdagangan; membuka akses publik terhadap dokumen-dokumen yang terkait industri tembakau yang dirahasiakan selama proses litigasi berlangsung; mendirikan dan menyediakan pendanaan bagi yayasan pendidikan publik nasional (American Legacy Foundation) yang bertujuan mengurangi jumlah generasi muda yang merokok dan mencegah penyakit terkait rokok; melakukan pembayaran rutin nilai kompensasi yang telah disepakati secara bertahap senilai total minimum US\$ 206 miliar, yang berlaku untuk periode 25 tahun (berlaku untuk Original Participating Manufacture (OPM), Philip Morris Amerika, R.J. Reynolds Tobacco Company, Brown & Williamson Tobacco Corp., dan Lorillard Tobacco Company).

Dalam prosesnya, MSA 1998 juga menghasilkan MSA untuk pasar tembakau tanpa asap (*smokeless tobacco*) yang disusul oleh US Smokeless Tobacco Company bagian dari Philip Morris Amerika. Juga dihasilkan perjanjian pembentukan sebuah konsorsium dana investasi senilai US\$ 5,15 miliar yang disebut National Tobacco Growers' Settlement Trust Fund. Tujuannya mengelola dana kompensasi bagi industri pertanian (petani tembakau) sebagai dampak kerugian yang terjadi akibat MSA 1998. Pada tahap selanjutnya, para petani tembakau Amerika yang berada di 14 negara bagian penghasil tembakau akan mendapat bagian dari hasil pengelolaan dana tersebut.

Dari sinilah paradoks itu tampak terlihat, karena di balik agenda perang anti-tembakau lewat gugatan *class action* yang ditujukan kepada industri-industri besar tembakau Amerika dengan alasan kesehatan publik, justru dihasilkan sebuah sistem proteksi bagi industri

tembakau negara itu. Berdasarkan MSA 1998, jelas sekali dalam 25 tahun ke depan sejak MSA diteken, industri tembakau Amerika telah “diamankan.” Kontradiksi ini terus berlanjut dengan pengamanan potensi nilai perjanjian tersebut yang kemudian dikenal sebagai surat utang tembakau (*tobacco bonds*) untuk sumber pendanaan anggaran negara bagian.

Di sisi lain, proses terwujudnya MSA 1998 pun terjadi di tengah gencarnya pembahasan proposal hukum pengendalian tembakau internasional yang telah berjalan sejak 1994 dan kemudian menghasilkan FCTC pada 2003. Maka dari sudut pandang kepentingan Amerika, MSA 1998 jelas merupakan sebuah bentuk persiapan untuk menjamin industri tembakaunya menghadapi agenda perang global yang akan segera datang.

Fakta lainnya adalah agenda perang global anti-tembakau yang dipelopori Amerika, lebih ditujukan kepada pengendalian industri, yang sebetulnya bertolak belakang dengan klaim bahaya rokok bagi kesehatan. Kampanye itu juga tidak lebih hanya sebuah perang retorika yang memanfaatkan ketergantungan publik terhadap otoritas kesehatan. Tujuannya untuk menciptakan rasa takut dari teror bahaya merokok terhadap kesehatan manusia. Teror ini kemudian menghasilkan *demand* bagi kebutuhan yang muncul untuk menghadapi rasa takut. Menciptakan sebuah peluang pasar untuk produk NRT bagi industri farmasi.

Di sisi lain, tembakau juga diposisikan sebagai *anchor* dalam drama melawan kanker. Tidakkah bila ditanya “apa penyebab penyakit kanker?” persepsi seseorang saat ini akan langsung terarah kepada tembakau atau rokok? Sementara itu, faktor lain yang disebabkan dinamika pertumbuhan industri modern ditempatkan dalam relasi minor. Motif ini tentu tidak mengada-ada apabila persepsi publik terhadap penyebab teror kanker beralih pada kesadaran bahwa ada yang salah dengan gerak industri dalam peradaban modern. Dengan

demikian akan mendorong sebuah perilaku untuk kembali pada gaya hidup alami. Kepercayaan terhadap solusi kesehatan publik pun beralih kepada metode-metode holistik yang sangat jauh dari prinsip-prinsip medis modern, yang bisa dilihat mulai menggejala di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.

Pihak lain yang mendapat keuntungan dari kampanye anti-tembakau adalah industri tembakau itu sendiri. Harus diakui, teror bahaya tembakau yang menyebar secara global telah ikut membuka peluang bagi industri tembakau, khususnya Trans-National Tobacco Company (TTC), seperti Philip Morris International, British American Tobacco, Imperials Tobacco, Japan Tobacco, dan Korea Tobacco & Ginseng (KT&G). Lalu, apa arti dari semua ini?

Jawabannya: ratifikasi FCTC adalah amunisi perang global anti-tembakau untuk menggoyang pemain lain di seluruh dunia yang tidak memiliki kesiapan menghadapi tekanan kebijakan dan tren dominasi global. Tujuannya, untuk menjatuhkan kekuatan industri domestik akibat tekanan kebijakan yang didorong oleh FCTC. Lewat tekanan ini, diharapkan terjadi penurunan tingkat kompetisi, dan membuka peluang pasar baru. Apabila dilihat lebih mendalam, momentum dari kampanye global anti-tembakau yang gencar dilakukan dimaksudkan untuk membuka peluang baru bagi gerakan konsolidasi global terhadap industri tembakau di seluruh dunia. Tujuannya menciptakan kendali potensi keuntungan triliunan dolar dari industri tembakau global yang diwakili kekuatan tertentu.

Selain itu, bila membandingkan sepak terjang Rockefeller-Morgan di industri farmasi khususnya agenda kampanye melawan kanker, tampak kecenderungan yang mengarah pada kemungkinan keterlibatan praktik-praktik yang sama dengan agenda perang melawan tembakau. Apalagi hubungan Rockefeller-Morgan juga telah terikat lama dengan perkembangan industri tembakau, baik di Amerika maupun Eropa. Artinya, industri farmasi yang mewakili

rezim kesehatan dengan industri tembakau berada pada satu kendali kekuasaan dan kepentingan modal yang tidak berbeda. Dari titik ini, bukan suatu yang berlebihan apabila kemudian muncul berbagai spekulasi tentang motif di balik agenda kampanye anti-tembakau, karena tembakau telah ditempatkan sebagai agen ganda, sebagai musuh sekaligus kawan.

Apakah dengan demikian agenda kampanye anti-tembakau akan bermuara pada ditutupnya industri tembakau dan berhentinya konsumsi tembakau atau rokok di dunia?

Kalau dilihat dari kondisi yang ditetapkan dalam MSA 1998 di Amerika, hal itu baru akan terjadi sampai 2023. Sementara menunggu, gerakan ekspansi global perusahaan besar multinasional tembakau dan rokok akan terus membangun gurita industri mereka secara global. Globalisasi dan perdagangan bebas telah menjadi impian bagi kekuasaan modal. Dengan kalimat berbeda bisa dikatakan, sebagai industri yang telah memiliki fondasi yang kuat, kehilangan 20 persen pangsa pasar tembakau di satu negara bukan berarti apa-apa, apabila bisa mendapat 50 persen pangsa pasar di negara lain.

Operasi Konsolidasi Industrialis dan Penguasa Modal Global

“What is also important for the industry outlook is that if this rate of growth continues, absent any further growth in mature market profits, the overall industry profit pool, could double in 15 years.”

(Erik Bloomquist, Januari 2008)

Pada era 1980-1990-an, industri tembakau Amerika Serikat mengalami puncak kejayaannya. Nilai saham perusahaan tembakau menjadi primadona di lantai bursa Wall Street. Potensi investasi tersebut tentu menarik sumber dana publik, yang notabene memiliki nilai yang sangat besar seperti dana pensiun, dana asuransi kesehatan, dan dana lembaga pemerintahan untuk diinvestasikan ke saham perusahaan tembakau.

Pada masa itu juga terjadi pergeseran kekuasaan pasar di industri tembakau di Amerika. R.J. Reynold Tobacco (RJR) yang awalnya memimpin pasar produk tembakau di negara itu di atas 40 persen harus menghadapi persaingan ketat dari Philip Morris Amerika secara progresif yang naik ke puncak pemimpin pasar. Ini diikuti dengan terus turunnya penguasaan pasar oleh RJR yang pada 1995 hanya menguasai tidak lebih dari 25 persen dan American Tobacco yang tak lebih dari 10 persen pasar produk tembakau di Amerika.

Pada era itu, dinamika kompetisi produk dan penguasaan pangsa pasar menunjukkan industri tembakau di Amerika telah mencapai stagnasi atau tingkat jenuh. Dalam ekonomi makro, kondisi ini dikenal sebagai siklus usaha atau konjungtur ekonomi. Ketika gerak roda industri telah mencapai stagnasi, itu juga dapat diterjemahkan bahwa industri tersebut berada pada situasi krisis. Ekonomi kapitalisme telah mengelu-elukan pertumbuhan sebagai roh dari dinamikanya. Tanpa pertumbuhan, dinamika industri tidak ada artinya.

Tak mengherankan kemudian pada era itu, dapat dilihat suatu proses konsolidasi industri oleh perusahaan tembakau secara besar-besaran. Philip Morris mengakuisisi perusahaan makanan dan minuman multinasional besar seperti Miller Brewing Company, General Food, dan Kraft. Mereka juga mengakuisisi RJR Nabisco Holding Group yang diselesaikan pada 2000. Sepak terjang Philip Morris itu disebut-sebut sebagai kegiatan investasi terbesar lewat akuisisi, yang dilakukan perusahaan investasi nonperbankan.

Manuver itu juga memperkuat gerakannya melakukan ekspansi global. Saat ini, Philip Morris International pun terkonsolidasi dalam payung korporasi Altria Group.

Sebagai pemain besar kedua tembakau di Amerika, RJR juga ikut serta dalam era konsolidasi tersebut. Dengan melihat catatan sejarah status saham mereka sejak tahun 1990-an hingga saat ini, bisa dilihat RJR memegang kunci penting atas konsolidasi global yang terjadi. Dalam proses tersebut, semua pemain global industri tembakau—seperti Philip Morris, BAT, dan Japan Tobacco—ikut serta dalam agenda merger dan akuisisi RJR. Mengamati perkembangan dalam tubuh RJR seperti menemukan salah satu titik simpul dari jejaring sindikasi global di industri tembakau.

May 12, 1999

RJR Nabisco Holdings Corp. and Japan Tobacco announced the completion of Japan Tobacco's acquisition R.J. Reynolds. Also, following its annual meeting of shareholders, RJR Nabisco Holdings Corp. board of directors approved the plan to spin-off of R.J. Reynolds Tobacco Co. to shareholders.

As part of the plan, the board declared a 1-for-3 common stock dividend of shares in R.J. Reynolds Tobacco Holdings, Inc. (CUSIP: 76182K 10 5) payable on June 14, 1999, to RJR Nabisco (CUSIP: 74960K 87 6) shareholders of record on

June 25, 2000

R.J. Reynolds Tobacco Holdings, Inc. announced it would acquire, through merger, Nabisco Group Holdings, Inc. (CUSIP: 62952P 10 2) for \$30 cash

per common share following the completion of Philip Morris Companies, Inc.'s acquisition of Nabisco Holdings Corp.

October 27, 2003

RJR and British American Tobacco PLC announced that they had entered into a definitive agreement to combine the assets and operations of their respective U.S. business to form a new publicly traded holding company, Reynolds American Inc. When the transaction was completed, RJR shareholders would exchange their shares on a 1-for-1 basis, for shares in the new company, which would represent 58% of the shares outstanding. The remaining 42% of Reynolds American Inc. common shares would be held by British American Tobacco.

Ada satu fakta yang bisa disimpulkan dengan melihat dinamika pergerakan industri tembakau di Amerika. Bahwa agenda ekspansi global adalah langkah selanjutnya untuk menghadapi krisis yang diakibatkan stagnasi industri tembakau di negara itu. Ekspansi global tidak saja bermakna pada perluasan usaha di tingkat global, tapi juga menciptakan ruang pertumbuhan bagi kapitalisasi industri tembakau global. Untuk bisa menguasai peluang tersebut, sumber daya global pun dikonsolidasikan berada pada satu integritas kepentingan yang solid.

Paradoks dari MSA 1998 yang sudah dibahas sebelumnya, apabila dianalisis lebih mendalam pada perspektif kepentingan perusahaan rokok multinasional untuk memecah kejenuhan pasar, memiliki indikasi yang kuat sebagai bagian dari konsolidasi awal menuju

ekspansi global. Industri tembakau yang juga berkembang di negara lain di dunia menjadi hambatan kompetitif yang akan menghalangi penetrasi perusahaan rokok multinasional dalam menguasai pasar di suatu negara. Ini membuat tekanan yang diberikan lewat suatu hukum internasional pengendalian tembakau dan isu kesehatan akan meningkatkan peluang menembus berbagai hambatan kepentingan. Paradigma inferioritas bagi industri tembakau di dunia yang dibangun membuka peluang penawaran bagi implementasi strategi merger dan akuisisi bagi aset-aset strategis, sekaligus mempersempit daya saing perusahaan skala kecil dengan kemampuan investasi yang terbatas.

Indikasi tersebut terlihat ketika industri tembakau Amerika yang menghadapi tekanan aksi litigasi yang dilakukan negara-negara bagian justru mengakui apa yang dituduhkan para penggugat. Ini seperti yang dilaporkan *Associated Press* pada 21 Maret 1997 bahwa Liggett Group Inc., salah satu produsen terbesar Amerika, melalui pernyataan Bennett S. LeBow, *chairman* perusahaan induk Liggett, The Brooke Group Ltd. Ia mengakui rokok bersifat adiktif dan penyebab kanker. Dia juga mengakui industri tembakau menargetkan pemasaran pada remaja (*minor segment*). Pernyataan tersebut tentu saja kontraproduktif dengan kepentingan industri tembakau yang menghadapi tuntutan miliaran dolar. Ini akhirnya melemahkan posisi industri tembakau Amerika dalam melakukan pembelaan. Gugatan inilah yang kemudian menghasilkan MSA 1998, yang mewajibkan industri tembakau Amerika membayar kompensasi miliaran dolar.

Apabila dilihat dalam gambaran yang lebih besar terkait kepentingan industri tembakau dalam rencana ekspansi global, muncul pertanyaan: apakah MSA 1998 terjadi *by design*?

Bagaimanapun, akibat yang ditimbulkan dari MSA 1998 ikut memperkuat gerakan anti-tembakau yang saat itu sedang dalam proses kampanye terwujudnya suatu hukum internasional pengendalian tembakau, yang kita kenal sekarang sebagai FCTC.

MSA 1998 terlihat sebagai investasi untuk kepentingan yang lebih besar sekaligus langkah-langkah proteksi bagi industri tembakau Amerika dalam menghadapi kejenuhan pertumbuhan dan dampak yang akan diterima industri pertanian tembakau di negara itu.

Dalam periode yang sama, agenda anti-tembakau pun berada pada puncak wacana pengendalian di tingkat global melalui suatu hukum internasional yang mengikat, yaitu FCTC yang diprakarsai oleh WHO. Apakah hal ini kemudian bisa dijadikan momentum kebetulan, apabila periode agenda ekspansi industri tembakau global bersamaan dengan agenda pengendalian tembakau global? Apabila iya, sungguh suatu kebetulan yang sangat menguntungkan.

Dalam periode menuju FCTC sebagai hukum internasional anti-tembakau, pada 1999-2000 tiga besar penguasa di industri tembakau dunia pun ikut menggerakkan arus isu pengendalian tembakau. Mereka adalah Philip Morris International (Altria Group), British American Tobacco (BAT), dan Japan Tobacco. Ini diawali dengan pertemuan ketiganya pada 1 Desember 1999 di Genewa, Swiss, untuk memprakarsai sebuah komitmen bersama untuk berada pada arus tren anti-tembakau yang disebut Project Cerberus. Dalam mitologi Yunani, Cerberus adalah hewan berwujud anjing raksasa berkepala tiga, seperti yang ditampilkan dalam film *Harry Potter* episode pertama. Julukan itu sangat tepat untuk menggambarkan ketiga raksasa industri tembakau yang berada pada satu konsolidasi kepentingan.

Pada 11 September 2001, bertepatan dengan serangan terhadap menara kembar WTC di New York, perusahaan tembakau raksasa yang tergabung dalam Project Cerberus mengumumkan International Tobacco Product Marketing Standard sebagai hasil kesepakatan dari Project Cerberus, yang akan berlaku secara efektif pada pengujung tahun, 31 Desember 2002. Standar itu merupakan sebuah ketentuan etika terhadap kesepakatan bersama dalam menjalankan kegiatan

pemasaran oleh ketiga anggota Project Cerberus dalam operasinya di seluruh dunia. Ini meliputi informasi bagi konsumen, praktik pemasaran, praktik perdagangan dan riset, serta pengembangan produk baru. Itu semua sejalan dengan ketentuan-ketentuan di FCTC. Selain itu, Project Cerberus juga memprakarsai sebuah program bersama untuk mencegah remaja merokok sejalan dengan agenda FCTC.

Dalam perkembangannya, sebagai rumusan kesepakatan Project Cerberus, standar itu memberikan dampak positif bagi tujuan ekspansi global. Seakan-akan sejalan dengan agenda pengendalian tembakau, raksasa Project Cerberus ikut mendorong tekanan yang dihasilkan FCTC bagi para pelaku industri tembakau domestik. Lewat tekanan FCTC, kehancuran para pelaku industri tembakau domestik di negara-negara operasinya akan mendorong terbukanya peluang pertumbuhan dari pangsa pasar yang ditinggalkan. Tidak saja di Amerika, dengan mendukung kebijakan yang ditetapkan FDA—Philips Morris salah satu anggota Project Cerberus—juga melakukan hal yang sama di Indonesia.

Lewat PT HM Sampoerna yang telah diakuisisi sepenuhnya pada 2009, Philips Morris mendukung penuh agenda anti-tembakau yang didesakkan ke dalam regulasi nasional Indonesia oleh gerakan anti-tembakau yang didukung pendanaan Bloomberg Initiative to Reduce Tobacco Use. Bahkan, melalui Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI), suatu lembaga bentukan Sampoerna, mereka secara simultan ikut berpartisipasi dalam mendukung pembentukan regulasi anti-tembakau di negara ini. Selain itu, Sampoerna juga memprakarsai program penyuluhan bagi remaja untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya merokok.

Sangat menarik, mengamati sepak terjang Philips Morris sebagai pemimpin pasar rokok dunia sejalan dengan agenda anti-tembakau. Apabila dilihat dari kacamata logika biasa, hal tersebut bertentangan

dengan kepentingan sebuah perusahaan tembakau yang ikut mendiskreditkan nilai produk yang pasti akan membahayakan prospek bisnis mereka. Namun apabila dikaji lebih mendalam, tindakan Sampoerna dalam perspektif strategis bisa diacungi jempol. Paling tidak ada tiga manfaat yang bisa didapat dari apa yang mereka laksanakan, yang memberikan keuntungan jangka pendek ataupun jangka panjang.

1. Posisi sebagai pemimpin pasar di industri tembakau menempatkan Philips Morris/Sampoerna sebagai representasi dari industri yang kemudian mendapat prioritas dalam pembicaraan terkait regulasi mewakili kepentingan industri. Posisi ini digunakan untuk tetap menjaga kepentingan mereka dalam tercapainya tujuan ekspansi global, yaitu membuka peluang pertumbuhan di Indonesia bagi diri dan mitra-mitra mereka dalam Project Cerberus.
2. Lewat prakarsa program mencegah remaja untuk merokok, Philips Morris/Sampoerna sesungguhnya melakukan investasi "*awareness*" terhadap calon pelanggan di segmen remaja. Ini agar, ketika beranjak dewasa, konsumen mampu menggunakan hak yang didorong oleh perspektif "*pro-choice*" yang menjadi salah satu nilai dari masyarakat modern. Paling tidak persepsi produk yang dikenal adalah produk-produk milik Philips Morris/Sampoerna yang memiliki kredibilitas "*moral*" dan kualitas yang akan memengaruhi konsumen potensial menentukan pilihan produk mereka.
3. Kredibilitas dan tingkat kepercayaan yang dibangun bagi konsumen dan publik secara luas melalui perhatian mereka pada kepentingan publik dan generasi muda ikut membangun kepercayaan investasi terhadap nilai aset mereka di pasar modal.

Terkait agenda ekspansi global oleh raksasa industri tembakau, isu perdagangan bebas dan globalisasi ekonomi sejalan dengan kepentingan mereka. Lewat Unholy Trinity yang terdiri atas Bank Dunia, Dana Moneter Internasional (IMF), dan (WTO; hambatan-hambatan tarif dan nontarif ditembus melalui regulasi-regulasi internasional yang harus diikuti negara-negara anggota WTO atau yang terkait dengan hubungan kerja sama bilateral ataupun multilateral. Sementara itu, Bank Dunia dan IMF ikut berperan lewat paket-paket kerja sama ataupun bantuan yang di dalamnya termasuk persyaratan yang terkait kepentingan perdagangan bebas atau investasi global.

Paling tidak ada beberapa hal dalam ketentuan perdagangan bebas yang menguntungkan bagi agenda ekspansi global industri tembakau.

1. Akses pasar yang terkait hambatan tarif, seperti tarif impor rokok atau bahan baku tembakau.
2. Hak cipta/intelektual yang dirumuskan dalam perjanjian Trade-Related Aspects of Intellectual Properties (TRIPS) terkait perdagangan rokok dan agenda anti-tembakau adalah penggunaan kata “*mild*” dan “*light*” pada produk-produk rokok rendah tar serta nikotin. Selain itu, ada kasus yang sedang memanas di Australia saat ini mengenai kebijakan pemerintah yang akan mengimplementasikan penggunaan desain kemasan polos yang menghapuskan identitas *brand* pada produk rokok.
3. Hambatan teknis perdagangan atau yang dikenal sebagai Technical Barriers to Trade yang diinisiasi WTO. Di dalamnya secara spesifik TBT menyatakan dua parameter mengenai hambatan teknis perdagangan terkait industri tembakau.
 - a. Pertama, *technical regulations must not be more trade restrictive than necessary to achieve a public health or*

other objective (Agreement on Technical Barriers Trade, article 2.2)

- b. Kedua, *where international standards exist, or their adoption is imminent, countries must use them, unless they can meet very stringent tests (Agreement on Technical Barriers Trade article 2.4)*
4. Perdagangan tasa atau yang dikenal dengan General Agreement on Trade in Services (GATS) yang di dalamnya mencakup kesetaraan hak antara pelaku industri asing dan pelaku industri nasional dalam menjalankan usaha di sektor seperti distribusi retail, periklanan, transportasi, penyediaan energi, layanan kesehatan, dan jasa antar.
5. Proteksi investasi, seperti halnya perjanjian perdagangan bebas lainnya, negara memperlakukan investasi asing dan investasi domestik dengan asas kesetaraan tanpa memberikan perlakuan istimewa pada salah satu pihak.
6. Pengecualian kesehatan di dalam perjanjian perdagangan, The General Agreement on Tariff and Trade (GATT), adalah dasar utama dari berbagai perjanjian yang ada di WTO yang di dalamnya juga mengizinkan pengecualian aspek kesehatan seperti yang tercantum dalam artikel XX, yaitu sebagai berikut. *Subject to the requirement that such measures are not applied in a manner which would constitute a means of arbitrary or unjustified discrimination between countries when the same conditions prevail, or a disguised restriction on international trade, nothing in this Agreement shall be construed to prevent the adoption or enforcement by any contracting party of measures ...necessary to protect human, animal or plant life or health.*

Sementara itu, dalam proses pembentukan FCTC sebagai hukum internasional yang mengatur tembakau sebagai komoditas industri dunia sama sekali tidak tersinkronisasi dengan ketentuan yang terkait perdagangan bebas WTO. Bahkan, yang terjadi, FCTC harus menyesuaikan diri terhadap kondisi yang diatur dalam perjanjian terkait perdagangan bebas WTO. Seperti yang tercantum dalam: *“Intergovernmental Negotiating Body of the WHO Framework Convention on Tobacco Control, Fourth Session, Provisional agenda item 4, “WHO framework convention on tobacco control: Co-Chairs’ working papers: final revisions, Working Group 2,” Guiding Principle D.5.(bracketed), January 24, 2002, A/FCTC/INB4/2(a): “Priority should be given to measures taken to protect public health when tobacco control measures contained in this Convention and its protocols are examined for compatibility with other international agreements.”*

Hal ini menunjukkan tujuan FCTC tidak ada keterkaitan yang fundamental terhadap isu kesehatan terkait tembakau yang selama ini digembar-gemborkan sebagai ancaman terbesar manusia. Di balik agenda hukum internasional pengendalian tembakau, FCTC yang diprakarsai WHO justru meletakkan hubungan yang saling menguntungkan bagi agenda ekspansi global industri tembakau dunia. Di sini pemenangnya akan ditentukan oleh kekuatan modal sebagai dasar dari seluruh tata ekonomi kapitalisme modern saat ini. Kepentingan publik yang digadang-gadang sebagai alasan dari perang global anti-tembakau tidak lebih hanyalah suatu kemasam untuk melegitimasi tujuan utamanya. Penggunaan jargon demi kepentingan kesehatan publik tidak diletakkan pada rasionalitas yang proporsional.

Sementara itu, kerugian yang ditimbulkan bagi kepentingan publik itu sendiri tidak lebih dianggap sebagai *“collateral damage”* dalam peperangan. Bukan berlebihan pula bila ada pertentangan dari banyak pihak yang mengatakan isu kesehatan dan FCTC hanya

alat propaganda bagi tercapainya tujuan kepentingan industri serta kapitalis global.

Pada 2009, diselenggarakan sebuah pertemuan untuk melawan agenda perang global anti-tembakau yang disebut Brussels Declaration dalam konferensi The International Coalition Against Prohibition di Brussels pada 27-28 Januari 2011. Deklarasi tersebut ditandatangani kalangan aktivis, jurnalis, akademisi, dan ilmuwan dari berbagai negara. Deklarasi Brussels terutama menggugat penyimpangan terhadap fakta-fakta ilmiah yang digunakan sebagai dasar kebijakan-kebijakan represif dalam bentuk larangan. Salah satunya terkait tembakau yang menempatkan Environmental Tobacco Smoke (ETS) sebagai senjata pamungkas dalam perang global anti-tembakau. (lihat *Brusselsdeclaration.com*).

Gerakan tersebut sangat beralasan. Setelah bertahun-tahun agenda perang anti-tembakau berjalan, banyak hasil studi yang menunjukkan tidak ada perubahan signifikan dari faktor-faktor yang dianggap sebagai persoalan, seperti turunnya angka kematian ataupun angka penderita kanker. Pertentangan kemudian muncul dari kalangan ilmiah bahwa interpretasi terhadap kajian ilmiah seputar dampak tembakau sudah diselewengkan dan dibesar-besarkan yang menjadi dasar dari pengambilan kebijakan-kebijakan terkait tembakau. Apabila merujuk dari penelitian awal terhadap bahaya tembakau, justru ditemukan tidak ada hubungan signifikan mengonsumsi rokok sebagai penyebab kanker. Kalaupun ada, ini berada pada tingkat yang sangat kecil dan akan terjadi pada rentang waktu yang sangat panjang, hampir mendekati batas usia manusia itu sendiri. Lalu, apakah hal tersebut cukup untuk mengatakan bahwa tembakau adalah penyebab kematian utama masyarakat dunia?

Brussels Declaration 2009, Annex 3 – The Imaginary Risks of Environmental Tobacco Smoke

The absence of credible and defensible primary data on lifetime ETS doses or exposures is prima facie evidence that the claimed

risks of ETS are false in any sense of having been proven. Lung cancer develops slowly and generally manifests at advanced ages after cumulative lifetime experiences. This means that even if ETS exposure could predict risk – and it cannot – it should be measured as the sum-total of exposure episodes over the lifetime of individual non-smokers. Yet, as noted, the myriad momentary changes of exposure over lifetimes would be impossible to track, and therefore cumulative assessments of individual exposures are materially impossible. Still, this is what ETS studies falsely claim to have done. Epidemiological studies of ETS have produced statistical estimates of risk based not only on improper exposure data, but also on exposure data that are indisputably illusory. Of the 75 published studies of ETS and lung cancer, some 70 percent did not find a statistically significant increase in risk, and several actually found statistically significant decreases in risk among those with lifelong exposures to ETS. On the whole the overall conclusion of these studies cannot be interpreted as conclusively supporting even a reliable statistical association, much less a truly causal association

Mengenai isu ETS atau Second Hand Smoking (SHS) atau yang kita kenal dengan perokok pasif, saat ini muncul istilah Third Hand Smoking (THS). Istilah ini telah digunakan secara semena-mena dan dilebih-lebihkan sebagai dasar dari gerakan anti-tembakau. Berdalih demi kepentingan publik, regulasi anti-tembakau dianggap sebagai penyelamat dari penyebab utama kematian manusia. Masyarakat dibombardir dengan berbagai penyesatan informasi lewat berbagai media massa. Sementara itu, seiring banyaknya klaim ilmiah tentang bahaya ETS/SHS, tak kalah banyak pula hasil penelitian ilmiah yang menentang klaim bahwa ETS/SHS/THS sebagai sumber utama berbagai penyakit ataupun risiko kesehatan penyebab kematian yang dituduhkan.

Dokter Dio Gori, mantan deputy direktur di US National Cancer Institute dalam penjelasannya pada acara Deklarasi Brussels Januari 2009 mengibaratkan bahaya ETS/SHS yang dibesar-besarkan tersebut adalah “kaisar tanpa pakaian alias telanjang”. Kebenaran yang diagungkan tanpa dasar ilmiah dan jauh dari kenyataan (*lihat salinan rekaman penjelasannya di [youtube.com/watch?v=aw_iOjs57lQ](https://www.youtube.com/watch?v=aw_iOjs57lQ)*). Tak hanya Gori, sebelumnya pada 2003, hasil riset terkait SHS dan hubungannya dengan kematian yang diakibatkan kanker paru-paru dipublikasikan di *British Medical Journal*. Jurnal ilmiah berjudul “” ini menyimpulkan: *Exposure to environmental tobacco smoke was not significantly associated with the death rate for coronary heart disease, lung cancer, or chronic obstructive pulmonary disease in men or women (BMJ VOLUME 326, 17 MAY 2003)*

Kesimpulan yang sama juga diungkapkan oleh hasil penelitian International Agency for Research on Cancer, Lyon, Prancis. *Our results indicate no association between childhood exposure to ETS and lung cancer risk. We did find weak evidence of a dose-response relationship between risk of lung cancer and exposure to spousal and workplace ETS. There was no detectable risk after cessation of exposure. (J Natl Cancer Inst. 1998 Oct 7;90(19):1440-50.)*

Lalu, bagaimana mungkin banyaknya perbedaan yang bertolak belakang dari hasil berbagai penelitian soal ETS/SHS dijadikan dasar untuk menentukan kebijakan yang terkait hajat hidup banyak orang? Larangan-larangan merokok yang sebelumnya berparadigma etika secara drastis kemudian berubah menjadi teror kesehatan dengan digembar-gemborkannya soal bahaya ETS/SHS yang belum terbukti kebenarannya.

John P.A. Ioannidis (dari Department of Hygiene and Epidemiology, University of Ioannina School of Medicine, Yunani; dan Institute for Clinical Research and Health Policy Studies, Department of Medicine, Tufts-New England Medical Center, Tufts University School of Medicine, Boston,

Massachusetts, Amerika) menyimpulkan dalam jurnalnya yang bertajuk “Why Most Public Finding Are False?” Tulisan yang dipublikasikan *PLoS Medicine* pada Agustus 2005 ini berisi sebagai berikut.

- Corollary 1 : The smaller the studies conducted in a scientific field, the less likely the research findings are to be true.*
- Corollary 2 : The smaller the effect sizes in a scientific field, the less likely the research findings are to be true.*
- Corollary 3 : The greater the number and the lesser the selection of tested relationships in a scientific field, the less likely the research findings are to be true.*
- Corollary 4 : The greater the flexibility in designs, definitions, outcomes, and analytical modes in a scientific field, the less likely the research findings are to be true.*
- Corollary 5 : The greater the financial and other interests and prejudices in a scientific field, the less likely the research findings are to be true.***
- Corollary 6 : The hotter a scientific field (with more scientific teams involved), the less likely the research findings are to be true.*

Sepertinya *Corollary 5* sedikit menjelaskan dengan tingginya kepentingan industrialis dan penguasa modal terkait tembakau, kebenaran ilmiah pun memiliki batas tawar-menawar sesuai dengan arus kepentingan yang menyertainya.

Di Indonesia, Profeso. Sutiman Bambang Sumitro (ahli di bidang biologi molekuler Universitas Brawijaya Malang) dan dokter Gretha Zahar juga telah memublikasikan hasil penelitiannya tentang potensi

rokok kretek sebagai media perawatan penderita kanker melalui pendekatan teknologi nano-biologi. Bahkan, sebagai bukti empiris, dokter Subagyo, Ketua Ikatan Dokter Indonesia cabang Kota Malang Raya, sudah merasakan manfaat penyembuhan dengan terapi tersebut, yang menyelamatkannya dari penyakit kanker limpa.

Sejauh ini Sutiman dan Gretha memang *concern* mengembangkan metode nano-biologi untuk mentransformasi kemampuan tembakau sebagai sarana pengobatan penyakit-penyakit degeneratif dengan menggunakan senyawa asam amino. Perspektif yang sama, meski tidak terkait langsung dengan tembakau, juga menjadi semangat perlawanan sebuah lembaga kesehatan, dokter Rath Health Foundation, yang berkedudukan di Amerika, Jerman, dan Belanda. Mathias Rath, sebagai seorang dokter dan peneliti yang juga anggota New York Academy of Science dan American Heart Organization, menemukan hubungan vitamin C dengan penyakit jantung.

Inilah yang melandasi kampanye manfaat *micro-nutrient* (vitamin, mineral, dan asam amino) untuk penanganan berbagai penyakit. Penyakit ini antara lain *arteriosclerosis* (penyebab serangan jantung dan *stroke*), tekanan darah tinggi, gagal jantung, kelainan detak jantung, diabetes, osteoporosis, kanker, serta defisiensi kekebalan tubuh yang menjadi gejala awal bermacam penyakit menular termasuk HIV/AIDS.

Di buku *Nicotine War*, Wanda Hamilton juga mengutip beberapa pernyataan dari banyak tokoh-tokoh ilmuwan mengenai potensi tembakau dalam pengobatan berbagai penyakit. Contohnya kerusakan otak, sebagai bagian dari prosedur *by-pass* jantung non-bedah untuk mencegah gagal jantung, tuberkulosis (TBC), penanganan trauma saraf tulang belakang akut, radang usus, pencegahan *sarkoma kaposi*, penanganan depresi klinis (*anti-depresan*), Alzheimer, dan Parkinson.

Sangat wajar apabila tembakau memiliki potensi medis yang besar. Sejak awal dikenalnya tradisi tembakau oleh bangsa Indian

sebagai penduduk asli Amerika, tanaman ini telah digunakan sebagai medium pengobatan.

Oleh karena itu, di tengah-tengah agenda global perang anti-tembakau, terlihat sebuah tren yang bisa dianggap sebagai sebuah anomali. Istilah Tobacco Pharming kemudian muncul. Industri raksasa farmasi dunia berlomba-lomba mengembangkan teknologi pengobatan mereka berbahan dasar tembakau, tak hanya mengembangkan NRT, tapi juga obat-obatan lain seperti HIV/AIDS, Alzheimer, TBC, dan kanker. Pendekatan teknologi bio-molekuler kemudian menjadi primadona. Tren ini tidak hanya berlaku bagi kepentingan farmasi, tapi juga menjadi primadona di kalangan industri tembakau. Melalui pendekatan teknologi tersebut, industri rokok besar menanamkan investasi mereka untuk riset dan pengembangan tembakau guna mencapai kualitas rokok yang bebas risiko kesehatan.

Berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan *wired.com*, perusahaan raksasa tembakau di Amerika paling tidak telah melakukan 33 percobaan berdasarkan izin yang dikeluarkan United State Department of Agriculture (USDA) sejak 2005. Ini termasuk di dalamnya Philips Morris yang juga menggelontorkan dana US\$ 17,5 juta kepada North Carolina State University pada Desember 2002 untuk memetakan gen tembakau dan melakukan riset-riset lain terkait modifikasi genetik tembakau guna menghasilkan produk rokok yang bebas risiko kesehatan. Selain itu, Vector Tobacco (Liggett Group Inc.) dan R.J. Reynolds Tobacco juga ikut serta dalam perlombaan riset modifikasi genetik pada tanaman tembakau.

Tren tidak hanya terjadi di Amerika. China sebagai negara produsen dan konsumen tembakau yang menempati urutan teratas dunia pun ikut serta. Sejak 1992, pendekatan modifikasi genetik untuk pertanian di China telah dilakukan. Pada 1997, tembakau hasil modifikasi genetik telah dibudidayakan di atas lahan seluas 1,8 juta hektare untuk kepentingan produksi komersial. Seiring dengan itu,

dengan tuntutan situasi global industri tembakau, metode modifikasi genetik untuk tembakau terus dilakukan guna menjawab tantangan tren.

Anomali lain juga terlihat dengan meningkatnya kecenderungan investasi industri tembakau raksasa ke industri farmasi, baik untuk memproduksi NRT maupun produk-produk farmasi lain. Reynolds American, salah satu cabang operasi BAT di Amerika, pada pengujung 2009 melakukan akuisisi terhadap Nicovum, perusahaan farmasi yang beroperasi di Swedia, dan memproduksi NRT dengan merek Zonnic. Sebelumnya, RJR sejak 1997 juga telah mendirikan Targacept, perusahaan farmasi yang memfokuskan diri dalam mendesain, mensintesis, dan menguji senyawa nikotin untuk penggunaan terapi.

Japan Tobacco, sebagai salah satu perusahaan tembakau dunia, sejak awal juga sudah ikut bermain di industri farmasi mulai 1987. Pada 1998, Torii Pharmaceutical bergabung dengan Japan Tobacco Group. Selain itu, Japan Tobacco Group juga menjalankan kemitraan strategis dengan perusahaan farmasi kelas dunia, seperti Roche, Gilead Science, GlaxoSmithKline.

Pada 2007, ada isu mengenai merger antara Philips Morris dan Merck sebagai dua perusahaan yang menempati urutan teratas di masing-masing bidang. Dengan banyaknya tekanan terkait konflik kepentingan, akhirnya merger tersebut tidak dilakukan. Namun hal itu menunjukkan tingginya daya tarik antarkedua lini industri ini untuk tergabung menjadi satu konsolidasi kekuatan industri.

Mengamati pergerakan konsolidasi para industrialis dan penguasa modal yang terjadi pada industri tembakau dunia, paling tidak ada beberapa skenario yang mungkin terjadi sebagai motif di balik perang global anti-tembakau.

Apa pun skenario yang terjadi, entah salah satu ataupun dari keempat skenario tersebut, tembakau seharusnya menjadi persoalan yang harus disikapi dengan kearifan. Gerak tren peradaban global

yang diembuskan laksana badai dan pasang surut arus informasi telah menggiring manusia menuju ketergantungan yang akut. Kepentingan kapitalisme dan kekuasaan global yang bersikap pragmatis menempatkan tembakau ke dalam suatu permainan bisnis. Menempatkan diri pada pusaran arus tersebut tinggal menjadi pilihan atas ukuran-ukuran untung-rugi. Yang membedakannya terletak pada kesadaran untuk meletakkan fondasi nilai dalam mengukur visi ketahanan (*sustainability*) dan berkelanjutan (*continuity*) dalam kerangka kedaulatan.

Pertanyaan pentingnya: bagaimana Indonesia sebagai bangsa yang mewarisi sejarah kebesaran tembakau lewat tradisi kretek menghadapi situasi ini?

Bab V

Potret Ancaman Kampanye Anti-Tembakau di Indonesia

Perang Iman Buta Anti-Tembakau

*All truths are easy to understand once they are
discovered; the point is to discover them.*

(Galileo Galilei, 1564-1642)

*R*etek adalah rokok khas Indonesia. Terbuat dari tembakau yang dicampurkan dengan cengkih, ia telah berkembang menjadi komoditas industri yang menggerakkan sendi-sendi sosial, budaya, dan ekonomi rakyat Indonesia sejak lebih dari seabad yang silam. Keberadaannya pun tidak serta-merta, melainkan terhubung dengan tembakau, yang berabad-abad sebelumnya menjadi bagian dari tradisi kehidupan mayoritas bangsa ini, dan melahirkan nilai-nilai tradisi yang mengakar kuat. Tembakau, karena itu tak bisa dilepaskan dari identitas sejarah dan kebudayaan Indonesia.

Benar, ada klaim sejarah yang menyatakan tembakau berasal dari benua Amerika. Akan tetapi temuan lain yang menyebutkan tembakau bukanlah tanaman asli Amerika tentu juga tidak bisa diabaikan begitu saja. Adalah Otto Kuntze, ahli tanaman dari Jerman yang menyatakan tembakau bukan tanaman asli benua Amerika. Pernyataan Kuntze ini tercantum dalam esainya berjudul “Plants And The Peopling of America” yang diterbitkan *The Popular Science Monthly* 1876. Dalam teori-teori lain yang dikemukakan Kuntze disebutkan, tembakau adalah tumbuhan tropis, dan lebih memungkinkan berasal dari wilayah tropis seperti Asia, Pasifik, dan Afrika. Lewat migrasi manusia, tanaman ini bersama yang lainnya, dibawa oleh para penjelajah ke benua Amerika dan dibudidayakan oleh kelompok masyarakat setempat.

Meski tentu akan banyak perdebatan, tapi teori Kuntze sangat niscaya, terutama bila dihubungkan dengan temuan pada relief Candi Cetho dan Candi Penataran. Relief di kedua candi itu, menurut interpretasi dari para peneliti dari Yayasan Turangga Seta, memberi gambaran tentang kisah hubungan antarbangsa bahkan penaklukan bangsa Nusantara terhadap bangsa di benua Amerika. Artinya, sangat memungkinkan tembakau sebelumnya sudah menjadi bagian dari peradaban bangsa di Nusantara.

Dari sumber-sumber sejarah yang ada, pengenalan orang-orang Nusantara dengan tembakau hingga kini belum mencapai titik terang. Sumber-sumber yang dimiliki hanyalah dari keterangan para cendekiawan, yang kebanyakan orang Eropa, yang berusaha memperjelas sejarah tembakau sebagai bagian dari hegemoni kolonial mereka di Nusantara. George Eberhard Rumphius, ahli tumbuhan Jerman yang bekerja pada Dutch East India Company, menyatakan dalam *Herbarium Amboinense*, tembakau sudah dikenal masyarakat Maluku sebelum kedatangan bangsa Portugis. Namun penggunaan

tembakau bukan melalui tradisi merokok, melainkan lebih kepada keperluan untuk pengobatan. Rumphius kemudian ditentang dengan argumen bahwa sebutan masyarakat Jawa terhadap tembakau, yaitu *tembako* atau *mbako*, bukanlah berasal dari bahasa Jawa asli.

Pendapat lain mengatakan tradisi tembakau ataupun merokok diperkenalkan oleh bangsa Portugis pada abad ke-15. Namun Thomas Stamford Raffles memiliki pendapat berbeda. Dalam bukunya yang berjudul *The History of Java* (1871) disebutkan tradisi tembakau dan merokok diperkenalkan oleh bangsa Belanda pada awal abad 17. Keterangan tersebut didukung juga oleh interpretasi dari naskah Jawa *Babad Ing Sangkala* yang menyatakan “*Kala seda Panembahan syargi/Ing kajenar pan anunggal warsa/Purwa sata siyose/Milaning wong ngaudud*” (waktu mending Panembahan meninggal di Gedung Kuning adalah bersamaan tahunnya dengan mulai munculnya tembakau, setelah itu mulailah orang merokok). Berdasarkan keterangan waktu yang disebutkan dalam *Babad Ing Sangkala*, peristiwa meninggalnya Panembahan itu terjadi pada 1523 Saka atau 1601-1602 Masehi.

Muncul pertanyaan: kalau memang benar, tembakau sudah menjadi bagian dari peradaban Nusantara pada zaman dahulu, mengapa tidak terlihat jejak-jejaknya dalam perjalanan kebudayaan selain yang ada setelah era kolonialisme? Sebagian ahli menyatakan, bencana alam ikut berperan melenyapkan beberapa peradaban di Nusantara termasuk budaya tentang tembakau. Karena kurangnya dokumentasi sejarah yang bisa menjadi sumber referensi, maka disepakatilah bahwa entitas tembakau berasal dari benua Amerika dan kemudian berkembang dalam pembentukan budaya tembakau pada era modern. Akan tetapi sejarah mengenai tembakau juga bukan menjadi persoalan yang terlalu penting. Bagaimanapun, tembakau dan kretek sudah menjadi bagian dari identitas sejarah Indonesia di masa kini, dan itu tidak bisa dibantah.

Sebagai produk olahan tembakau, kretek faktanya sudah dikenal luas di seluruh dunia sebagai produk khas Indonesia. Ada pun cengkih sebagai salah satu bahan ramuan kretek merupakan tanaman endemis Nusantara, khususnya di wilayah Maluku yang sejak dulu dikenal sebagai surganya rempah-rempah. Dari berbagai tradisi tembakau di seluruh dunia, tradisi ramuan rempah cengkih dan tembakau hanya dapat ditemukan di Indonesia, sehingga menjadikan rokok kretek sebagai produk khas Indonesia. Dengan kata lain, kretek sebagai salah satu identitas khas Indonesia, bukan saja merupakan hak sejarah, melainkan juga hak alam Indonesia.

Selain dikenal sebagai rokok berbahan baku tembakau dan cengkih, kretek juga tidak bisa terlepas dari saus yang memberi cita rasa dan menjadi andalan bagi banyak produsen rokok untuk membentuk karakter cita rasa produknya sehingga berbeda dengan yang lain. Saus dalam hal ini hanya sebuah istilah dan sama sekali berbeda saus tomat yang dikenal banyak orang. Saus pada rokok adalah olahan bahan-bahan alami yang berasal dari tembakau itu sendiri, buah-buahan, dan tanaman herbal semisal kencur yang dilarutkan ke dalam etil alkohol. Bahan-bahan itu kemudian diserap oleh rajangan tembakau dan cengkih yang memberi cita rasa khas pada rokok kretek.

Kretek inilah yang kini telah diserbu secara serampangan oleh apa yang kemudian dikenal sebagai kampanye anti-tembakau. Kampanye yang sebagian atau seluruhnya dipelopori oleh raksasa pemodal dunia itu, mencoba membangun imaji yang buruk tentang kretek, dan menyebutkannya sebagai salah satu sumber penyakit dan karena itu berbahaya dikonsumsi. Sayangnya, para penggagas dan penggiat kampanye anti-tembakau itu lupa, kretek dalam sejarahnya justru telah berperan sebagai obat dan mujarab.

Fakta ini dialami oleh penduduk Kudus bernama Haji Djamhari, yang kemudian menjadi cerita tentang asal-muasal kretek. Suatu hari

Pak Haji menderita penyakit dada. Ketika dia mengusapkan minyak cengkih di bagian dada dan punggungnya, dia merasa kondisi tubuhnya menjadi lebih baik. Dia pun mencoba mengunyah cengkih, dan merasa kondisi tubuhnya jauh lebih baik dari sebelumnya. Karena kejadian itu, Haji Djamhari lalu mencampurkan cengkih yang dirajang halus ke dalam lintingan tembakaunya. Setelah merokok ramuan tersebut, Haji Djamhari mengalami kesembuhan dari penyakit dadanya. Sejak saat itu, ramuan tembakau dan cengkih menjadi ramuan primadona, dan dikenal sebagai kretek.

Tentu kejadian yang dialami Haji Djamhari itu bisa dianggap fiktif dan meragukan. Akan tetapi adalah sebuah fakta bahwa kretek juga menjadi bagian dari tradisi kesehatan dan pengobatan modern. Antara lain seperti penelitian tentang kretek yang dilakukan oleh Gretha Zahar. Dia adalah praktisi klinis, dan doktor fisika nuklir dari Institut Teknologi Bandung, yang mendalami metode pengobatan tradisional balur bersama Sutiman Bambang Sumitro, profesor bidang biologi molekuler dari Universitas Brawijaya Malang. Hasil penelitian kedua ilmuwan ini sungguh mengejutkan: kretek lewat metode *divine* ternyata mampu mengatasi kanker dan berbagai penyakit lainnya.

Temuan mereka tentu saja meluluhlantakkan hampir semua anggapan tentang bahaya kretek dan manfaat tembakau bagi pengobatan, seperti penyakit kanker, autisme dan sebagainya. Temuan itu dan juga kejadian yang dialami Haji Djamhari— niscaya juga bertolak belakang dengan apa yang dikampanyekan kelompok anti-tembakau, yang selalu menyatakan rokok atau khususnya rokok kretek berbahaya bagi kesehatan.

Menurut Gretha dan Sutiman, yang membuat rokok menjadi berbahaya adalah kandungan merkuri, senyawa logam berat yang mengontaminasi tembakau dan bahan-bahan lain yang membentuk produk rokok. Tingkat kandungan merkuri di lingkungan hidup manusia akan naik, seiring peningkatan kegiatan industri dan

pertambangan yang menggunakan merkuri dan zat-zat kimia berat lainnya sebagai bahan baku dalam proses produksi, yang juga menghasilkan limbah yang mengontaminasi lingkungan hidup. Proses kontaminasi terhadap tembakau ini sudah terjadi sejak tembakau ditanam, lewat kandungan air tanah yang terkontaminasi, dan penggunaan pupuk buatan. Merkuri yang terkandung di dalam tembakau, rajangan cengkih, kertas rokok, bahkan filter rokok inilah yang menjadikan asap rokok memiliki risiko terhadap kesehatan.

Bukan saja merkuri yang mengontaminasi rokok, melainkan merkuri yang sudah masuk ke dalam tubuh sebelumnya akibat konsumsi makanan atau paparan polusi lainnya, juga ikut berperan meningkatkan bahaya asap rokok yang masuk ke tubuh. Sifat sensitizier merkuri kemudian memengaruhi fungsi-fungsi tubuh dalam mengelola zat-zat radikal bebas yang masuk ke dalam tubuh. Bukan saja radikal bebas yang dihasilkan oleh rokok, tapi juga dari konsumsi makanan ataupun paparan lingkungan. Lalu, zat-zat radikal bebas tersebut mendorong terbentuknya penyakit-penyakit degeneratif, seperti kanker.

Hasil penelitian Gretha dan Sutiman itu tentu sejalan dengan fakta, bahwa sudah berabad-abad lamanya, tembakau dikonsumsi dengan cara dibakar dan dihirup asapnya, dan tidak ditemukan bukti-bukti empiris yang menjadikan semua itu sebagai penyebab utama penyakit dan kematian manusia. Misalnya, dari tingkat populasi, apakah ada penurunan jumlah manusia karena sebagian mati oleh sebab menghirup asap rokok? Faktanya, satu-satunya penyebab penurunan jumlah manusia adalah perang. Akan tetapi fakta ini pun bisa menimbulkan perdebatan karena ketika Perang Dunia II selesai, pertumbuhan populasi penduduk dunia mengalami peningkatan luar biasa (baby boomer), justru ketika rokok menjadi kecenderungan konsumsi manusia.

Temuan Gretha dan Sutiman tentang kegunaan asap kretek untuk pengobatan kanker juga melengkapi temuan ilmiah yang pernah ada sebelumnya. Salah satunya adalah hasil riset Eustace Mullins, yang dituangkan dalam buku *Murder Injection* (1987). Mullins mengungkapkan penyakit kanker tidak ditemukan dalam catatan-catatan pengobatan tradisional. Tidak pula dalam catatan kuno pengobatan tradisi China yang memiliki sejarah ribuan tahun, seperti yang tertulis di *The Yellow Emperor's Classic Internal Medicine*. Penyakit itu pun hampir tidak dikenal dalam komunitas-komunitas tradisional lainnya, di seluruh dunia. Sebaliknya, kanker baru disebut-sebut bertanggung jawab terhadap penyebab kematian manusia menyusul terjadinya Revolusi Industri. Yaitu 2 persen penyebab kematian di Paris, Prancis (1830) dan 4 persen penyebab kematian di Amerika pada periode 1900-an.

Apa yang bisa dikatakan dari temuan ilmiah dan fakta tentang penyakit kanker tersebut?

Hipotesis sementara: penyebab utama penyakit kanker berasal dari kegiatan industri yang meningkat. Penyebabnya, seperti yang diungkapkan oleh Gretha dan Sutiman adalah merkuri dan senyawa-senyawa logam berat berbahaya (amalgam) lainnya yang mencemari hampir semua sumber daya pendukung hidup manusia modern, termasuk tembakau. Artinya, penyebab penyakit kanker dan penyakit degeneratif lainnya, tidak bisa serta-merta bisa ditimpakan sepenuhnya kepada tembakau atau rokok.

Penjelasan sederhananya adalah, apabila persoalan yang paling mendasar tidak ditangani, maka apa pun solusinya hanya akan memperpanjang daftar kerusakan yang terjadi akibat sebuah pemahaman yang (telanjur) keliru. Sementara persoalan yang paling mendasar adalah pemahaman terhadap kapasitas tubuh manusia yang telah dilengkapi berbagai kemampuan pertahanan diri. Sistem pertahanan diri ini bila mengalami gangguan, tentu akan

mengakibatkan serangan yang bisa menimbulkan kerusakan dalam tubuh. Dan serangan kepada sistem kekebalan tubuh, tak hanya berasal dari asap rokok melainkan juga berasal dari produk-produk konsumsi “modern” lain yang sudah terkontaminasi. Penjelasan ini juga menjawab pertanyaan: mengapa di daerah-daerah pedesaan yang jauh dari aktivitas industri, seorang perokok bisa hidup dengan umur ratusan tahun, bahkan dengan kondisi dan vitalitas yang prima.

Kampanye anti-tembakau di Indonesia, karena itu menjadi isu yang tidak pada tempatnya. Landasan ilmiah atau retorika wacana yang digunakan pun, sepenuhnya hanya mengadopsi dari gerakan anti-tembakau di Barat, baik di Amerika maupun Eropa yang harus dikatakan, penuh dengan kepentingan sosial, politik, dan ekonomi, terutama untuk kepentingan para pelaku industri global. Celaknya, gerakan kampanye anti-tembakau yang dimodali oleh pemahaman yang keliru dan didorong oleh intensitas doktrin informasi yang berlebihan, telah membawa mereka pada situasi yang paradoks.

Tentu, gerakan kampanye anti-tembakau tidak bisa sepenuhnya disalahkan. Bagaimana pun proses indoktrinasi melalui informasi-informasi mengenai bahaya merokok yang keliru sudah membentuk sebuah sistem kepercayaan yang cenderung fanatik pada gerakan anti-tembakau Indonesia dan di negara-negara lain. Dalam beberapa hal, kepercayaan fanatik itu telah selalu menolak pandangan yang berbeda dalam menyikapi isu tembakau dan rokok. Setiap pandangan yang berbeda kemudian dianggap sebagai penyesatan, dan dinilai sebagai bentuk pembelaan terhadap industri rokok yang berorientasi pada keuntungan semata dan bukan terhadap kepentingan publik. Sebuah respons yang tentu saja tidak konstruktif, kecuali hanya lebih kepada penyelesaian melalui jalan ego. Jangankan melakukan pengujian atas perbedaan pandangan tersebut, kelompok kampanye anti-tembakau justru mengedepankan alasan-alasan menggunakan metode pencarian “kambing hitam.” Konstruksi mengenai konspirasi tembakau pun

dibangun untuk menyajikan suatu “fakta” tentang adanya kepentingan industri di balik perlawanan terhadap gerakan anti-tembakau.

Sulit untuk tidak mengatakan, semua informasi mengenai bahaya merokok bagi kesehatan yang keliru itu, tidak berasal dari industri-industri besar tembakau (big tobacco). Faktanya, korporasi besar tembakau Amerika seperti Philip Morris, R.J. Reynolds, dan Lolliland; telah mengorganisasi kelompok ilmuwan untuk melakukan pembelaan terhadap klaim-klaim ilmiah soal bahaya merokok hingga mengorganisasi gerakan sosial guna memperjuangkan hak-hak sipil perokok. Semuanya lantas dirasionalisasi menjadi sebuah bentuk penyesatan terhadap motif kepentingan bisnis demi menjaga keuntungan yang selama ini didapat dari komoditas tembakau dan rokok. Menghadapi kampanye anti-tembakau, tentu saja korporasi-korporasi besar itu juga melakukan pembelaan. Akan tetapi pembelaan mereka, bukan untuk menawarkan fakta kebenaran yang sebaliknya dari informasi sesat tentang bahaya merokok bagi kesehatan, melainkan ditujukan menjaga tingkat permintaan (demand). Mereka menggunakan prinsip *doubt is our product*, untuk menghadapi gempuran informasi bahaya merokok, menjaga kesadaran publik atas kebebasan pilihan (*pro-choice*), dan menyajikan analogi-analogi perbandingan untuk menjaga tingkat permintaan.

Kondisi-kondisi itu tentu saja tidak serta-merta bisa dijadikan rujukan melihat persoalan tembakau di Indonesia, terutama setelah semua penjelasan tentang penyesatan bahaya merokok terhadap kesehatan ditolak oleh gerakan kampanye anti-tembakau. Pilihannya adalah mengikuti arus yang berasal dari suatu mata rantai aliran yang sebetulnya juga sudah terdistorsi. Misalnya dengan melihat dari kepentingan industri, karena selain perusahaan besar nasional, faktanya ada ribuan industri kecil dan menengah yang hidup dari tembakau dan berperan dalam pembangunan sosial dan ekonomi nasional. Mereka tidak hanya menghidupi jutaan masyarakat yang

terlibat dalam mata rantai industri, melainkan juga secara tidak langsung menggerakkan perekonomian nasional secara keseluruhan. Lebih dari 100 tahun sebelum kemudian diserang oleh penguasaan asing, kemandirian industri tembakau nasional itu juga terbukti tidak pernah bisa digoyahkan oleh segala bentuk krisis ekonomi. Tembakau, khususnya kretek, telah menyatu pada nilai-nilai tradisi masyarakat Indonesia.

Kini, industri tembakau nasional diperas habis-habisan lewat berbagai kebijakan fiskal, seperti kenaikan cukai yang masuk ke dalam pendapatan negara. Investasi asing pun dengan mudah masuk menikmati kue industri kretek Indonesia. Padahal apabila landasan nilai yang digembar-gemborkan gerakan anti-rokok benar ditujukan demi kepentingan publik, mereka seharusnya bukan saja menghadang industri rokok nasional melainkan juga menyetop industri asing yang masuk ke Indonesia. Faktanya, kebijakan-kebijakan yang dibangun justru cenderung telah meletakkan landasan-landasan nilai yang kontradiktif.

Dengan kata lain, perang global anti-tembakau di Indonesia adalah sebuah perlawanan yang terjadi di tempat yang salah, dengan alasan yang salah, dan oleh orang yang juga salah, tapi dilakukan pada waktu yang tepat dan untuk tujuan yang tepat pula. Bahaya dari gerakan ini, bukan saja karena telah mengabaikan nilai-nilai rasionalitas dan kearifan, melainkan juga telah menciptakan kerusakan fondasi nilai filosofis kebangsaan. Mereka membawa kemunafikan pada sistem berbangsa dan bernegara.

Perebutan Harta Karun

*“That, Your Excellency, is the reason for which the
West conquered the World”*

(Agus Salim, *Diplomat Indonesia*, 1953)

Pertanyaan yang menarik di tengah gencarnya kampanye anti-tembakau adalah posisi industri kretek di Indonesia. Fakta menunjukkan, prospek industri tembakau (rokok) di Indonesia tidak dianggap remeh oleh industri yang sama di tingkat global, kendati tekanan dari gerakan kampanye anti-tembakau juga terus gencar. Salah satu buktinya adalah terjadinya sejumlah akuisisi terhadap perusahaan-perusahaan rokok nasional oleh perusahaan-perusahaan rokok asing. Dan sejak 2005 hingga saat ini, paling telah terjadi tiga kali akuisisi besar. Salah satu di antaranya, yaitu akuisisi yang dilakukan Phillip Morris terhadap Sampoerna, bahkan bisa dikatakan memecahkan rekor akuisisi terbesar di Asia. Semua proses akuisisi itulah yang menyebabkan penguasaan kepemilikan perusahaan rokok nasional berpindah ke tangan asing.

1. **PT HM Sampoerna Tbk.**, produsen merek rokok A Mild, Sampoerna Kretek, dan Dji Sam Soe, diakuisisi Philip Morris International pada Maret 2005 senilai Rp 18,6 triliun untuk kepemilikan 40 persen saham. Pada Mei 2005 dilakukan tender penawaran pembelian seluruh sisa saham milik HM Sampoerna dengan total nilai akuisisi Rp 48 triliun (US\$ 5,4 miliar).
2. **PT Bentoel International Investama**, produsen merek rokok Sejati, Star Mild, Tali Jagat, Bintang Buana, dan Uno Mild, diakuisisi British American Tobacco (BAT) pada 2009 dengan kepemilikan 85 persen saham yang bernilai US\$ 494 juta. Lalu, pada 2011, BAT menyelesaikan penawarannya membeli saham Bentoel yang dikuasai publik sebanyak 14,87 persen. Dengan demikian, penguasaan BAT di Bentoel hampir mencapai 100 persen. Tahun yang sama, BAT juga melepas sebagian saham sebesar 13,4 persen kepada perusahaan investasi UBS AG yang berkantor di London dengan nilai transaksi

Rp 737,612 miliar. Setelah transaksi tersebut, penguasaan saham BAT di Bentoel sebesar 85,55 persen.

3. **PT Trisakti Purwosari Makmur**, produsen merek rokok Master Mild, Win Mild, Lintang Enam, Bheta, dan Pensil Mas International, diakuisisi Korean Tobacco & Ginseng (KT&G) yang dikenal di Indonesia sebelumnya dengan produk Esse pada 2011. KT&G menguasai kepemilikan 60 persen saham senilai 140 juta won (Rp 1,12 triliun).

Perusahaan rokok asing sebetulnya sudah cukup lama beroperasi di Indonesia, bahkan sejak era kolonial. Awalnya, mereka hanya menempatkan Indonesia sebagai pasar dari produk-produknya yang dikenal dengan sebutan “rokok putih.” Belakangan, mereka juga melakukan kemitraan dengan perusahaan rokok nasional. Antara lain seperti yang dilakukan Philip Morris dengan Bentoel pada 1984. Saat itu, Philip Morris memercayakan produksi dan distribusi rokok Marlboro kepada Bentoel untuk pasar Indonesia. Empat belas tahun kemudian, Philip Morris memutuskan mendirikan Philip Morris Indonesia. Sebagai imbalan, Bentoel tetap memiliki hak eksklusif untuk mendistribusikan produk-produk Philip Morris. Ada pun BAT, telah mendirikan unit usaha sejak 7 Agustus 1917.

“Ketertarikan” perusahaan-perusahaan rokok dunia ke Indonesia tentu saja tidak bisa dilepaskan dari fakta bahwa pasar rokok di Indonesia sejauh ini didominasi oleh kretek: diserap 90 persen dan sisanya diperebutkan “rokok putih.” Pada 2002, daya serap “rokok putih” di Indonesia malah turun menjadi 11,5 persen dan terus turun hingga pada 2008 menjadi hanya 7,21 persen. Sementara itu, kretek sebagai cita rasa khas Indonesia tidak bisa tergantikan. Data ini juga menjelaskan tentang loyalitas konsumen terhadap kretek, yang menjadi hambatan bagi perusahaan multinasional rokok asing meningkatkan pertumbuhan.

Dari Survei Sosial Ekonomi Nasional dan Riset Kesehatan Dasar 2007 yang dimuat *Kompas* terungkap, jumlah perokok di Indonesia mencapai 65 juta orang atau 28 persen dari total populasi. Indonesia menempati peringkat ke-3 dunia setelah China dan India. Angka ini, tentu saja bukan kecil bagi perusahaan multinasional rokok asing, dan karena itu peluang pasar di Indonesia sangat menjanjikan bagi investasi mereka.

Peringkat Negara dengan Jumlah Konsumen Rokok Terbesar Dunia

PERINGKAT	NEGARA	JUMLAH	PERSENTASE (populasi)
1	China	390 juta	29%
2	India	144 juta	12,5%
3	Indonesia	65 juta	29%
4	Rusia	61 juta	43%
5	Amerika	58 juta	19%
6	Jepang	49 juta	38%
7	Brasil	24 juta	12,5%
8	Bangladesh	23,3 juta	23,5%
9	Jerman	22,3 juta	27%
10	Turki	21,5 juta	30,5%

Sumber: Laporan WHO tahun 2008

Setelah prakarsa Kerangka Konvensi Pengendalian Tembakau (FCTC) disetujui pada 2003, perusahaan multinasional rokok asing didukung kekuatan modal yang sangat besar, kemudian gencar

melakukan akuisisi terhadap perusahaan kretek nasional Indonesia. Di sisi lain, ribuan perusahaan rokok kretek kecil dan menengah yang ada di Indonesia menghadapi ancaman serius akibat kampanye perang global anti-tembakau yang terus mereduksi kapasitas sumber daya dan ruang gerak mereka. Bahkan, para pemain besar di industri nasional pun menghadapi tekanan yang cukup serius yang diindikasikan oleh penurunan peringkat penguasaan pasar. Sementara di tingkat hulu, pertanian tembakau nasional mengalami ancaman dari kegiatan perdagangan impor tembakau. Tampak di sini, gerakan kampanye global anti-tembakau memiliki hubungan yang erat dengan proses pengerdilan industri rokok kretek nasional.

Menarik bila mencermati momentum akuisisi besar-besaran yang dilakukan perusahaan multinasional rokok asing di Indonesia, bertepatan dengan digagasnya FCTC oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Sebelumnya situasi industri tembakau di Indonesia bisa dinilai sangat stabil. Situasi krisis ekonomi yang menimpa Indonesia pada 1998 tidak berdampak signifikan terhadap industri ini. Pertumbuhan pasar bagi para pelaku industri pun cukup menjanjikan, sehingga kecenderungan intervensi modal untuk menjaga stabilitas ataupun usaha bisa dibilang tidak diperlukan. Fundamental industri tembakau Indonesia telah dibentuk menjadi kekuatan industri nasional yang tidak bergantung pada situasi makro-ekonomi global.

Pascakrisis ekonomi dan politik pada 1998, industri kretek nasional mulai merasakan bentuk tekanan intervensi kebijakan lewat tangan asing. Sebut saja Dana Moneter Internasional (IMF). Dalam paket penyelamatan Indonesia dari krisis, lembaga ini mendorong kebijakan peningkatan cukai dan pengendalian tembakau, seperti pembatasan kandungan tar dan nikotin, pembatasan kegiatan pemasaran (iklan, promosi, dan *sponsorship*), dan larangan merokok di beberapa tempat. Kebijakan ini tertuang dalam rancangan peraturan pemerintah tentang pengamanan rokok bagi kesehatan

yang kemudian disahkan sebagai Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 1999.

Ada yang beranggapan, kebijakan itu bertujuan memberikan peluang yang lebih besar bagi “rokok putih” untuk bersaing memperebutkan pasar Indonesia. Anggapan ini muncul terutama karena pada saat itu juga keluar kebijakan tentang pembatasan tar dan nikotin, yang disambut dengan kampanye tentang bahayanya kedua zat dalam rokok itu oleh kelompok anti-rokok. Pada saat yang sama, kretek dengan segala tradisi dan kekhasan produknya, telah didorong untuk dipahami sebagai produk yang paling banyak mengandung tar dan nikotin. Reaksi awal dari kebijakan dan kampanye tentang bahayanya tar dan nikotin itu, adalah munculnya sikap latah dari industri kretek nasional. Mereka melakukan inovasi, antara lain dengan juga memproduksi kretek *mild* dengan tar dan nikotin berkadar rendah. Sebuah reaksi yang sebetulnya bisa dikatakan sia-sia, karena kenyataannya, kretek tetap tidak tergeser oleh semua kampanye tentang tar dan nikotin.

Kenyataan itulah yang lantas memunculkan spekulasi, bahwa perusahaan-perusahaan rokok multinasional sebetulnya bermaksud menikmati potensi pasar kretek di Indonesia. Bagi mereka bertarung dalam kompetisi yang mengandalkan keunggulan produk, sama saja dengan usaha bunuh diri. Satu-satunya jalan adalah melakukan operasi dengan ikut memproduksi kretek sebagai produk unggulan. Caranya bukan dengan membuat unit produksi baru, melainkan lewat jalan akuisisi perusahaan-perusahaan rokok nasional. Tentu saja dengan kekuatan modal yang berlimpah, strategi akuisisi ini menjadi pilihan yang paling aman dan efisien. Cara ini sekaligus memberikan sumbangan positif bagi nilai investasi mereka di pasar efek, dan berdampak kepada kenaikan aset.

Secara umum, merger dan akuisisi adalah kecenderungan konsolidasi global dari pelaku industri global. Teknik atau cara ini

akan dilakukan, terutama ketika menghadapi tekanan yang muncul pada saat terjadi krisis, baik yang disebabkan faktor-faktor ekonomi maupun kebijakan nasional suatu negara atau di tingkat internasional. Dalam bahasa yang lebih sederhana, momentum krisis adalah peluang untuk melakukan ekspansi bisnis dan perluasan produk perusahaan ke negara-negara yang tidak memiliki fundamental industri yang kuat. Aset-aset yang “sakit” dikonsolidasikan, dan untuk selanjutnya dikuasai dan “disehatkan” kembali.

Dalam dunia industri tembakau, krisis global yang terjadi adalah diakibatkan oleh gerakan perang global anti-tembakau menyusul prakarsa FCTC. Situasi ini tidak bisa dihindari bagi para pelaku industri tembakau. Bagi pelaku industri yang memiliki kekuatan modal seperti perusahaan multinasional sekelas Philip Morris dan BAT, tekanan regulasi tersebut mestinya juga menjadi beban, khususnya bagi pertumbuhan pasar di skala domestik (negara). Namun, sebagai pemain global, sudut pandang tersebut tentu menjadi berbeda. Pertumbuhan lalu tidak diukur oleh skala domestik (negara), tapi pada skala global. Nilai pertumbuhan lalu diukur berdasarkan akumulasi kantong-kantong potensi yang tersebar di banyak negara di seluruh dunia. Dengan demikian, untuk mempertahankan laju pertumbuhan sebagai tolak ukur dinamika industri, ekspansi global menjadi target utama untuk menjawab tantangan dari tekanan regulasi anti-tembakau.

Pangsa pasar rokok dunia saat ini dikuasai oleh empat pemain utama seperti Philip Morris (Amerika), BAT (Inggris), Japan Tobacco (Jepang), dan Imperial Tobacco (Inggris). Sementara itu, negara-negara yang memiliki industri dan menjadi produsen tembakau terbesar berdasarkan volume adalah sebagai berikut.

1. China
2. India
3. Brasil

4. Amerika
5. Uni Eropa
6. Zimbabwe
7. Turki
- 8. Indonesia**
9. Rusia
10. Malawi

Dari sepuluh negara tembakau terbesar tersebut, hampir semuanya menjadi target ekspansi perusahaan multinasional rokok global. Selain sebagai kantong-kantong produsen tembakau yang otomatis memiliki tradisi konsumsi tembakau yang mengakar, negara-negara itu juga mempunyai pasar yang prospektif. Sementara itu, Indonesia yang menempati peringkat kedelapan, bisa dikatakan sebagai satu-satunya negara yang memiliki hambatan produk bagi perusahaan multinasional rokok asing.

Selain dikuasai perusahaan-perusahaan rokok nasional, Indonesia mempunyai karakteristik produk yang khas dengan fondasi loyalitas konsumen yang kuat. Di negara-negara lain, “rokok putih” atau rokok yang berbahan baku tembakau saja, memang sudah menjadi konsumsi yang masif. Definisi produk rokok dunia pun memang sudah terbentuk sebagai “rokok putih.” Untuk mengonsolidasi pertumbuhan industri rokok global, Indonesia tentu menjadi daya tarik yang sangat besar, dan akuisisi Sampoerna oleh Philip Morris International adalah contoh tentang daya tarik yang besar itu.

Persoalannya, ketika diakuisisi oleh Philip Morris, kondisi perusahaan Sampoerna justru sedang berada di atas angin. Saat itu keuntungan bersih perusahaan Sampoerna mencapai Rp 15 triliun dengan angka produksi 41,2 miliar batang. Kenyataan itu menjadikan Sampoerna menguasai 20 persen pangsa pasar rokok Indonesia. Artinya, tidak ada alasan sedang berlangsung tekanan di dalam

perusahaan Sampoerna ketika dibeli oleh Philip Morris. Dengan prospektus yang begitu baik itu, sungguh suatu hal yang ajaib bila Sampoerna kemudian harus menjual seluruh hak kepemilikannya kepada Philip Morris.

Keajaiban lainnya, terjadi pada Mei 2005, ketika Philip Morris mengakuisisi 40 persen saham Sampoerna. Harga saham yang ditawarkan Philip Morris bahkan mencapai Rp 10.600 per lembar, padahal saat itu harga saham tertinggi Sampoerna hanya Rp 8.850 per lembar. Empat tahun kemudian, Philip Morris kembali mengakuisisi sisa saham yang menjadikan mereka penguasa tunggal PT HM Sampoerna. Apa yang bisa dibaca dari pembelian Sampoerna oleh Philip Morris itu?

Seperti yang sudah diulas sebelumnya, ketentuan-ketentuan FCTC lebih mengarah kepada serangan terhadap struktur industri yang memengaruhi tingkat *demand* dan *supply*. Implementasi FCTC karena itu akan sangat berdampak pada struktur industri suatu negara, khususnya para pelaku industri yang orientasinya terbatas pada skala lokal dan nasional. Sehingga dengan demikian, diharapkan kemampuan investasi dan prospek usaha pun akan mengalami penurunan yang esensial. Celakanya, dinamika industri kretek Indonesia, harus diakui tidak hanya dikuasai oleh perusahaan-perusahaan besar nasional melainkan juga oleh ratusan perusahaan kretek kecil dan menengah. Mereka bertahan dengan cara masing-masing. Bahkan ada analogi di kalangan industri kretek khususnya industri kecil dan menengah, bahwa untuk bisa bertahan hidup dan meraup keuntungan, mereka cukup menguasai pangsa pasar seukuran kecamatan.

Tekanan gerakan global anti-tembakau lewat FCTC itulah yang mendorong munculnya paradigma inferioritas, yang menggoyahkan kepercayaan para pelaku melihat prospek industri tembakau di Indonesia. Benar, Indonesia tidak pernah meratifikasi FCTC, tapi

gerakan kampanye global anti-tembakau yang memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat, otoritas kesehatan, dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat terus berusaha mendorong implementasi konvensi itu dengan mengadopsi ketentuan-ketentuannya ke dalam regulasi-regulasi terkait industri tembakau nasional. Tekanan seperti itu, mau tidak mau memaksa para pelaku industri kretek nasional, khususnya kelas kecil-menengah, berguguran.

Situasi itu mengingatkan kepada strategi era kolonial, *divide et impera* atau politik pecah belah untuk menjajah kedaulatan rakyat Indonesia. Berkurangnya pemain di industri kretek menyediakan prospek pertumbuhan baru bagi pemain (besar) lain yang memiliki sumber daya yang lebih kuat. Hasilnya: lebih dari sepertiga (37 persen) pangsa pasar rokok di Indonesia, pada 2009 dikuasai perusahaan multinasional melalui akuisisi.

Peringkat Penguasaan Pangsa Pasar Rokok pada 2009

PERINGKAT	PRODUSEN	PANGSA PASAR
1	HM Sampoerna	24,3%
2	Gudang Garam	21,1%
3	Djarum	19,4%
4	Nojorono	6,7%
5	Bentoel	6 %
6	Philip Morris Indonesia	4,7%
7	BAT Indonesia	2%
8	Lain-lain	15,8%

Sumber: *finance.detik.com* (materi paparan publik Bursa Efek Jakarta pada 25 Mei 2009)

Operasi Infiltrasi terhadap Kebijakan Nasional

“A nation can survive its fools, and even the ambitious. But it cannot survive treason from within. An enemy at the gates is less formidable, for he is known and carries his banner openly. But the traitor moves amongst those within the gate freely, his sly whispers rustling through all the alleys, heard in the very halls of government itself. For the traitor appears not a traitor; he speaks in accents familiar to his victims, and he wears their face and their arguments, he appeals to the baseness that lies deep in the hearts of all men. He rots the soul of a nation, he works secretly and unknown in the night to undermine the pillars of the city, he infects the body politic so that it can no longer resist. A murderer is less to fear. The traitor is the plague.”

(Marcus Tullius Cicero Quotes , *Negarawan Romawi Kuno, 106-43 SM*)

Di Indonesia, isu pengendalian tembakau mulai mengemuka di tingkat kebijakan pada pertengahan 1999, lewat Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 1999 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan. Dampak yang ditimbulkan dari peraturan ini cukup signifikan, yakni menghantam posisi kretek di pasar Indonesia. Pertarungan di tingkat kebijakan ini, sebelumnya hanya dilihat sebagai pertarungan antara industri “rokok putih” dengan industri kretek, berdasarkan fakta terjadinya perubahan tingkat penguasaan pangsa pasar masing-masing. Namun bila dilihat lebih luas, masing-masing momentum termasuk yang terjadi di Indonesia saling bersinggungan.

Pertama, peraturan pemerintah itu hampir bersamaan dengan periode bangkitnya produk Nicotine Replacement Therapy (NRT) oleh industri farmasi dunia seperti yang diungkap Wanda Hamilton dalam *Nicotine War*. Kedua, sebelum keluar peraturan itu, di Amerika keluar Master Settlement Agreement 1998 yang menekan industri rokok di negara itu. Dari dua hal ini, maka bisa diduga keluarnya peraturan pemerintah Nomor 81 Tahun 1999, sebetulnya mengarah pada suatu konsolidasi pihak-pihak yang memiliki kepentingan memanfaatkan peluang di tingkat global.

Benar, setelah Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 1999 dikeluarkan oleh pemerintahan B.J. Habibie, pemerintahan Gus Dur merevisinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2000. Peraturan baru ini memberi keringanan target waktu implementasi ketentuan mengenai kandungan tar dan nikotin yang juga tidak lagi didasarkan pada jenis perusahaan, melainkan jenis produk. “rokok putih” menjadi dua tahun dan kretek tujuh tahun.

Angin segar bagi industri kretek nasional berlanjut pada era pemerintahan Megawati yang mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003. Peraturan itu menghapus ketentuan mengenai kadar tar dan nikotin, dan digantikan dengan kewajiban bagi produsen untuk melakukan uji laboratorium yang terakreditasi guna menentukan kandungan tar dan nikotin pada produk, dan kewajiban mencantumkan pada label kemasan produk sebagai bentuk informasi publik. Pada masa itu, pemerintah juga menempatkan prioritas kepentingan nasional dengan tidak ikut meratifikasi FCTC yang diprakarsai WHO.

Akan tetapi tiga tahun kemudian, agenda pengendalian tembakau kembali mengemuka dalam pembuatan regulasi terkait tembakau di Indonesia. Agenda ini muncul, menyusul momentum kampanye global anti-tembakau dengan keterlibatan tokoh internasional, Michael Bloomberg melalui program Bloomberg Initiative to Reduce

Tobacco Use. Lembaga ini pada 2006 menyediakan dana US\$ 125 juta untuk keperluan melawan tembakau. Sebagian dana itu antara lain digunakan untuk mendukung WHO dan gerakan anti-tembakau lain untuk mendesakkan FCTC di seluruh dunia. Dua tahun kemudian, gerakan ini kembali menggelontorkan dana US\$ 250 juta, dan mendapat sokongan US\$ 125 juta dari Bill Gates. Dari data yang dilansir oleh *tobaccocontrolgrants.com* situs resmi milik Bloomberg Initiative, dapat dilihat sebuah daftar panjang aliran dana mereka ke berbagai kelompok dan lembaga di Indonesia. Dimulai sejak 2007 dan terus berlanjut hingga sekarang.

Di pengujung 2008, berdasarkan rekomendasi dan advokasi dari Lembaga Demografi, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia (mitra menteri keuangan dalam penetapan kebijakan cukai) diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2008 tentang Kenaikan Cukai. Kenaikan cukai ini berdampak pada meningkatnya harga rokok, dan ujung-ujungnya memengaruhi tingkat daya beli konsumen. Bagi pelaku industri, kenaikan itu memengaruhi kemampuan investasi mereka. Apalagi, implementasinya berlaku di depan: sebelum rokok diproduksi, produsen harus terlebih dulu membeli pita cukai untuk menentukan jumlah rokok yang akan diproduksi. Kepentingan siapa di belakang kebijakan kenaikan cukai yang direkomendasikan Fakultas Ekonomi UI itu?

- **Policy Advocacy for Effective Tobacco Tax and Price Measures in Indonesia**
Demographic Institute; Faculty of Economics; University of Indonesia

To influence the policy-makers in Indonesia for undertaking effective tobacco tax and price policy. This will be achieved through relevant advocacy activities and capacity building for raising tobacco

taxes to policy-makers and other stakeholders.

Country : Indonesia

Amount : \$280,755

Start Date : Oct 2008

End Date : Jul 2010

- **Enhancing policy issues for advocacy to policy-makers and related agencies**

***University of Indonesia, Demographic Institute,
Faculty of Economics***

To influence the policy-makers in Indonesia to undertake effective tobacco tax and price policy, through policy advocacy and capacity building.

Country : Indonesia

Amount : \$40,654

Start Date : Jun 2008

End Date : Aug 2008

Tidak berhenti hanya pada pengaruh kebijakan yang terkait pajak dan cukai, Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LD FE-UI) juga menyajikan wacana-wacana lain terkait ekonomi tembakau di Indonesia yang akan memengaruhi pembuatan kebijakan di Indonesia. Isu-isu diarahkan untuk memosisikan kretek sebagai penghambat pertumbuhan ekonomi. Penjelasan sebagai berikut.

1. Analisis kenaikan inflasi yang menjadi salah satu indikator negatif pertumbuhan ekonomi dikaitkan dengan tingkat konsumsi rokok/kretek masyarakat.
2. Analisa kemiskinan yang dikaitkan dengan faktor daya beli masyarakat yang diakibatkan oleh

alokasi untuk konsumsi rokok/kretek.

3. Analisis rendahnya tingkat kesejahteraan buruh tani tembakau di tingkat hulu industri kretek.
4. Analisis ekonomi pertanian tembakau untuk program alih tanaman.
5. Analisis ekonomi tembakau secara menyeluruh dalam kerangka pengendalian tembakau.

Melalui saluran media massa, isu-isu terkait sosial-ekonomi tembakau yang disediakan LD FE-UI disosialisasikan ke masyarakat untuk memengaruhi penilaian dalam arah kebijakan terkait tembakau. Di media, figur-figur anti-rokok berkali-kali menyajikan argumen bahwa regulasi anti-tembakau tidak akan merugikan industri ataupun pendapatan negara yang selama ini mendapat sumbangan lebih dari Rp 60 triliun pada 2011. Tapi pertanyaannya, tidak merugikan untuk industri yang mana?

Cukai misalnya, dihitung oleh jumlah produksi rokok/kretek per batang. Siapa dan bagaimana memproduksinya tidak menjadi persoalan sepanjang semua batang rokok yang diproduksi dan beredar telah membayar cukai. Atas dasar itu, hal ini tentu saja tidak akan memberikan kerugian terhadap pendapatan negara atas cukai. Namun yang terjadi adalah pembunuhan terhadap industri rakyat yang didominasi industri rakyat kecil-menengah.

Ironisnya, kebijakan kenaikan cukai ini justru adalah kabar gembira yang justru diharapkan industri besar yang dikuasai perusahaan multinasional rokok asing untuk meningkatkan keuntungan. Dipublikasikan oleh *seekingalpha.com*, Hermann Waldemer, Chief Financial Officer and Executive Vice President Philip Morris International mengungkapkan pada *teleconference* laporan kuartal kedua, 21 Juli 2011, tentang tidak terpengaruhnya Philip Morris akan kenaikan cukai di Indonesia.

Our business is also doing very well in Indonesia. Thanks to a strong economy and a favorable comparison with a relatively soft second quarter 2010, industry volume grew an exceptional 13.9% in the second quarter of this year. For the full year, we expect the annual growth rate to be in the range of 4% to 6%. Our volume in the quarter was up by 20.7% to 22.6 billion units and our market share grew by 1.6 points to 30.2% with all our Kretek brands gaining or maintaining market share and Marlboro increasing its volume and its share within the wide Cigarette segment despite a reduction in its overall market share. The growing volume, along with continual moderate price increases, is driving strong profitability growth in Asia's second-largest cigarette market after China.

Di luar kebijakan soal cukai, muncul analisis ekonomi pertanian tembakau tentang program alih tanaman. Sebuah analisis yang jelas bukan hanya berorientasi pada pengurangan ketersediaan tembakau, melainkan bertujuan mengurangi atau bahkan menghilangkan sama sekali produksi tembakau nasional untuk digantikan produksi impor. Indikasi ini dapat dilihat dari meningkatnya impor tembakau. Dalam kerangka yang sama yaitu pengendalian, kebijakan impor tembakau tidak diiringi dengan peningkatan pajak impor yang seharusnya dilihat sebagai aspek utama pengendalian tembakau.

Melengkapi itu semua, diterbitkan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 untuk menggantikan Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992. Undang-undang yang baru ini, memuat bagian khusus yang mengatur tembakau sebagai zat adiktif. Ini berbeda dengan undang-undang sebelumnya yang hanya mengatur zat adiktif tanpa mengkhususkannya pada tembakau. Selain itu, dalam undang-undang yang baru juga diatur hal-hal lain

yang terkait ketentuan FCTC, seperti tanda peringatan kesehatan berbentuk tulisan dan gambar pada kemasan serta kawasan tanpa rokok.

Tentu saja munculnya bagian khusus soal tembakau dalam undang-undang itu tidak lepas dari peran gerakan anti-tembakau yang melakukan lobi di tingkat legislatif. Sungguh menarik dalam daftar penerima dana dari Bank Indonesia pada periode pembuatan undang-undang tersebut, terdapat beberapa lembaga yang cukup strategis memengaruhi materi undang-undang.

- **Gaining Political Commitment through Tobacco Control Policy Advocacy at National and Regional Parliaments to Enact the Bill on Controlling the Impact of Tobacco Products on Health and FCTC Indonesian Forum of Parliamentarians on Population and Development (IFPPD)**

To develop and promote national tobacco control legislation which is compliant with the Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) and urge FCTC ratification; to launch a media campaign aimed at raising awareness among parliament members, religious leaders, and the general public; and to advocate for support among Parliament commissions, such as Youth and Education and Health and Labour in order to ensure passage of legislation.

Country : Indonesia

Amount : \$164,717

Start Date : Oct 2007

End Date : Dec 2009

- **To gain political support to pass draft bill on mitigating impact of tobacco products on health
*Indonesian Forum of Parliamentarians on Population and Development (IFPPD)***

To gain political commitment through tobacco Control policy Advocacy at National Parliaments to enact the bill on controlling the Impact of tobacco products on Health and FCTC

Country : Indonesia
Amount : \$28,753
Start Date : Jan 2007
End Date : Jun 2007

- **Tobacco Control Support Centre (TCSC), Indonesia
*Indonesian Public Health Association, Tobacco Control Working Group***

The project aims to establish a national tobacco control support centre to coordinate tobacco control activities in Indonesia and to lead a policy advocacy campaign for changes to the legislation for Smokefree municipalities and health warnings.

Country : Indonesia
Focus : Tobacco Control Policy (general)
Amount : \$542,600
Start Date : Aug 2007
End Date : Aug 2009

Sebelumnya, tembakau secara khusus diatur melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengendalian Dampak Produk Tembakau terhadap Kesehatan. Alatnya perjalanan RUU tersebut di tingkat legislatif kemudian mungkin menyebabkan pengalihan

perhatian kepada undang-undang kesehatan. Perlawanan yang dilakukan berbagai kelompok, baik dari kalangan industri maupun masyarakat umum, ikut mewarnai proses perjalanan RUU. Hingga akhirnya, undang-undang kesehatan yang baru mampu menempatkan pasal khusus tentang tembakau. Sementara itu, proses RUU tembakau ditunda kelanjutannya oleh DPR-RI pada 5 Juli 2011.

Setelah tembakau masuk sebagai prioritas utama dalam undang-undang kesehatan, hal ini memberikan landasan yang kuat untuk mengimplementasikan agenda-agenda lain. Muncul kemudian konsolidasi menyeluruh untuk memetakan situasi sosial, ekonomi, dan politik Indonesia sebagai rencana strategis mendorong agenda anti-tembakau di Indonesia. Dan Bloomberg, tentu saja adalah kasir utama dari agenda ini.

- **Meeting of Indonesia Tobacco Control Network (NGO) Planning 2009**

Tobacco Control Support Center - Indonesian Public Health Association (TCSC-IPHA)

To convene an NGO planning meeting to develop strategic activities to support tobacco control policy advancement in 2009

Country : Indonesia

Amount : \$12,800

Start Date : Jan 2009

End Date : May 2009

Singkatnya, agenda pengendalian tembakau di Indonesia yang digerakkan oleh kampanye anti-tembakau, sebetulnya sudah masuk ke berbagai kebijakan. Melalui tangan-tangan LSM dan lembaga-lembaga mitra pemerintahan, Bloomberg Initiative melakukan operasi infiltrasi terhadap regulasi-regulasi terkait kepentingan agenda anti-tembakau.

Selain bergerak langsung dalam memengaruhi arah kebijakan regulasi, operasi juga melibatkan sasaran-sasaran *stakeholder* industri yang selama ini ikut berpartisipasi dalam dinamika sosial, budaya, dan ekonomi kretek di Indonesia. Membangun wacana-wacana anti-tembakau yang disosialisasikan secara luas di media-media massa menciptakan teror tembakau yang berlebihan kepada masyarakat. Industri musik, olahraga, perfilman, dan pendidikan yang bertahun-tahun didukung industri kretek nasional juga tidak lepas dari sasaran agenda anti-tembakau, baik di tingkat lokal maupun nasional.

- **Building Public and Political Support for the Enactment of a Comprehensive Tobacco Advertising, Promotion and Sponsorship (TAPS) Ban at the National Level**

National Commission for Child Protection

This project in general aims to build support from the public, policy makers and other stakeholders in pushing for a comprehensive TAPS ban policy at the national level. To achieve this objective, this project shall work to (1) heighten the awareness of the public, policy makers and other stakeholders on TAPS ban through monitoring industry behavior and counteractions, and (2) conduct advocacy efforts geared at supporting policy initiatives related to TAPS ban enactment at the national level.

Country : Indonesia

Amount : \$200,000

Start Date : Mar 2011

End Date : Feb 2013

- **Toward TAPS Ban Policy: Advocacy to Action**
National Commission on Tobacco Control

This project aims to Increase public understanding about the harms of tobacco, and raise support for comprehensive tobacco control policies, specifically passage and implementation of a comprehensive TAPS ban in Indonesia .

Country : Indonesia
Amount : \$112,700
Start Date : Feb 2011
End Date : Jan 2012

Dengan dana US\$ 5 juta, Bloomberg Initiative juga meminjam tangan-tangan lembaga di dalam negeri yang dinilai bisa dirangkul untuk menolak tembakau. Antara lain, karena memahami karakter Indonesia yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam, agenda anti-tembakau lalu menggaet lembaga yang mewakili kepentingan umat Islam. Dari daftar yang diungkap dari situs resmi Bloomberg Initiative pada 2009, Organisasi umat Islam sebesar Muhammadiyah pun ikut menerima gelontoran dana Bloomberg. Bersamaan kemudian muncul fatwa dari lembaga ini yang mengharamkan rokok. Sungguh sangat disayangkan apabila nilai-nilai religius yang menjadi landasan moral masyarakat harus diintervensi dan didoktrin oleh kepentingan asing.

- **To mobilize public support towards obtaining religious policy on tobacco control and to support FCTC accession**
Muhammadiyah

Country : Indonesia
Amount : \$ 393,234
Start Date : Nov 2009
End Date : Oct 2011

Selain Muhammadiyah, kelompok lain yang memiliki kompetensi di wilayah religius ikut digerakkan oleh kucuran dana Bloomberg untuk memperkuat operasi.

- **To mobilize public support on tobacco control and to support FCTC accession**

Indonesian Institute for Social Development

The project aims to seek support from interfaith groups to support tobacco control.

Country : Indonesia

Focus : Tobacco Control Policy (general)

Amount : \$322,643

Start Date : Sep 2010

End Date : Aug 2012

- **Advocacy for and Enforcement of Smoke-Free Areas and Advertisement Ban Policies in Java, Indonesia**

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) and Center for Religious and Community Studies

To advocate and enforce district regulations on smoke-free areas in four districts of Java.

Country : Indonesia

Amount : \$454,480

Start Date : May 2008

End Date : May 2010

Benar, pemerintahan Indonesia belum meratifikasi FCTC, tapi itu tampaknya tidak terlalu penting lagi karena sasaran utama dari kampanye anti-tembakau adalah memasukkan implementasi FCTC ke dalam regulasi nasional. Inilah yang terjadi dan terlihat ketika Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 memuat bagian

khusus yang mengatur tembakau sebagai zat adiktif. Dengan “bagian khusus” ini, diharapkan bisa terbangun definisi dan persepsi bahwa tembakau adalah komoditas yang berbahaya bagi masyarakat Indonesia, sama atau setingkat narkotik.

Undang-undang itu, kemudian menjadi dasar utama dari berbagai regulasi anti-tembakau yang dikeluarkan lembaga-lembaga pemerintah yang berwenang di tingkat nasional maupun daerah. Salah satunya adalah revisi Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Dampak Rokok bagi Kesehatan. Setelah itu, muncul rancangan peraturan pemerintah tentang pengendalian dampak produk tembakau bagi kesehatan sebagai pengganti Peraturan Pemerintah 19 Tahun 2003 yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009— yang hampir semua materinya mengacu pada klausul-klausul FCTC. Bloomberg, sekali lagi menggelontorkan dana bagi kelompok-kelompok yang memiliki kompetensi dan nilai strategis dalam memengaruhi arah kebijakan seperti ini.

- **Policy advocacy within the national parliament to gain political commitment of newly elected MPS (2009-2014) to enact the tobacco control bill and FCTC.**

Indonesian Forum of Parliamentarians on Population and Development (IFPPD)

The purpose of the project is to advocate for inclusion of the Bill that is in compliance with the FCTC with the newly elected members of parliament (2009-2014), and gain a commitment to prioritize it for discussions in the year 2010, and enactment thereafter. The project also seeks to motivate the members of parliament of commission IX to urge Minister of Health to accede FCTC.

Country : Indonesia
Amount: \$145,860
Start Date : Jan 2010
End Date : Dec 2010

- **Tobacco Control Support Centre of the Indonesian Public Health Association (TCSC-IPHA)**
Indonesian Public Health Association, Tobacco Control Working Group

The project aims to bring about a policy change through a coordinated NGO strategy for tobacco control in Indonesia. It will develop campaigns for the: introduction of graphic health warnings; implementation of a smokefree ordinance in Palembang; initiation of a smokefree ordinance in Pontianak. It will also develop and support the Indonesian Tobacco Control Network, and further develop TCSC as a resource.

Country : Indonesia
Focus : Tobacco Control Policy (general)
Amount : \$491,569
Start Date: : Sep 2009
End Date: : Aug 2011

- **Advocacy to Support Comprehensive Ban on Tobacco Advertising, Promotion and Sponsorship: Protection on the Rights of the Child**

National Commission for Child Protection (NCCP)

To have a comprehensive ban on tobacco advertising, promotion and sponsorship by amending relevant articles in the Government Regulation No. 19/2003.

Country : Indonesia

Amount : \$455,911

Start Date : May 2008

End Date: : May 2010

- **Working to Ban tobacco industry sponsorship in six targeted music and film industries in Indonesia**

Komisi Nasional Pengendalian Tembakau

(National Commission on Tobacco Control - NCTC)

To work towards a ban on tobacco industry sponsorship in six music and film industries in Indonesia, identify champions among industry representatives to advocate for tobacco-free entertainment.

Country : Indonesia

Amount : \$81,250

Start Date : Dec 2009

End Date : Jan 2011

- **Advocacy to Support Comprehensive Ban on Tobacco Advertising, Promotion and Sponsorship: Protection on the Rights of the Child**

National Commission for Child Protection (NCCP)

To support a comprehensive Ban on Tobacco Advertising, Promotion and Sponsorship through legal action.

Country : Indonesia
Amount : \$158,232
Start Date : May 2008
End Date : May 2010

Ada tiga isu utama yang berhubungan dengan ancaman terhadap industri kretek nasional di dalam rancangan peraturan pemerintah tentang tembakau.

1. Ketentuan Mengenai Kemasan

Implementasi peringatan kesehatan di kemasan dengan menggunakan gambar seperti yang diamanatkan dalam undang-undang kesehatan tentu berdampak pada kemampuan investasi bagi produsen. Mengganti kemasan, meski hanya persoalan desain, tentu akan berdampak pada biaya pengadaan. Setelah tekanan yang dialami akibat peningkatan cukai tembakau yang sudah menyebabkan tutupnya ratusan produsen rokok kecil dan menengah, kebijakan ini akan meningkatkan eskalasi tekanan bagi produsen yang masih mampu bertahan. Belum lagi apabila melihat gejala yang terjadi

di negara-negara yang sudah mengimplementasikan peraturan itu. Gambar peringatan kesehatan dalam kemasan yang jauh dari estetika tersebut cukup vulgar dan mengerikan. Dalam etika komunikasi publik, gambar itu bisa dikatakan tidak pantas untuk ditampilkan. Ini tentu akan memengaruhi potensi penjualan produk.

2. Ketentuan mengenai Periklanan

Implementasi pembatasan iklan dan kegiatan-kegiatan lain yang terkait upaya komunikasi pasar juga dapat dilihat sebagai cara menghilangkan aspek kompetitif dalam industri ini dan meningkatkan potensi monopoli. Dampaknya tidak saja akan berlaku dengan meningkatnya aspek *first entry barriers* bagi prospek investasi baru dalam industri tembakau, tapi juga bagi prospek pengembangan usaha oleh entitas usaha yang sudah ada sebelumnya. Artinya, bagi pemain di industri kretek kelas kecil dan menengah, peluang mengembangkan usaha telah ditutup. Lebih dari itu, dibatasinya kanal komunikasi produsen kepada potensi konsumen akan menguntungkan produsen yang didukung kekuatan modal yang besar. Mereka bisa mengambil langkah-langkah strategis melalui investasi di kanal-kanal distribusi dengan penguasaan/dominasi *display* produk pada unit-unit retail dan kegiatan-kegiatan kehumasan (*public relation*) lewat program *corporate social responsibility* ataupun sekadar publikasi terkait kegiatan perusahaan yang tidak melibatkan produk. Belum lagi faktor kekuatan *brand positioning* perusahaan global yang saat ini didominasi perusahaan multinasional rokok asing merupakan modal yang kuat dalam proses

transisi akibat implementasi kebijakan. Jadi, wajar bagi para pelaku industri kecil dan menengah bahwa ketentuan pembatasan periklanan ini menjadi ancaman serius untuk kelangsungan usaha mereka.

3. Ketentuan mengenai Kawasan Tanpa Rokok

Implementasi kawasan tanpa rokok merupakan kebijakan yang terkait langsung dengan aktivitas konsumen. Kebijakan kawasan tanpa rokok berorientasi membatasi ruang gerak konsumen. Apabila dianalisis lebih dalam, dengan terbatasnya ruang gerak konsumen, kecenderungan awal bukan terhadap pilihan untuk berhenti merokok dari konsumen. Yang terjadi adalah perpindahan pilihan produk (*product shifting*) kepada produk yang mampu mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan yang diciptakan oleh kawasan tanpa rokok. Sebagai contoh, kawasan tanpa rokok di tempat kerja dengan waktu dan ruang yang terbatas. Pilihan berdasarkan efektivitas konsumsi akan mengarah pada karakter produk yang menawarkan waktu konsumsi yang pendek. Selain itu, didorong pemahaman terhadap isu kesehatan yang menyorot kadar tar dan nikotin, pilihan lainnya adalah memilih produk-produk yang menawarkan efektivitas konsumsi sekaligus rendah tar dan nikotin.

Ketiga isu utama tersebut yang dikaitkan dengan perlindungan terhadap kesehatan publik lebih nyata dilihat sebagai langkah-langkah pelemahan dinamika industri kretek di Indonesia saat ini. Artinya, ini ditujukan untuk memperkuat paradigma inferioritas bagi pelaku industri rakyat dalam melihat prospektus bisnis tembakau yang

semakin ditekan secara regulasi dan diancam oleh kekuatan modal yang lebih besar. Bagaimanapun tujuan regulasi anti-tembakau pada akhirnya tidak untuk “menutup” industri, melainkan hanya untuk mengendalikannya yang dalam perspektif global dikonsolidasikan untuk kepentingan industri global.

Di hulu industri yang menjadi ranah pertanian tembakau, berkurangnya jumlah pelaku industri kretek khususnya di tingkat perusahaan-perusahaan kelas kecil dan menengah berdampak pada serapan produk hasil pertanian tembakau. Sudah menjadi pengetahuan umum komoditas hasil pertanian tidak selalu menghasilkan kualitas mutu yang sama. Terdapat tingkatan kualitas yang telah terbentuk sejak awal berkembangnya industri kretek di Indonesia. Tingkatan tertinggi sampai tingkat tertentu di bawahnya menjadi segmen produsen-produsen besar. Sisanya merupakan segmen produsen kelas kecil dan menengah. Ketika tekanan kebijakan yang mengancam prospek usaha produsen kelas kecil dan menengah memunculkan potensi tutupnya perusahaan-perusahaan tersebut, ini berarti juga mengurangi atau bahkan menghilangkan peluang pasar komoditas pertanian tembakau. Belum lagi ancaman impor tembakau yang serta merta akan memberikan dampak bagi potensi nilai tembakau lokal.

Tidak cukup di tingkat peraturan pemerintah, gerakan anti-tembakau Indonesia yang diingkosi oleh Bloomberg juga melihat titik lemah pelaksanaan otonomi daerah. Gerakan mereka karena itu, secara bersamaan dan simultan, juga dilakukan di tingkat daerah.

1. Terwujudnya peraturan wali kota dan peraturan daerah di Kota Bogor terkait kawasan tanpa rokok melalui program ambisius yang disebut “100% smoke free Bogor City”.
2. Terwujudnya Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 88 Tahun 2010 (Pergub 88) sebagai pengganti Pergub Nomor 75 Tahun 2010 mengenai Kawasan

Tanpa Rokok yang secara signifikan menghapus tempat-tempat khusus merokok yang sebelumnya diatur dalam peraturan gubernur sebelumnya. Sementara itu, peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Lingkungan Hidup sebagai dasar Pergub 88 yang lebih tinggi justru menyediakan ruang khusus merokok.

3. Terwujudnya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Palembang.
4. Terwujudnya peraturan daerah ataupun peraturan pimpinan daerah tentang kawasan tanpa rokok di berbagai daerah di Indonesia, seperti yang dapat dilihat dalam daftar gelontoran dana Bloomberg.

Building the capacity of public health systems in Indonesia to implement effective tobacco control. Directorate of Non Communicable Disease Control

The project aims to train the NCDC team and reinforce their capacity to develop and implement a national tobacco control strategy and to support tobacco control activities in at least seven provinces, focusing on 100% smokefree environments. Provincial steering committees will be established.

Country : Indonesia
Focus : Tobacco Control Policy (general)
Amount : \$315,825
Start Date : Sep 2008
End Date : May 2011

**Strengthening Smoke-Free Areas Regulation (SFA) and its Implementation in Semarang
Lembaga Pembinaan dan Perlindungan
Konsumen Semarang**

The purpose of the project will be to advocate for the passage of a city regulation that will strengthen implementation of smoke-free areas, and to support establishment and capacity building of institutions that will administer the enforcement.

Country : Indonesia
Amount : \$99,640
Start Date : Nov 2010
End Date : Oct 2011

**Enforcement of Smoke-free Area Local
Regulation toward a 100% smoke-free Bogor
City. No Tobacco Community**

The project aims to support enforcement of the 100% smoke-free legislation established in May 2010 in Bogor City, West Java. It will accomplish this in close collaboration with the Bogor City Health Office and other key partners through four major strategies. These strategies include continuing enforcement of the smoke-free legislation, strengthening partnerships and linkages with NGO's and others to support the enforcement of the local legislation, building capacity for stakeholders to support law enforcement, and continuing to raise public awareness on the legislation.

Country : Indonesia
Focus : Smokefree
Amount : \$193,968
Start Date : May 2011
End Date : Mar 2013

100 % Smoke free Bogor City by 2010

No Tobacco Community

The project aims to make Bogor City 100% smokefree by 2010 through implementation of existing legislation. Measures will include forming a tobacco control regulatory committee that will monitor and evaluate initiatives. It aims to make public transport 100% smokefree, reduce tobacco promotion and advertising, and develop networks with stakeholders.

Country : Indonesia
Focus : Smokefree
Amount : \$228,224
Start Date : Mar 2009
End Date : Feb 2011

Building the capacity of public health systems in Indonesia to implement effective tobacco control

Swisscontact Indonesia Foundation

The project aims to achieve a 100% smokefree Jakarta by implementation of existing legislation. Measures to build capacity will include the development of a multi-sector enforcement action plan within two years. A Jakarta Clean Air Act Enforcement Committee will be established, and a monitoring and evaluation system will be developed.

Country : Indonesia
Amount : \$360,952
Start Date : May 2009
End Date : Apr 2011

Strengthening Implementation and Enforcement of Smoke Free Policy in Jakarta

Swisscontact Indonesia Foundation

The aim is to have effective implementation of 100% smoke-free policy in the greater Jakarta area. An enforcement plan and procedures will be developed. Its implementation will be supported through capacity building, such as training, inspections, complaint reporting and data management. Mass media, media advocacy and public awareness efforts will increase public awareness of the dangers of second hand smoke dangers and about the policy to complement enforcement activities.

Country : Indonesia

Focus : Smokefree

Amount : \$300,000

Start Date : Jul 2011

End Date : May 2013

Advocacy for and Enforcement of Smoke-Free Area in Jakarta

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesias

The purpose of the project is to pass a special local regulation of smoke-free areas, while at the same time support the enforcement of the Governor Decree No. 88 2010, particularly in two areas: private workplaces and hospitality venues (restaurants/hotels).

Country : Indonesia

Amount : \$127,800

Start Date : Jan 2011

End Date : Dec 2011

Advocacy for and Enforcement of Smoke-Free Areas and Advertisement Ban Policies in Java, Indonesia

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) and Center for Religious and Community Studies

To advocate and enforce district regulations on smoke-free areas in four districts of Java.

Country : Indonesia

Amount : \$454,480

Start Date : May 2008

End Date : May 2010

Namun karena kerasnya perlawanan masyarakat Indonesia, membuat gerakan kampanye anti-tembakau tidak berhenti hanya lewat operasi di tingkat regulasi dan merangkul lembaga-lembaga yang bisa dipengaruhi. Mereka karena itu mempersiapkan gugus tugas yang berperan mengawasi lini-lini terkait regulasi di tingkat politik dan advokasi hukum.

Gaining Political Commitment of the Elected Members of National Parliament (2009-2014) and Advocating for the Enactment of a Comprehensive National Tobacco Control Bill and Accession of FCTC -for Protection of Public Health

Indonesian Forum of Parliamentarians on Population and Development

The purpose of the project is to gain support from the current elected members of parliament (2009-2014) at the national level for the enactment of the Bill on "Controlling the Impact of Tobacco Products on Health"; in compliance with the Framework Convention

on Tobacco Control (FCTC). The project will also seek to advocate with Commission I of the government for FCTC accession

Country : Indonesia

Amount : \$240,000

Start Date : Mar 2011

End Date : Nov 2012

Endorsing Good Governance on Tobacco Policy in Indonesia

Indonesia Corruption Watch

To carry out a good governance campaign with anti-tobacco coalition partners that promote transparency and accountability through activities aiming to encourage fundamental changes in government policies related to governance of tobacco. This broad campaign aims to create good governance for the cigarette industry in Indonesia, while reducing the adverse effect of the tobacco industry upon public health.

Country : Indonesia

Amount : \$45,470

Start Date : Jul 2010

End Date : Jan 2011

Public Interest lawyers for Indonesian Tobacco Control network (PIL-ITCN)

Jakarta Resident Forum (Forum Warga Kota Jakarta) FAKTA

The main purpose of this project will be to focus on the legal support for the smoke free legislation in priority

cities as needed, establishing and building capacity of a network of lawyers to address tobacco control issues, and the formation of a legal network to address tobacco control issues.

Country : Indonesia

Amount : \$154,400

Start Date : Jul 2010

End Date : Jun 2012

Setelah menggarap pengadopsian ketentuan-ketentuan FCTC ke dalam regulasi di Indonesia di setiap lini, gerakan selanjutnya dari kampanye anti-tembakau adalah mendorong pemerintah Indonesia melakukan ratifikasi FCTC. Hal ini antara lain bisa dilihat dari beberapa fakta di bawah ini.

1. Gugatan kasasi terhadap pemerintah dan DPR oleh Koalisi Masyarakat Sipil untuk FCTC, yang di dalamnya terdiri atas Yayasan Layanan Konsumen Indonesia (YLKI) dan koalisi LSM antirokok, seperti Forum Kota Jakarta (Fakta), Yayasan Kemitraan Indonesia Sehat, serta Lembaga Menanggulangi Masalah Merokok (LM3) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hasilnya, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak kasasi tersebut.
2. Gugatan kasasi terhadap pemerintah dan DPR oleh Koalisi Masyarakat Sipil untuk FCTC di Mahkamah Agung sampai saat ini sedang dalam proses.

Kelompok anti-tembakau juga giat melakukan pendekatan langsung kepada pemerintah. Pada 26 September 2011, koalisi kelompok-kelompok anti-tembakau yang diwakili oleh Menteri

Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih, Farid Anfasa Moeloek, Arifin Panigoro, Imam Prasodjo, dan Lasmiati Hanafiah menemui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mendorong agenda anti-tembakau serta ratifikasi FCTC. Bagi mereka, pentingnya posisi Indonesia meratifikasi FCTC tidak saja terkait dengan regulasi anti-tembakau yang membatasi ruang gerak industri dan konsumen kretek. Namun yang lebih penting adalah terwujudnya pencapaian agenda perang global anti-tembakau secara utuh.

Faktanya, FCTC mengatur pendirian klinik-klinik untuk berhenti merokok, sebagai agenda titipan dari industri farmasi. Sementara itu, dari regulasi-regulasi yang diadopsi, belum ada landasan yang kuat untuk mengakomodasi kepentingan tersebut. Ini berbeda dengan RUU tembakau yang saat ini ditunda pembahasannya. Dari draf yang disusun pada 2005, selain aspek menyeluruh dalam mengatur ekonomi tembakau sesuai sistem kapitalisasi modern, terdapat pasal-pasal yang mendorong pendirian klinik-klinik berhenti merokok. Dengan demikian, ratifikasi FCTC menjadi agenda prioritas pasca-infiltrasi undang-undang kesehatan, RPP tembakau, dan peraturan daerah sebagai *milestone* yang memberikan fondasi bagi agenda utama.

Hingga titik ini bisa dilihat, peta gerakan kampanye anti-tembakau dikendalikan sepenuhnya oleh tangan-tangan asing. Sungguh disayangkan apabila akibat pengaruh tangan-tangan asing yang juga menyimpan agenda industri itu, kemudian mengorbankan kepentingan nasional Indonesia.

Mestinya, kalau benar agenda pengendalian produk tembakau menjadi bagian dari kepentingan nasional, akan lebih baik apabila dilakukan tanpa campur tangan asing. Lebih dari itu, peta persoalannya harus dilihat secara menyeluruh dengan tetap menjaga keseimbangan dan stabilitas industri nasional demi kepentingan publik.

Sudut pandang lain yang bisa digunakan adalah mencontoh banyak negara lain seperti China sebagai negara produsen sekaligus konsumen terbesar tembakau, yang menempatkan industri tembakau ke dalam monopoli negara. Dengan demikian, aspek kepentingan publik yang

terkait agenda pengendalian tembakau berada sepenuhnya pada otoritas negara. Atau, secara simultan, selain melakukan fortifikasi regulasi untuk mengendalikan dampak tembakau khususnya terkait isu kesehatan, fortifikasi regulasi juga perlu dijalankan secara seimbang untuk melindungi industri nasional. Dengan kata lain, jangan membuka peluang sebesar-besarnya bagi perusahaan multinasional rokok asing untuk mengambil alih hak kesempatan rakyat Indonesia guna mendapatkan penghidupan dari sumber daya yang dimiliki.

Bab VI

Penutup:

Indonesia Republik Kretek Benteng Terakhir Kearifan dan Nasionalisme Tembakau

“To achieve world government, it is necessary to remove from the minds of men, their individualism, loyalty to family traditions, national patriotism and religious dogmas.”

(G. Brock Chisholm, co-founder of the World Federation for Mental Health, former director of UN World Health Organization, 1945)

Indonesia dalam lintasan sejarahnya telah kenyang dengan pengalaman sebagai bangsa yang terjajah. Lebih dari tiga abad lalu, para leluhur bangsa ini terjebak dalam retorika kepentingan kolonialisme. Terberangus ilusi peradaban dunia baru yang menawarkan mimpi-mimpi kebesaran untuk segelintir kelompok yang mengatasnamakan diri mewakili kepentingan publik. Nyatanya itu harus dibayar mahal oleh seluruh lapisan masyarakat pada generasi pendahulu kita, dikekang dalam kemandirian, dan jatuh ke

dalam kubangan penderitaan yang dalam. Sementara itu, sejarah pun membuktikan arus kolonialisme pada era leluhur kita sebelumnya seiring sejalan berlanjut dalam arus pragmatisme globalisasi (neo-kolonialisme) yang saat ini terus menggerus fundamental kedaulatan suatu bangsa.

Hak kesejahteraan *gemah ripah loh jinawi* yang ditawarkan bumi Nusantara lewat sumber daya alam yang berlimpah perlahan-lahan digantikan dengan hak kesejahteraan yang dikemas apik dalam sajian berlabel warna-warni. Indikator kemakmuran pun sudah beralih dari penuhnya lumbung-lumbung di setiap rumah dan gegap gempita perayaan rasa syukur manusia atas kearifan alam menjadi angka-angka yang tersedia di atas kertas laporan menara-menara pencakar langit dan ingar-bingar perayaan superior kemanusiaan. Ini mungkin tidak bisa terhindari, hukum rimba berlaku bagi yang kuat menjajah yang lemah. Pertanyaannya kemudian siapa yang lemah dan siapa yang kalah?

Di tengah perang global anti-tembakau, dapat dilihat posisi Indonesia dalam industri tembakau dunia. Indonesia masuk ke dalam 10 besar negara produsen tembakau, dengan produksi mencapai 120 ribu ton per tahun, yang artinya tembakau telah menjadi aset sumber daya alam yang memiliki nilai kompetitif di pasar global. Belum lagi, kretek sebagai produk unggulan dan khas Indonesia tidak bisa lepas dari cengkih, yang sejak dulu adalah tumbuhan endemis asli Indonesia. Indonesia sebagai negara produsen cengkih menduduki peringkat pertama dengan produksi mencapai 50 ribu ton per tahun, menguasai 60 persen suplai cengkih dunia. Sementara itu, angka potensi konsumen kretek pun mencapai 65 juta atau 20 persen dari total populasinya. Dengan gabungan dari kapasitas produksi, keunggulan nilai produk, dan potensi pasar yang besar, Indonesia seharusnya memiliki peluang untuk menjadi pemain dunia serta menyajikan potensi kesejahteraan bagi rakyatnya. Namun yang

terjadi justru sebaliknya, tekanan yang dihasilkan oleh kampanye anti-tembakau global terus menurunkan peluang Indonesia, tapi justru meningkatkan peluang negara-negara kompetitor lainnya.

Sejak 17 Agustus 1945, bangsa-bangsa di bumi Nusantara telah mengikat diri pada satu komitmen kebangsaan dan kedaulatan negara. Sejak saat itu pula, bangsa Indonesia menyatakan diri sebagai bangsa yang memiliki kesetaraan dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Bukan saja persoalan pengakuan batas-batas tanah dan samudra beserta isinya, lebih dari itu kesetaraan untuk membangun peradaban dari sumber-sumber daya sejarah, manusia, dan alam menempatkan diri dalam keharmonisan perbedaan dari peradaban-peradaban lain di dunia. Apakah kemudian di tengah pertarungan global saat ini komitmen 66 tahun lalu kembali menempatkan Indonesia sebagai pihak yang terjajah?

Industri kretek nasional telah menjadi bagian dari kebesaran bangsa. Ini lebih dari 100 tahun, lebih tua dari umur komitmen kebangsaan dan bernegara atas nama Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di tanah Nusantara. Pembangunan nasional yang terlaksana di bumi Nusantara tidak lepas dari sumbangsan pendapatan negara yang dihasilkan industri ini. Pada 2011 saja sumbangsannya bagi pendapatan negara dari cukai rokok mencapai Rp 62,759 triliun, menyumbangkan lebih dari 6 persen bagi APBN 2011 yang dipatok Rp 1.169,9 triliun. Nilai yang tidak bisa dianggap remeh tentunya, apalagi bila dibanding penerimaan negara dari industri pertambangan yang hanya memberikan kontribusi senilai Rp 13,77 triliun. Industri pertambangan yang selama ini dianggap sebagai industri strategis pun tidak bisa memberikan nilai pendapatan negara seperti yang diberikan industri kretek, bahkan untuk sepertiga dari yang disumbangkan kretek. Dan nilai tersebut bukan nilai yang semata-mata diberikan oleh pelaku industri kepada negara, melainkan nilai yang disumbang konsumen yang berarti rakyat Indonesia itu

sendiri. Kalau mau dianalogikan, salah satu kelompok masyarakat di Indonesia yang berjasa membayar pajak adalah para penikmat kretek.

Tidak hanya kontribusinya kepada pendapatan negara, dinamika sosial-budaya-ekonomi masyarakat Indonesia pun tidak lepas dari peran kretek. Di bidang olahraga, tidak kurang peran para pelaku industri kretek dalam mendukung perkembangannya Indonesia. Di bidang seni budaya, lagi-lagi apabila diamati, satu-satunya industri yang sering kali mendukung perhelatan-perhelatan seni budaya di Indonesia adalah industri kretek. Bahkan, di bidang pendidikan, ratusan pelajar terbantu menikmati pendidikan di Indonesia yang biayanya semakin tinggi saja. Belum lagi program-program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang dilakukan perusahaan-perusahaan besar. Di tingkat lokal pun, para pelaku industri kecil dan menengah berperan aktif dalam dinamika sosial-budaya-ekonomi masyarakat.

Kretek telah menjadi entitas yang dalam sejarahnya menjadi harta karun bagi para pencari kekayaan di seluruh dunia. Sejarah kolonialisme yang ikut melahirkan industri kretek di Indonesia bahkan berusaha mengeksploitasi sumber daya yang ada lewat program-program tanam paksa untuk memproduksi tembakau dan cengkih. Bahkan, dengan liciknya, cengkih sebagai tumbuhan asli Indonesia kemudian diselundupkan keluar negeri untuk dibudidayakan di daerah-daerah lain yang memiliki kecocokan faktor pendukung perkebunan cengkih, seperti Madagaskar dan Zanzibar. Saat ini, dalam periode waktu yang berbeda, pola itu terjadi secara paralel. Komoditas kretek pun menjadi incaran kekuasaan modal bangsa-bangsa asing lewat penguasaan aset-aset korporasi industri kretek nasional.

Lalu, muncul pertanyaan di tengah tekanan perang global anti-tembakau dan kepungan kepentingan industri rokok global asing

yang mengambil alih dominasi industri kretek nasional. Apakah kue dari industri kretek akan berhenti dinikmati oleh negara dan rakyat Indonesia di tengah karut-marutnya pengelolaan negeri ini?

Jawabannya TENTU TIDAK. Kenikmatan pendapatan dari cukai akan terus dinikmati oleh negara, toh kretek/rokok tetap menjadi komoditas legal yang diperjualbelikan dan para konsumennya tetap membayarkan cukai bagi industri yang nyatanya sudah didominasi perusahaan multinasional rokok asing. Dukungan untuk perkembangan olahraga, pendidikan, seni, dan budaya juga akan digantikan oleh kepentingan industri lainnya. Sejelasa-jelasnya harus dilihat relasi kepentingan negara, industri, dan masyarakat yang ternyata telah diletakkan sebagai jebakan konflik retorika dari paradigma kepentingan publik untuk memuluskan tujuan sesungguhnya. Lalu, siapa yang dikorbankan? Mengapa kemudian harus menolak daripada ikut-ikutan tren anti-tembakau global?

Yang paling dirugikan adalah rakyat Indonesia, individu-individu yang terikat pada satu komitmen kebangsaan dan bernegara. Hilangnya kesempatan ekonomi yang disediakan oleh sumber daya alam Indonesia untuk memanfaatkan kretek (tembakau dan cengkih). Sumber-sumber daya alam tersebut tidak lagi menjadi hak siapa pun yang terikat komitmen kebangsaan dan bernegara di bumi Nusantara ini. Hak tersebut sudah menjadi hak para industrialis penguasa modal asing. Peluang pemanfaatan sumber daya yang tersedia di bumi Nusantara sudah tertutup bagi manusia-manusia di dalamnya.

Sebagai gantinya, rakyat Indonesia hanya diberikan tempat sebagai buruh ataupun pegawai dalam sistem kapitalisasi korporasi mereka dan terjebak dalam segala persoalan kesejahteraan serta retorika ketergantungan kaum yang terjajah. Tidak saja hak ekonomi yang berlaku bagi perorangan atau kelompok, hak bagi korporasi yang dengan bangga membawa identitas nasional dikebiri, sehingga

peluangnya untuk ikut menjadi mercusuar dunia dalam industri tembakau pun tertutup. Sebutan *gemah ripah loh jinawi* hanya menjadi slogan-slogan romantis dari suatu ingatan kebesaran dan kejayaan masa lalu.

Kualitas hidup rakyat Indonesia pun dipaksakan pada ketergantungan sistem kapitalisasi rezim kesehatan. Kesempatan untuk memahami dan memanfaatkan sumber-sumber daya alam yang disediakan bumi Nusantara diberangus. Seperti halnya dengan hampir semua tradisi kesehatan dan pengobatan di dunia yang berlandaskan pemahaman atas manusia secara utuh dan keharmonisan manusia dengan alam lingkungannya yang secara sistematis digeser sebagai sebuah fenomena “alternatif”. Potensi tembakau dan cengkih dalam kretek sebagai sebuah agen alamiah pendukung kualitas hidup bahkan pengobatan dihancurkan.

Seandainya hasil temuan Profesor Sutiman dan Dr. Gretha kemudian diimplementasikan secara besar-besaran di setiap batang kretek yang beredar di Indonesia, rakyat Indonesia akan menikmati kualitas kesehatan yang dapat mudah diakses dengan biaya yang terjangkau. Bahkan, tidak perlu mengeluarkan biaya puluhan juta rupiah untuk melawan penyakit kanker yang ditimbulkan oleh industri itu sendiri. Tentu saja ini menjadi ancaman bagi rezim kesehatan yang dibentuk oleh kepentingan kapitalisasi industri farmasi.

Kebudayaan rakyat Indonesia yang berakar pada kearifan manusianya dalam berinteraksi dengan alam lingkungan dipaksa untuk bergeser pada ketergantungan terhadap roda industri. Sementara itu, roh yang ditanamkan adalah semangat eksploitasi sumber daya alam yang jauh dari keharmonisan. Kalaupun ada, tidak lagi menjadi bagian dari tradisi apresiasi sistem sosial dan budaya dalam kerangka kesadaran masyarakat, tapi atas nama korporasi yang diterjemahkan dalam program-program *corporate social responsibility* (CSR). Industri kretek yang juga ikut dalam arus peradaban lebih dari 100 tahun tak

semena-mena memberangus hak-hak kebudayaan rakyat Indonesia.

Meskipun terkotak-kotak pada kelas besar dan kecil, nyatanya tetap bergerak pada dinamika yang membuka pintu keadilan bagi siapa pun untuk ikut mengambil manfaat di dalamnya. Buktinya, ribuan pabrik kretek dari kelas rumahan sampai kelas pabrikan mewarnai dinamika keadilan industri kretek nasional. Tidak hanya terjebak pada kepentingan untung-rugi, kesadaran atas tradisi dan warisan dari para pendahulu masih melengkapi dinamika kretek. Dalam kekhasannya tersimpan warisan-warisan nilai yang tecermin dari aneka cita rasa yang didapat dari suatu proses kebudayaan. Semangat untuk meneruskan warisan orang tua patut di apresiasi sebagai keharmonisan antar generasi atas kesinambungan proses kebudayaan.

Yang paling mendasar, tembakau, cengkih, rempah-rempah, buah-buahan, dan tumbuhan lain yang saling melengkapi dalam pembuatan kretek senyatanya adalah persembahan alam yang menjadi hak siapa pun untuk memanfaatkannya. Sebuah pertanyaan mendasar yang harus dijawab oleh semua orang, apakah bumi, tanah air tercinta, menumbuhkan segala sesuatu di atasnya untuk membawa kerusakan bagi manusia? Kearifan dan daya pikir manusialah yang menentukan. Bukan sekadar mengandalkan pada akal yang sering kali membawa ke arah jebakan pragmatisme. Suatu sikap yang akan menggerus nilai-nilai hubungan antarmanusia ataupun manusia dengan alamnya.

Bung Karno pernah mengatakan, "*Internasionalisme tidak dapat hidup subur kalau tidak berakar di dalam buminya nasionalisme. Nasionalisme tidak dapat hidup subur kalau tidak hidup dalam taman sarinya internasionalisme.*" (Pidato di BPUPKI, 1 Juni 1945). Yang dihadapi nasionalisme Indonesia saat ini tidak lagi internasionalisme, harmoni hubungan antarbangsa dan negara yang berdiri di atas identitas serta kemandiriannya masing-masing. Internasionalisme telah didorong oleh kepentingan segelintir kelompok untuk

bermetamorfosis menjadi globalisasi atau neo-imperialisme, di mana Bangsa dan negara tidak lagi ditempatkan sebagai suatu entitas mandiri, batas-batas nasionalisme dikaburkan bahkan nasionalisme sendiri ditempatkan sebagai paham yang sesat. Identitas tak lebih hanya bagian dari suatu kemasan untuk menunjukkan nilai jual suatu produk. Kalaupun arus itu telah menjadi suatu keniscayaan dari perjalanan peradaban manusia, kita harus ikut terlibat aktif di dalamnya. Komitmen sebagai satu bangsa dan negara tetap harus menjadi landasan pijak utama kita bersama. Pada titik ini, Bung Karno jauh-jauh hari telah mengguratkan utopia kemandirian bangsa dalam gagasan “Indonesia Berdikari”.

Daftar Pustaka

- Anthony Giddens**, *“The Constitution of Society—Teori Strukturasi Untuk Analisis Sosial”*, Pedati, Cetakan Pertama, 2003.
- Anthony Giddens dan Jonathan Turner**, *“Social Theory Today”*, Pustaka Pelajar, Cetakan Pertama, 2008.
- Alexander Irwan**, *“Jejak-Jejak Krisis di Asia—Ekonomi Politik Industrialisasi”*, Kanisius, Cetakan Pertama, 1999.
- Bonnie Setiawan**, *“Peralihan ke Kapitalisme di Dunia Ketiga—Teori-Teori Radikal dari Klasik hingga Kontemporer”*, Pustaka Pelajar, Insist Press, KPA, Cetakan Pertama, 1999.
- Dean K Forbes**, *“Geografi Keterbelakangan—Sebuah Survei Kritis”*, Edisi Revisi, LP3ES, Cetakan Kedua, 1994.
- Direktorat Jenderal Industri Agro dan Kimia Departemen Perindustrian**, *“Roadmap Industri Pengolahan Tembakau”*, Jakarta, 2009.
- George Ritzer dan Douglas J. Goodman**, *“Teori Sosiologi Modern”*, Prenada Media, Cetakan Pertama, 2004.
- G. Edward Griffin**, *“World Without Cancer—the Story of Vitamin B17”*, American Media, Second Edition, 1997 : <http://www.nccg.org/CancerBook.pdf>
- Eustace Mullins**, *“Murder By Injection—The Story of Medical Conspiracy Against America”*, First Edition, 1988.
- Herbert Marcuse**, *“Manusia Satu Dimensi”*, Bentang, Cetakan Pertama, 2000.

- Ivan Illich**, *“Batas-Batas Pengobatan—Perampasan Hak Untuk Sehat”*, Yayasan Obor Indonesia, Cetakan Pertama, 1995.
- Immanuel Wallerstein**, *“Analisis Sistem Dunia”* dalam *“Social Theory Today”*, Pustaka Pelajar, 2008.
- I. Wibowo**, *“Negara Centeng—Negara dan Saudagardi Era Globalisasi”*, Kanisius, Cetakan Pertama, 2010.
- Jordan Goodman**, *“Tobacco in History and Culture—An Encyclopedia”*, Thomson Gale, Volume I, 2005.
- Johannes Muller**, *“Perkembangan Masyarakat Lintas Ilmu”*, Gramedia, Cetakan Pertama, 2006.
- Joseph E. Stiglitz**, *“Making Globalization Work—Menyiasati Globalisasi Menuju Dunia yang Lebih Adil”*, Mizan, Cetakan Pertama, 2007.
- James Petras dan Henry Veltmayer**, *“Imperialisme Abad 21”*, Kreasi Wacana, Cetakan Pertama, 2002.
- Mansour Fakih**, *“Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi”*, Pustaka Pelajar, Insist Press, Cetakan Ketujuh, 2011.
- Michael R. Bloomberg**, *“Bloomberg by Bloomberg—with Invaluable Help From Matthew Winkler”*, Published by John Wiley & Sons, Inc, 2001.
- Nyoman Kutha Ratna**, *“Metodologi Penelitian—Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya”*, Pustaka Pelajar, Cetakan Pertama, 2010.
- Pip Jones**, *“Pengantar Teori-Teori Sosial—Dari Teori Fungsionalisme Hingga Postmodernisme”*, Yayasan Obor Indonesia, Cetakan Pertama, 2009.
- Peter Burke**, *“Sejarah dan Teori Sosial”*, Yayasan Obor Indonesia, Cetakan Pertama, 2001.
- Suwarsonodan Alvin Y. SO**, *“Perubahan Sosial dan Pembangunan”*, Edisi Revisi, LP3ES, Cetakan Kedua, 1994.

Syed Farid Alatas, *“Diskursus Alternatif Dalam Ilmu Sosial Asia—Tanggapan Atas Eurosentime”*, Mizan, Cetakan Pertama, 2010.

Salamuddin Daeng, Syamsul Hadi dkk, *“Kriminalisasi Berujung Monopoli—Industri Tembakau IndonesiadiTengahPusaranKampanye RegulasiAntiRokokInternasional”*, Indonesia Berdikari, Cetakan Pertama, 2011.

Thomas R. Keene, *“Flying on One Engine—The Bloomberg Book of Master Market Economist”*, Bloomberg Press, 2005: www.bloomberg.com/books

Sumber Artikel :

Allyn Taylor, Frank J. Chaloupka, Emmanuel Guindon, and Michaelyn Corbett, *“The Impact of Trade Liberalization on Tobacco Consumption”* : <http://siteresources.worldbank.org/INTETC/Resources/375990-1089904539172/343TO364.PDF>

Alan D Desantis and Susan E. Morgan, *“Civil Liberties, the Contitution, and Cigars: Anti-Smoking Conspiracy Logic in Cigar Aficionado 1992 – 2001”*, 2004 : <http://www.uky.edu/~addesa01/documents/CivilLiberties>.

Angela M. Eikenberry and Patricia Mooney Nickel, *“Towards a Critical Social Theory of Philanthropy in an Era of Governance”*, SPECT/RE (Social, Political, Ethical, and Cultural Theory Research E-ditions) : <http://www.ipg.vt.edu/Papers/EikenberryNickelASPECT.pdf>

American Lung Association, *“State of Tobacco Control”*, 2008: <http://www.lungusa.org>

Andrew Gavin Marshall, *“Bilderberg 2011: The Rockefeller World Order and the “High Priests of Globalization”*, Global Research, June 16 2011 : www.globalresearch.ca

- Barry A. Finegan dan Garrett J. Finegan**, *“From Discarded Leaf to Global Scourge—The Extraordinary History of the Ascent of Tobacco and its Many Modes of Consumption”* in *“Cigarette Smoke Toxicity: Linking Individual Chemicals to Human Diseases*. Edited by David Bernhard, 2011.
- Carol J. Loomis**, *“David Rockefeller—the \$600 billion challenge”*, CNNMoney, 2010 : <http://features.blogs.fortune.cnn.com/2010/06/16/gates-buffett-600-billion-dollar-philanthropy-challenge/>
- Caroline M. Fichtenberg and Staton A. Glantz**, *“Association of the California Tobacco Control Program with Declines in Cigarette Consumption and Mortality from Heart Disease”*, 2000: <http://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJM200012143432406>
- Chieko Nakajima**, *“Medicine, Philanthropy, and Imperialism: The D jinkai in China, 1902-1945”*, Sino-Japan Studies, Volume 17 (2010), Article 6 : <http://chinajapan.org/articles/17/6>
- Colin Ashley and Michelle Billies**, *“On the Piers and in the Shelters: Queer People of Color, Public Space, and the Management of Homonationalism”*, American University, Washington DC April 17-18, 2010.
- Colby Vorland**, *“Private non profit Foundation & Public Health : Potential conflicts of interest in corporate links”*, 2011: <http://nutsci.org/2011/04/12/private-nonprofit-foundations-public-health-potential-conflicts-of-interest-in-corporate-links/>
- David Evans, Michael Smith, and Liz Willen**, *“Big Pharma’s Shameful Secret”*, Bloomberg Market, December 2005.
- David Hunkar**, *“Global Tobacco Industry: Cigarette Cos. Go Their Separate Ways in Battling Regulation”*, November 2010.
- David Stuckler, Sanjay Basu, and Martin Mckee**, *“Global Health Philanthropy and Institutional Relationships: How Should Conflict*

ofInterestBeAddressed?":<http://www.plosmedicine.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pmed.1001020>

Devra Davis, "*The Secret History of the War on Cancer*", Book Review, American Journal of Epidemiology, Published by Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, 2008.

D. Balbach, Elizabeth M. Barbeau, Viola Manteufel, and Jocelyn Pan, "*Political Coalitions for Mutual Advantage: The Case of the Tobacco Institute's Labor Management Committee*", American Journal of Public Health, June 2005, Vol 95, No. 6.

E. Richard Brown, "*Public Health in Imperialism: Early Rockefeller Programs at Home and Abroad*", 1976 : <http://www.deepdyve.com/lp/american-public-health-association/public-health-in-imperialism-early-rockefeller-programs-at-home-and-hL6fDMmSx1>

Frances A. Stillman, Heather L. Wipfli, Harry A. Lando, Scott Leischow, and Jonathan M. Samet, "*Building Capacity for International Tobacco Control, Research: The Global Tobacco Research Network*", American Journal of Public Health, June 2005, Vol 95, No. 6.

Frank A. Sloan, Jennifer S. Allsbrook, Leanne K. Madre, Leah E. Masselink and Carrie A. Mathews, "*States' Allocations of Funds From the Tobacco Master Settlement Agreement*", 2005: <http://content.healthaffairs.org/content/24/1/220.full.html>

Genti Kostandini and Bradford F. Mills, "*Market Strategies for a Tobacco Bio-Pharming Application: The Case of Gaucher's Disease Treatment*", Selected Paper prepared for presentation at the American Agricultural Economics Association Annual Meeting, Providence, Rhode Island, July 24-27, 2005.

Gregory DL Morris, "*Still They Ride*", Museum of American Finance, 2004: http://www.moaf.org/resources/magazine/data/80/_res/id=sa_File1/Article_80.pdf

- Hebe M.C.Vessuri**, *“The Institutionalization of Western Science in Developing Countries”*, 1994: http://sedlc.ivic.gob.ve/edlc/estudio_de_la_ciencia/quest.pdf
- History.com Staff**, *“From Pope Urban VIII to Bloomberg, Four Centuries of Smoking Bans”*, Published May, 2011: <http://www.history.com/news/2011/05/24/from-pope-urban-viii-to-bloomberg-four-centuries-of-smoking-bans/>
- James Petras**, *“The Ford Foundation and the CIA: a documented case of philanthropic collaboration with the Secret Police”*, 2001: <http://www.ratical.org/ratville/CAH/FordFandCIA.html>
- Jasper Womach**, *“U.S. Tobacco Production, Consumption, and Export Trends—Report for Congress”*, Resources, Science, and Industry Division, 2003 :
- John Heilemann**, *“His American Dream—Bloomberg for President”*, New York Magazine, Published, Desember, 2003.
- John C. Keyser and Nila Ratna Juita**, *“Smallholder Tobacco Growing in Indonesia: Costs and Profitability Compared with Other Agricultural Enterprises”*. The World Bank, 2005. <http://siteresources.worldbank.org/HEALTHNUTRITIONANDPOPULATION/Resources/281627-1095698140167/KeyserINDTobaccoGrowingFinal.pdf>
- Leonard G. Horowitz and Sherri Kane**, *“Pharmaganda—A Study of Conflicting Interest”*: <http://www.jonathanevatt.com/site/20100131346/articles-other-writing/writings-from-other-authors/conflicting-interests-in-the-pharmaceutical-industry.html?format=pdf>.
- Michael Barker**, *“Do Capitalists Fund Revolutions?”*, ZNET, 2007 : <http://www.zcommunications.org/do-capitalists-fund-revolutions-by-michael-barker-1>
- Michael J. Barker**, *“Bill Gates as Social Engineer: Introducing the World’s*

Largest Liberal Philanthropist”, Refereed paper delivered at Australian Political Studies Association Conference, Brisbane, Australia, 6–9 July 2008.

Marketing Research Departement, “*Philip Morris Asia Indonesia Tracking Study*”, 1990.

Michael R. Bloomberg, “*I’m Not Running for President, but...*”, The New York Times, Published, February 2008.

Michael Sparks, “*NGO Participation and the Governance of the FCTC*”, 2002.

Nathaniel Dostrovsky, “*Anti Smoking Initiatives in Nazi Germany: Research and Public Policy*”.

Nathaniel Wander and Ruth E Malone, “*Making Big Tobacco Give In : You Lose, They Win*”, *American Journal of Public Health*, November 2006, Vol 96, No. 11.

Robert N. Proctor, “*A Historical Reconstruction of Tobacco and Health in the US 1954-1994*”: <http://legacy.library.ucsf.edu/tid/vmm56c00/pdf>

Robert N. Proctor, “*Nazi Medicine and Public Health Policy*”, *Dimension : A Journal of Holocaust Studies*, 2011 : http://adl.org/Braun/dim_14_1_nazi_med.asp

Thomas P. DiNapoli, “*Comptroller’s Fiscal Update: The Cost of Deficit Financing*”, May 2010: <http://osc.state.ny.us/reports/2010-deficit-financing-plan.pdf>

Thomas J. Bollyky, “*Beyond Ratification, The Future for U.S. Engagement on International Tobacco Control—A Report of the CSIS Global Health Policy Center*”, Center For Strategic & International Studies, November 2010,

The Bloomberg Initiative: To Reduce Tobacco Use, “*Call for Proposals Round 10, July 2011*”.

- Thomas Kessner and Ariel Rosenblum**, *“Philantropy in American History : The Elite Experience, 1890 – 1940.*
- ThoughtLeadershipSeries**, *“The Global Tobacco Industry”*, Mazars.
- Thomas E. Novotny and Hadii M. Mamudu**, *“Progression of Tobacco Control Policies: Lessons from the United States and Implications for Global Action”*, The World Bank, 2008 : <http://siteresources.worldbank.org/HEALTHNUTRITIONANDPOPULATION/Resources/281627-1095698140167/NovotnyPoliticalEconomy.pdf>
- Toby Miller**, *“How the Media Biopoliticized Neoliberalism: or, Foucault meets Marx”*.
- Tri Handayani**, *“Petani dan Tembakau Gupernemen di Karesidenan Rembang pada Periode Penanaman Tanaman Wajib”*: http://eprints.undip.ac.id/19807/1/Petani_dan_Tembakau_Gupernemen-Tri_Handayani.pdf
- Tri Wibowo**, *“Potret Industri Rokok Indonesia”*, *Kajian Ekonomi dan Keuangan*, Vol. 7, No. 2, 2003. <http://www.fiskal.depkeu.go.id/2010/adoku/Tri-2.pdf>
- World Health Organization**, *“Framework Convention on Tobacco Control—Guidelines for Implementation*, edition 2011.
- World Health Organization**, *“IARC Handbooks of Cancer Prevention”*, Volume 13, 2009.
- World Health Organization**, *“History of the Who Framework Convention on Tobacco Control”*, 2009.

Index

A

Aborsi : 78, 82
Acupuncture : 104
Allopathic Medicine : xiv
ALEC : 120, 122, 123
Altria Group : 119, 120, 129,
132
Akuisisi
Amalgam : 157
American Cancer Society
(ACS) : 100, 106
American Medical Association
(AMA) : 105
American Tobacco Company :
102, 103, 119
Aneksasi : 20
Anomali : xiii, 20, 22, 145, 146
Anti-Cigarettes League Of
America : 54
Anti-Perdukunan : 104, 105
Anti-Tembakau : viii, xi, xii, xiii,
xv, 19, 20, 21, 22, 45, 46, 48,
51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59,
60, 61, 81, 84, 85, 86, 87,
89, 92, 93, 94, 100, 101, 112,
119, 124, 125, 126, 127,

128, 129, 133, 134, 135, 137,
139, 140, 141, 145, 147, 149,
151, 154, 155, 158, 159, 160,
161, 164, 166, 168, 169, 171,
172, 174, 176, 178, 179, 180,
181, 182, 187, 188, 193, 194,
195, 196, 200, 201, 202, 203
Asia : 36, 152, 161, 175, 207,
209, 213

B

Bank Dunia : xiv, 37, 38, 39, 40,
41, 137
Batu Bara : 80
Bayer : 80, 112, 114, 120
Belanda : 39, 58, 59, 144, 153
Big Tobacco : 159
Bilateral : 137
Biologi : 116, 155
Bloomberg
Business News (BBN) : 68
Family Foundation : 73
Michael Ruben : xii, 65
New Energy Finance : 83
Initiative : iv, xi, 86, 87, 88,
89, 91, 93, 135, 171, 172,

178, 180
Princeton : 68
L.P : 68, 69, 83, 84, 100, 110
Bill & Melinda Gates
Foundation : 89, 90, 100
Biomedis : 32
British American Tobacco : 58,
102, 119, 128, 132, 134, 161
British Medical Journal : 59, 142
Brusselss Declaration : 140
Budaya Lokal : 28
Burland, Gro Harlem : 60

C

Camels
Campaign For Tobacco-Free
Kids : 86
Cengkih : 151, 154, 155, 156,
200, 202, 203, 204, 205
Chase Manhattan Bank : 112
China National Tobacco : 21
Chiropractic : 104
Chronicle Of Philanthropy The
: 74
Columbus : 51
Coordinating Conference On
Health Information (CCHI) :
105
Cukai : vi, 55, 57, 160, 164, 172,
173, 174, 175, 185, 201, 203
Codex : 118

Codex Alimentarius : 117

D

Dalil Kesehatan Masyarakat : 19
Dana Bloomberg : 89, 180, 181,
188
David Rockefeller : 75, 110, 123
Djamhari : 154, 155
Dewan Kota : 75, 76
Double Standard : 19, 43
Drug Trust, The : 113, 114
Dunia Ketiga : xiv, 21, 24, 25,
28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36,
39
Pertama : xiv

E

Ekspor : 53, 59
Environmental Tobacco Smoke :
61, 140, 142
Epidemi : iv, 32, 55
Epidemiologi : 55, 57, 59
Epistemologi : 27, 28, 29

F

FAO : 20, 117, 118, 123
FCTC : v, xiii, 20, 21, 45, 46, 52,
60, 61, 87, 93, 112, 119, 120,
123, 124, 127, 128, 133, 134,
135, 139, 140, 160, 166, 168,
171, 172, 175, 176, 180, 181,

182, 193, 194, 195
Filantropis : iv, v, vi, 19, 20, 43,
46, 74, 85, 99, 100, 115
Forbes : 73, 92
Forum Warga Kota Jakarta
(FAKTA) : 194
Foucault, Michel : 31, 32, 46

G

Gates, Bill : 86, 89, 100, 172
Gates Foundation : 89, 90, 100
GATT : 39, 42, 118, 138
General Motor Cancer Institute :
107
German Allopathic School Of
Medicine : 108
Giddens, Anthony : 27, 32, 38
GlaxoSmithKline (GSK) : 112,
113, 114, 121, 146
Globalisasi : 19, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 34, 35, 36, 37, 38, 40,
41, 43, 44, 47, 48, 80, 81,
129, 137, 200, 205
Global Health At The
Rockefeller Foundation : 92
Global Tobacco Research : 119

H

Harvard Business School (HBS) :
71
Hamilton, Wanda : 111, 114,

144, 171
Hegemoni : 19, 20, 28, 29, 152
History Of Java, The : 153
Hitler : xi, 55, 56
HIV/AIDS : iv, 81, 144, 145
Hoechst Marion Roussel : 112
Homeopati : 104
Hukuman Mati : 53, 79, 82

I

Iatrogenesis : xiv, 32, 46
Intitut Teknologi Bandung : 155
IG Farben : 155
IGO : 39, 40
Illich, Ivan : xiv, 31, 46
IMF : xiv, 37, 38, 39, 40, 41,
137, 164
Imigran : 79
Imperialisme Diagnostik : xiv,
31
Imperial Tobacco Company :
102
Imperium : 97, 103, 107, 110,
111
Impor : 22, 41, 44, 45, 47, 65
International Tobacco Product :
134
Marketing Standard : 134
India : 20, 21, 36, 87, 152, 163,
166
Indonesia : iii, iv, xi, xiii, xiv,

- xv, xvi, 19, 20, 21, 22, 36, 40, 43, 44, 45, 47, 58, 59, 84, 86, 87, 118, 128, 135, 136, 144, 147, 149, 151, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206
- Industri
- Farmasi : v, viii, xii, xiii, 46, 83, 84, 97, 98, 104, 107, 111, 112, 113, 115, 117, 118, 119, 127, 128, 146, 171, 195, 204
- Kretek : xvi, 45, 46, 58, 59, 160, 161, 164, 165, 168, 170, 171, 174, 179, 185, 186, 187, 201, 202, 204, 205
- Tembakau : 22, 46, 57, 58, 60, 83, 84, 103, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 139, 145, 146, 160, 161, 164, 166, 168, 169, 186, 196, 200, 203
- Rokok : xii, 46, 59, 145, 158, 160, 164, 167, 171, 202
- Indoktrinasi : 158
- Informasi : 23, 66, 73, 85, 110, 134, 142, 147, 158, 159, 171
- INGO : 39, 40
- Inggris : 23, 25, 39, 53, 58, 60, 102, 112, 114, 117, 160
- Interpretasi : 140, 152, 153
- Iptek : 59, 119
- Institute For Global Tobacco Control : 92
- J**
- Japan Tobacco : xii, 119, 128, 131, 134, 146, 166
- Jepang : 20, 36, 37, 40, 43, 47, 54, 59, 163, 166
- Jerman : iii, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 104, 112, 113, 114, 116, 144, 152, 163
- Journal Of American Medical Association* : 59
- Johns Hopkins School Of Medical : 101
- Johns Hopkins University : 86, 91, 92, 94, 97, 98, 100
- Bloomberg School Of Public Health : 91, 92, 99, 100
- Johnson & Johnson : xii, 100, 112, 114, 115
- John Pierpont Morgan (J.P. Morgan) : 102, 103, 106, 107, 110, 111, 112, 113, 115,

116, 118, 119, 128
J.P. Morgan Chase : 115, 116,
118, 119, 128

K

Kapitalisme : v, vi, xii, xiv, xvi,
19, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 31, 33, 35, 36, 39, 40, 41,
43, 46, 47, 70, 81, 85, 95, 98,
103, 122, 130, 139, 147
Kanker : iii, iv, 55, 57, 59, 100,
106, 107, 108, 109, 110, 111,
118, 127, 128, 133, 140, 142,
144, 155, 156, 157
Kebijakan
Anti-Tembakau : 53, 54, 55,
56, 57, 58, 60, 81, 84, 87, 89
Lingkungan Dan Pemanasan
Global : 80
Perdagangan Bebas : 80, 118
Kekuasaan Medis : 31
Kepentingan Asing : 180
Kemoterapi : 107, 108, 111, 118
Kesehatan
Modern : xiii, xiv, xv,
31, 97, 98, 99, 104, 116, 118
Ketentuan
Mengenai Kemasan : 185
Mengenai Periklanan : 185
Mengenai Kawasan Tanpa
Rokok : 186

Ketergantungan : xiv, xv, 31,
33, 34, 43, 46, 98, 104, 127,
147, 203, 204
Konglomerat : 103
Kretek : xvi, 22, 45, 46, 58, 59,
84, 144, 147, 151, 153, 154,
155, 156, 160, 161, 162, 164,
165, 168, 169, 170, 171, 173,
174, 175, 179, 185, 186, 187,
195, 200, 201, 202, 203, 204,
205
Komisi Perdukunan (*Quackery*) :
105
Konservatif : 76, 120
Korea : 36, 46, 47, 54, 128, 162

L

Legalisasi Ganja : 78
Lembaga Menanggulangi
Masalah Merokok (LM3) :
195
Local Knowledge : 36
LSM : 39, 44, 178, 195

M

Marcuse, Herbert : xv, 30, 31,
32
Marlboro : 21, 162, 175
Master Settlement Agreement
(MSA) : 125, 171
Medikalisasi Kehidupan : xiv,

32, 46
Merger : vi, 66, 102, 113, 114,
115, 131, 133, 146, 165
Merkuri : 155, 156, 157
Micro-Nutrient : 118, 144
Modifikasi Genetik : 145, 146
Modernisme
 Modernisasi : 23, 24, 25, 27,
 28, 29, 32, 33, 34, 38
Monopoli Radikal : xiv, 32
Muhammadiyah : 180, 181
Multilateral : 137
Multinasional : v, vi, 19, 21, 39,
 40, 46, 47, 81, 129, 130, 132,
 162, 163, 164, 165, 166, 167
Muller, Franz H : 54, 55

N

Nano-Biologi : 144
Naturopati/Sin She : 104
Nazi : xi, 54, 55, 56, 57, 58, 59,
 60, 61, 112
Niconovum : 146
Nicotine : xii, 111, 144
 Replecement Therapy : 46,
 171
Neo-Liberalisme : 37, 39
Neo-Imperialisme : 19, 205
Negara
 Pusat : 220
 Pinggiran : vi, xiv, 35

New York : xiii, 59, 61, 66, 74,
 75, 76, 77, 78, 79, 80,
 81, 82, 83, 86, 89, 91, 92,
 108, 110, 111, 116, 124, 134,
 144
New York Magazine : 78
New York Times : 77, 78, 111
Novartis : 112, 113, 114, 115
Nusantara : 152, 153, 154, 200,
 201, 203, 204

O

Open Society Institute : 78

P

PBB : 42, 52, 116
Pajak Tembakau : 53
Partai Demokrat : 74, 76, 85,
 120
Partai Republik : 75, 76, 85, 120
Paradoks : xiii, 20, 123, 125,
 126, 132, 158
*Passive Smokers, Secondhand
 Smoker*, Perokok Pasif : 53,
 55, 141
Paus Benedict : 52
Paus Urban : 52
Pfizer : 112, 113, 114, 115, 121
Peking Union Medical College :
 104, 105
Perang Dunia : xiv, 39, 59, 60,

105, 112, 115, 117, 156
Perang Anti-Rokok : iv
Peraturan Pemerintah Nomor 81
Tahun 1999 : 165, 170, 171
Peraturan Pemerintah Nomor 38
Tahun 2000 : 171
Peraturan Pemerintah Nomor 19
Tahun 2003 : 182
Perdagangan Bebas : 24, 38, 42,
45, 80, 81, 83, 84, 118, 125,
129, 137, 138, 139
Positivisme : 28, 29, 30 31
Perkins, John : 40
Petras, James : 39
Philip Morris International : 119,
128, 130, 134, 161, 167, 174
Pragmatisme : 84, 85, 200, 205
Pro-Choice : 82, 136, 159
Project Cerberus : 134, 135, 136
Pro-Life : 82

R

Rancangan Undang-Undang
(RUU) Tentang Pengendalian
Dampak Produk Tembakau
Terhadap Kesehatan : 177
Rath Health Foundation : 144
Regulasi : vi, 42, 45, 89, 123,
135, 136, 137, 141, 166, 169,
171, 174, 178, 181, 182, 187,
193, 194, 195, 196

Reynolds American : 121, 132,
146
Rezim Kesehatan : xiii, xv, 97,
98, 104, 115, 116, 119, 128,
204
Relasi Kuasa Pengetahuan : 19,
32
Riset : v, vi, 25, 28, 35, 55, 58,
59, 60, 68, 91, 92, 98, 99,
100, 101, 107, 110, 111, 115,
134, 142, 145, 157, 163
Robert Wood Johnson
Foundation : 100
Rockefeller Foundation (RF) :
92, 100, 105
Rockefeller Medical Syndicate :
108
Rockefeller-Morgan : 106, 107,
110, 111, 112, 113, 115, 116,
118, 119, 128
Rokok Putih : 59, 162, 165, 167,
170, 171
RJ Reynold Tobacco : 58

S

Sains : 48
Salomon Brothers Inc. : 65, 66,
71, 72, 73
Sampoerna, HM : 21, 135, 161,
168, 169
Sherman Anti-Trust Act : 58,

102, 103
Sistem Dunia : xiv, 34, 35, 36
Sindikasi Industri Farmasi : 107,
113, 117
Skenario : 147
Social Medicine : 115, 116
Soros, George : 74, 77, 78
Sosiologi : 34, 35
Subordinasi : 33, 34
Supply And Demand : 79
Bambang Sumitro, Sutiman : iv,
144, 155, 156, 157, 204
Stiglitz, Joseph E. : 39, 40 48
Stakeholder : 173, 178, 179, 190

T

Teknologi : iii, xv, 22, 25, 29,
30, 31, 47, 48, 66, 67, 73, 80,
97, 98, 100, 101, 104, 109,
144, 145, 155
Teknologi Bio-Molekuler : iv,
145
Tembakau : xii, xiii, xiv, xv, 19,
20, 21, 22, 45, 46, 51, 52, 53,
54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 81,
83, 84, 86, 87, 89, 92, 93, 97,
99, 100, 101, 103, 111, 112,
119, 120, 122, 123, 124, 125,
126, 127, 128, 129, 130, 131,
132, 133, 134, 135, 136, 137,
139, 140, 141, 144, 145, 146,

147, 151, 152, 153, 154, 155,
156, 158, 160, 161, 163, 164,
166, 167, 168, 170, 171, 172,
174, 175, 176, 177, 178, 179,
180, 182, 184, 185, 186, 188,
196, 200, 201, 202, 203, 204
The Joint FAO/WHO : 118
Time Magazine : 69
Tobacco Bonds : 127
Tobacco Free Initiative : 60
Tobacco Pharming : 145
Tobacco Production Corp : 119
Transnasional : xiii, 24
Trans-Fat : 81

U

Undang-Undang Kesehatan
Nomor 23 Tahun 1992 : 175
Undang Undang Kesehatan
Nomor 36 Tahun 2009 :175,
181
Uni Eropa : 20, 37, 41, 43, 167
United State Department Of
Agriculture (USDA) : 145
Universitas Brawijaya : 144, 155
Universitas Indonesia : 173
University Harvard School Of
Public Health : 101
University Of Michigan School
Of Public Health : 101
Universitas Johns Hopkins : 70

US Centre Of Disease Control &
Prevention Foundation : 86

V

Vector Tobacco (Liggett Group
Inc.) : 145

W

Wali Kota : xiii, 61, 74, 75, 76,
77, 78, 82, 86, 91, 92, 108,
110, 124, 188

Wallerstein, Immanuel : xiv, 29,
34, 35, 36, 39

Wall Street : 40, 59, 66, 67, 70,
71, 72, 75, 129

WHO : v, xiii, xiv, 21, 41, 52,
60, 61, 87, 92, 116, 117, 118,
119, 125, 134, 139, 163, 164,
171, 172

World Health Assembly
Tobacco-Free Initiative : 60

World Lung Foundation And
The International Union
Against Tuberculosis And
Lung Disease : 86

WTO : xiv, 37, 38, 39, 40, 41,
42, 43, 84, 118, 137, 138, 139

Y

Yayasan Kemitraan Indonesia
Sehat : 195

Yayasan Laura Spelman

Rockefeller : 106

Yayasan Lembaga Konsumen
Indonesia : 181, 192

Z

Zahar, Gretha : 144, 155, 156,
157, 204

Zat Adiktif : 175, 182

Barangkali, sebagian orang di antara kita yang dibesarkan dalam suatu keyakinan bahwa kapitalisme adalah sinonim dengan pasar bebas dan demokrasi akan terkejut, ketika tahu bahwa apa yang disebut globalisasi pasar bebas sebenarnya telah direncanakan secara terpusat oleh sindikasi korporasi global yang besarnya melebihi ukuran banyak negara. Konsolidasi modal melalui merger (penggabungan) dan akuisisi (pencaplokan) serta aliansi strategis antar perusahaan besar dunia membuat kendali pasar dunia jatuh ketangan segelintir konglomerasi global. Implikasinya sistem politik global pun jelas tidak 'suci' dari rekayasa sosial yang jauh hari telah dirancang oleh kepentingan korporasi global, ditambah hegemoni "rezim pengetahuan" ikut berperan besar dalam memuluskan jalan kepentingannya.

Kita semua akan tambah terkejut ketika tahu, gerakan anti tembakau global senyatanya adalah muslihat kapitalisme global melalui persekutuan dua korporasi besar, yakni Rockefeller–Morgan. Kedua entitas konglomerasi bisnis ini telah mengonsolidasikan kendali industri perekonomian nasional Amerika secara umum, yakni dengan mengeliminasi potensi konflik kepentingan dan kompetisi pasar yang merugikan satu sama lain lewat pembentukan sebuah sindikasi korporasi. Sementara Johns Hopkins University dan lembaga akademis lainnya, yang menjadi mitra sindikasi Rockefeller-Morgan, berperan sebagai otoritas yang "mengendalikan rasionalitas" dalam kerangka ilmiah untuk menggerakkan perspektif berpikir masyarakat dunia agar selaras dengan arus kepentingan modal mereka.

Persekutuan Rockefeller-Morgan adalah sponsor utama Michael Bloomberg (donatur gerakan anti rokok global ke 15 negara, termasuk Indonesia) ketika dia maju bertarung untuk kali ketiga dalam pemilihan walikota New York. Dalam persekutuan Rockefeller-Morgan plus Bloomberg ini tampak kasat mata muslihat ekspansi kapitalisme global yang mengejawahtah dalam suatu paradoks ganjil, namun sanggup mensinergikan kepentingan korporasi industri farmasi dan tembakau dalam satu kepentingan nasional Amerika. Tampaknya gabungan ketiganya telah menciptakan sebuah kekuatan ekonomi dan kepentingan yang luar biasa, yang tidak saja sanggup menggerakkan trend dan tujuan ekonomi nasional Amerika, bahkan pada tingkatan global tak luput jua dikendalikan olehnya.



INDONESIA
BERDIKARI

ISBN: 978-602-99292-2-5



9 786029 929225

